



LAKIN 2021

Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo



KATA PENGANTAR

Sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Keuangan Negara, sebagaimana Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah menyusun laporan pertanggungjawaban APBN/APBD berupa Laporan Keuangan Pemerintah.

Dengan mengusung konsep yang dikenal sebagai anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), UU Keuangan Negara menghendaki pada saat pelaporan pertanggungjawaban APBN/APBD, disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan.

Selanjutnya Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengharuskan setiap entitas pelaporan yaitu: (1) pemerintah pusat; (2) pemerintah daerah; (3) Kementerian/Lembaga; dan (4) bendahara umum negara, menyusun dan menyajikan bukan hanya laporan keuangan tetapi juga laporan kinerja (LAKIN).

LAKIN menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi setiap entitas pelaporan atas penggunaan anggaran dalam pelaksanaan APBN/APBD.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Gorontalo sebagai Instansi Vertikal Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan, menyusun LAKIN yang berisi berbagai capaian kinerja selama tahun 2021 sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas serta penggunaan anggaran. Hal ini akan memberikan informasi yang memadai baik di internal maupun eksternal.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga LAKIN Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2021 dapat tersusun dengan baik sehingga dapat memenuhi amanah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Keuangan Negara dan dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan perbaikan terus-menerus dalam rangka meningkatkan kinerja seiring dengan bertambahnya tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo di masa yang akan datang.

Gorontalo, 28 Januari 2022
Kepala Kanwil,


Sugiyarto

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, memiliki tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mendukung pencapaian visi dan misi Ditjen perbendaharaan sebagaimana Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perbendaharaan Tahun 2020-2024, dimana visi yaitu **“menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia”**. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi yang meliputi:

- 1) Mewujudkan pengelolaan kas negara yang prudent, efisien, dan optimal;
- 2) Mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efektif, efisien, dan akuntabel;
- 3) Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan dan tepat waktu;
- 4) Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan;
- 5) Mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern;
- 6) Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi informasi perbendaharaan yang modern, efektif, dan adaptif.

I. Kinerja Utama

Agar memudahkan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, dirumuskanlah sasaran-sasaran strategis sebagai rincian atas visi, misi dan tujuan organisasi. Setiap sasaran tersebut yang merupakan kinerja-kinerja yang lebih operasional disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud, dan dipetakan kedalam suatu *dashboard*/Peta Strategi sehingga terlihat kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi tersebut.

Pada tahun 2021 ditetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis yaitu:

- 1) Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel dan produktif;
- 2) Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien;
- 3) Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel;
- 4) Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan;
- 5) Pengelolaan kas yang optimal;
- 6) Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien;
- 7) Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu;
- 8) Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi;
- 9) Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel;

10) Sistem informasi dan teknologi yang andal.

10 (sepuluh) Sasaran Strategis dirinci lebih spesifik kedalam 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis atau kinerja. Setiap IKU disertai dengan target yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai, dituangkan kedalam suatu Kontrak Kinerja.

Berdasarkan evaluasi kinerja pada tahun 2021, capaian kinerja Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo sebagai kinerja utama tercapai dengan sangat baik. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang dicapai adalah sebesar 109,76, meningkat dari NKO tahun 2020 yaitu 107,44.. Dari 20 (dua puluh) IKU Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2021, seluruh target telah tercapai dan memenuhi harapan dimana rincian capaian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil DJPb terealisasi sebesar 99,49 dari target 94;
2. Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program terealisasi sebesar 100 dari target 82;
3. Rata-rata nilai kualitas output monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran terealisasi sebesar 94,63 dari target 91;
4. Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil DJPb terealisasi sebesar 4,80 dari target 4,64;
5. Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran satker yang diselesaikan tepat waktu terealisasi sebesar 100% dari target 100%;
6. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi terealisasi sebesar 93,28 dari target 87,50;
7. Nilai kinerja pelaksanaan pembinaan dan supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN terealisasi sebesar 9,38 dari target 8,50;
8. Persentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI terealisasi sebesar 100% dari target 100%;
9. Persentase akurasi perencanaan kas Kanwil terealisasi sebesar 100% dari target 82%;
10. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L terealisasi sebesar 94 dari target 89;
11. Rata-rata nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN terealisasi sebesar 99,53 dari target 90;
12. Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal terealisasi sebesar 100% dari target 98,1%;
13. Nilai kualitas Laporan *Government Finance Statistic* (GFS) tingkat wilayah terealisasi sebesar 95,10 dari target 79;
14. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* terealisasi sebesar 94,4 dari target 84;
15. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal terealisasi sebesar 87,07 dari target 83;
16. Nilai rata-rata hard competency pegawai terealisasi sebesar 93,90 dari target 78;

17. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil DJPb terealisasi sebesar 97,19 dari target 95,50;
18. Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W terealisasi sebesar 91,70 dari target 82;
19. Tingkat kualitas pengelolaan BMN terealisasi sebesar 112% dari target 100%;
20. Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi terealisasi sebesar 100% dari target 80%.

Selanjutnya pada sisi pengelolaan anggaran, selama tahun 2021 Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo telah merealisasikan belanja DIPA untuk semua jenis belanja yaitu sebesar Rp.4.058.316.889. dari total pagu sebesar Rp.4.114.280.000. atau sebesar 98.64%. Kualitas pemanfaatan anggaran tersebut tidak saja direfleksikan dengan sekedar menyerap pagu anggaran, tetapi memperhitungkan juga ketercapaian *output* serta upaya efisiensi penyerapannya. Pemanfaatan anggaran harus memberikan dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas

II. Kinerja Lainnya

Selama tahun 2021 Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo telah berhasil memperoleh berbagai capaian, antara lain adalah Peringkat Tiga untuk Nilai kualitas Laporan *Government Finance Statistic* (GFS) tingkat wilayah Kategori Kanwil Kecil, Peringkat Pertama Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* Kategori Kanwil Kecil.

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-40/PB/2021 tanggal 28 Januari 2021 Hal Penetapan Unit Kerja yang Mengikuti Penilaian Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Tingkat Nasional Tahun 2021, dijelaskan bahwa tahun 2021 penilaian WBK/WBBM tingkat nasional akan menjadi IKU Kemenkeu-*Wide* dan menjadi IKU *mandatory* bagi seluruh unit eselon I. Untuk mendukung pencapaian IKU tersebut, DJPb mengirimkan 104 (seratus empat) unit kerja yang terdiri dari 49 (empat puluh sembilan) unit kerja mengikuti penilaian WBK termasuk Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo, serta 55 (lima puluh lima) unit kerja mengikuti penilaian WBBM tingkat nasional. Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo merupakan unit kerja vertikal yang diusulkan mengikuti penilaian WBK karena telah memenuhi penilaian akselerasi pembangunan ZI tahun 2020. Setelah melalui proses panjang penanaman dan pelaksanaan nilai integritas, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo menjadi salah satu unit peraih gelar WBK pada Tahun 2021 dari Kementerian PAN-RB sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor ND1940/SJ.2/2021 tanggal 16 Desember 2021 hal Penganugerahan Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM Tahun 2021. Keberhasilan dalam mencapai predikat WBK bukan merupakan akhir, melainkan langkah yang berkelanjutan demi menjaga dan turut serta mewujudkan *island of integrity* di Republik Indonesia.

Perbaikan terus menerus dilakukan, berbagai inovasi terus diciptakan dalam rangka meningkatkan proses manajemen dan pelayanan. Peningkatan integritas pegawai, dan

peningkatan pengelolaan kinerja juga terus menjadi perhatian. Berbagai keberhasilan kinerja yang telah dicapai tidak akan membuat Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo berhenti, tetapi akan menjadi pemicu untuk meningkatkan kinerjanya untuk mewujudkan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo sebagai pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat nasional.



If you want to reach your potential, you must be willing to figure out what you believe and have the courage to act on your beliefs.

- Robert S. Kaplan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	2
	B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
	C. Peran Strategis	7
	D. Sistematika Laporan	8

BAB II	PERENCANAAN KINERJA	9
	A. Rencana Strategis	10
	B. Penetapan/Perjanjian Kinerja	19

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	20
	A. Capaian Kinerja Organisasi	21
	B. Realisasi Anggaran	103
	C. Kinerja Lainnya	106

BAB IV	PENUTUP	120
---------------	----------------	------------

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2021
- Rencana Kinerja Tahunan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2021
- Rencana Kerja dan Anggaran Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2021

BAB I

PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI
- C. PERAN STRATEGIS
- D. SISTEMATIKA LAPORAN

**A. LATAR
BELAKANG**

Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, adalah instansi vertikal eselon II Direktorat Jendral Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo membawahi 2 (dua) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), yaitu KPPN Tipe A1 Gorontalo dan KPPN Tipe A2 Marisa dengan wilayah kerja meliputi 1 (satu) Pemerintah Provinsi dan 6 (enam) Pemerintah Kabupaten/ Kota yaitu Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Boalemo.

Untuk mewujudkan azas akuntabilitas sebagai salah satu azas penyelenggaraan *good governance* sebagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dalam setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dengan mengusung konsep yang dikenal sebagai anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Keuangan Negara dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran harus disampaikan informasi mengenai kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. kemudian ditegaskan kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 yang mengharuskan setiap entitas pemerintah untuk menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2021, dalam penggunaan anggaran untuk mendukung pencapaian visi dan misi Ditjen Perbendaharaan. Selain itu LAKIN juga digunakan sebagai alat kendali serta evaluasi untuk mendapatkan masukan demi perbaikan yang memacu peningkatan kinerja pada Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo.

Secara prinsip, LAKIN kanwil DJPb Provinsi Gorontalo telah memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

**B.TUGAS,
FUNGSI,
DAN
STRUKTUR
ORGANISASI**

Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo merupakan instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan lingkup kerja satuan kerja dan pemerintah daerah yang berada di Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara. Berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Insransi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan, serta menyelenggarakan fungsi- fungsi:

- a. penelaahan dan pengesahan atas revisi dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan anggaran;
- c. penyusunan reuiu belanja pemerintah (*spending review*) dan reuiu pelaksanaan anggaran;
- d. pembinaan teknis sistem akuntansi;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana transfer;
- f. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah;
- g. pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) ;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- i. pembinaan dan monitoring atas investasi pemerintah, pinjaman dan kredit program di daerah;
- j. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
- k. pelaksanaan layanan bersama Kementerian Keuangan di daerah; ·
- l. pemberian pembinaan terkait dengan kewenangan dan pelaksanaan teknis perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN) ;
- m. pelaksanaan manajemen mutu layanan dan koordinasi inovasi layanan;
- n. pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (*customer relationshipmanagement*);
- o. pelaksanaan kehumasan dan layanan Keterbukaan Infrmasi Publik (KIP);
- p. pelaksanaan konsolidasi data Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
- q. pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
- r. pelaksanaan kepatuhan internal; dan
- s. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo didukung oleh unit-unit eselon III, yang meliputi 1 Bagian, 4 Bidang dan 2 KPPN. Unit-unit tersebut bekerja sesuai reformasi birokrasi yang berbasis pada pelayanan yang efisien, efektif dan fokus. Adapun susunan organisasi Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo terdiri dari :

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I;
- c. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II;

- d. Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan
- e. Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan organisasi, dukungan sarana dan prasarana kerja, melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan, tata usaha, rumah tangga, kehumasan dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), protokoler pimpinan, dan pengelolaan kinerja.

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang pelaksanaan anggaran pemerintah pusat, penganggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta melaksanakan penyusunan revidi atas pelaksanaan dan analisis kinerja anggaran belanja pemerintah pusat.

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II mempunyai tugas melaksanakan asistensi dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran daerah, investasi pemerintah, pinjaman, kredit program, dana transfer, dan pelaksanaan anggaran belanja daerah, serta melaksanakan Kajian Fiskal Regional, analisis kinerja anggaran belanja daerah, koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah, serta layanan bersama Kementerian Keuangan di daerah.

Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN), melaksanakan penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah (PUSAP), melaksanakan penyusunan statistik keuangan sesuai dengan *Government Finance Statistics (GFS)*, serta melaksanakan analisis atas laporan keuangan.

Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan proses bisnis, supervisi, implementasi dan bimbingan teknis operasional aplikasi pada KPPN, melaksanakan koordinasi mutu pelayanan dan inovasi, penilaian kinerja dan pemenuhan standar tata kelola KPPN, melaksanakan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan resiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, melaksanakan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, pembinaan pertanggungjawaban bendahara dan pengelolaan rekening pemerintah, monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (*customer relationship management*) serta pelaporan pelaksanaan tugas Pembinaan Pengelola Perbendaharaan (*treasury relationship representative*).

Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, di wilayah kerjanya membawahi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang berlokasi di wilayah Provinsi Gorontalo, antara lain:

1. KPPN Gorontalo berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 58 Kota Gorontalo;

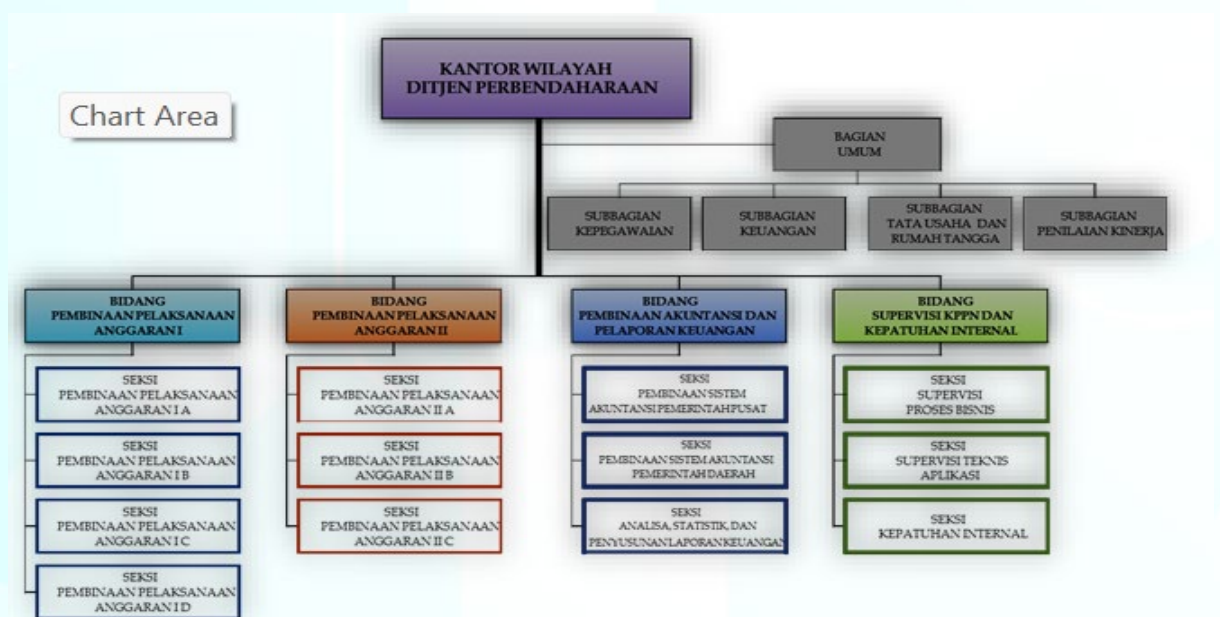
2. KPPN Marisa berkantor di Jalan Pelabuhan Marisa Kabupaten Puhwato.

Sebagai bagian dari unsur Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, tugas dan fungsi Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo pada hakekatnya merupakan representasi dari Kementerian Keuangan, khususnya dalam hal penyelenggaraan penerimaan dan belanja negara. Oleh karena itu, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dalam menyelenggarakan tugas/kegiatannya berdasarkan/sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Struktur Organisasi Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dapat digambarkan dalam bagan struktur organisasi seperti pada bagan di bawah berikut ini.

Struktur Organisasi

GAMBAR 1.1

Bagan Struktur Organisasi Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo

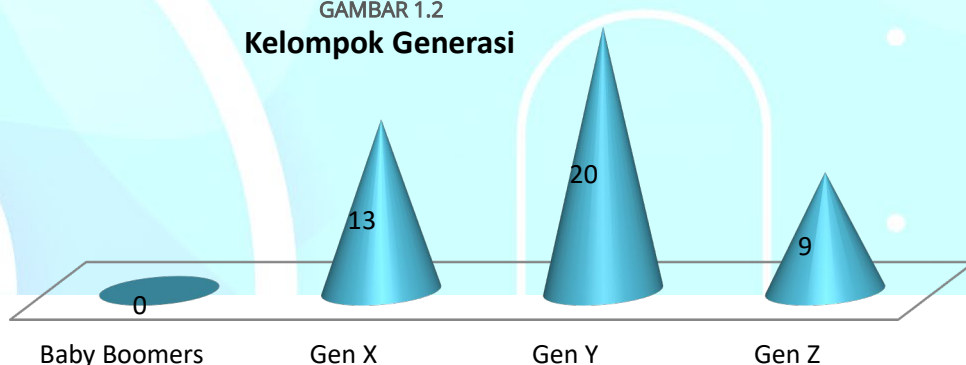


Sumber Daya Manusia Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo

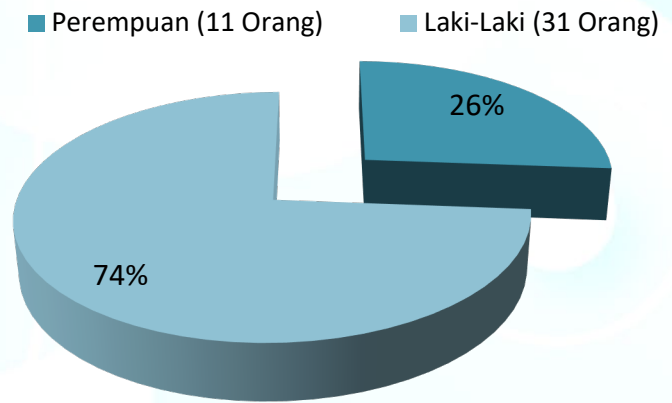
Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Jumlah SDM Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo terdiri dari **berbagai** macam kompetensi menjadi tantangan dalam pengelolaan SDM terutama dalam menempatkan staf pelaksana dalam rangka mengisi formasi yang dibutuhkan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilaksanakan dengan baik. SDM Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo per 31 Desember 2021 adalah sejumlah 42 orang dengan rincian sebagai berikut:

GAMBAR 1.2

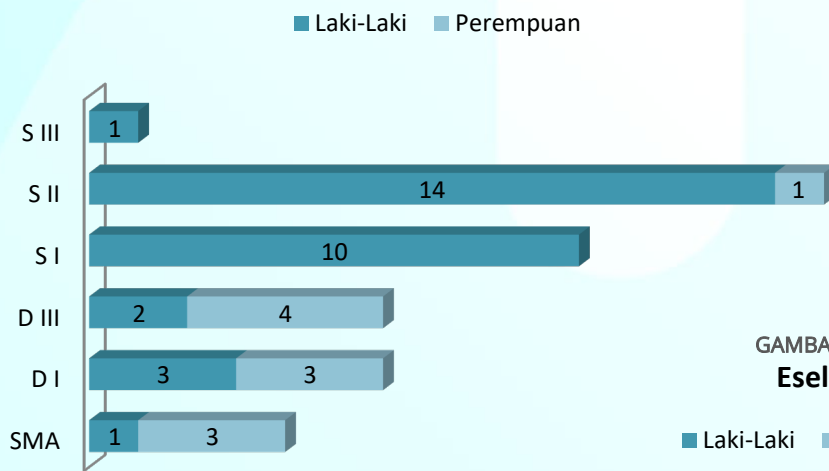
Kelompok Generasi



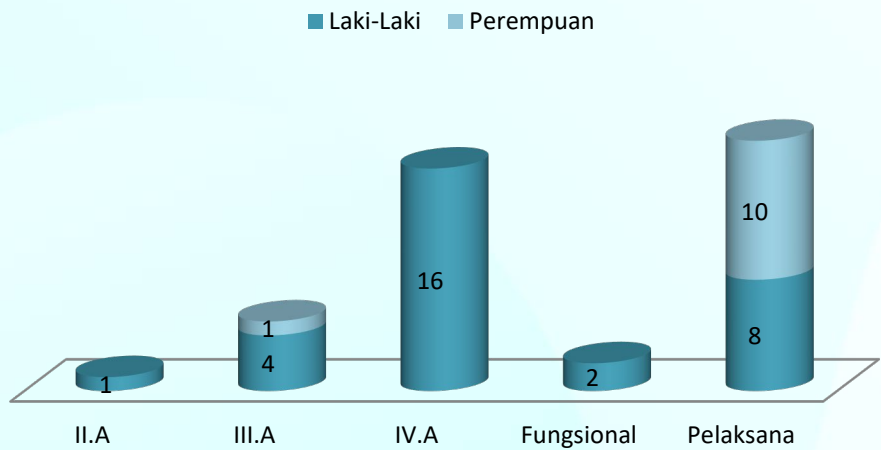
GAMBAR 1.3
Jenis Kelamin



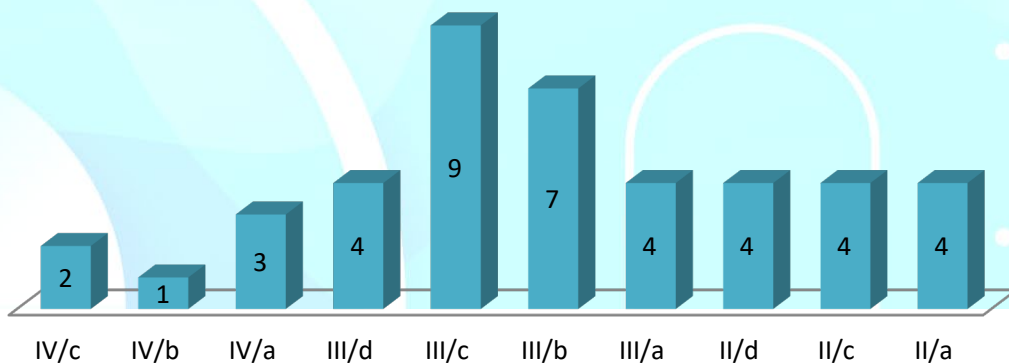
GAMBAR 1.4
Pendidikan



GAMBAR 1.5
Eselon



GAMBAR 1.6
Kepangkatan



C. PERAN STRATEGIS

Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo sebagai pengelola perbendaharaan negara di wilayah kerjanya mempunyai tugas sebagaimana Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. memberikan pelayanan langsung kepada pengguna layanan, memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan negara khususnya di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mempunyai posisi strategis di Provinsi Gorontalo yaitu:

1. Sebagai Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan di wilayah Provinsi Gorontalo;
2. Sebagai *Regional Chief Economist* (RCE) di Provinsi Gorontalo;

Sebagai unit vertikal setingkat eselon II, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo berperan sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah, Ditjen Perbendaharaan diberikan mandat oleh Menteri Keuangan yang memberikan penekanan terkait penguatan peran kantor wilayah sebagai *chief economist* di daerah. Kantor wilayah saat ini dituntut memiliki kemampuan untuk menyampaikan berbagai kebijakan Kementerian Keuangan, sekaligus memberikan *insight* mengenai kondisi perekonomian terkini dan meningkatkan peran kantor wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kantor Wilayah DJPb Provinsi Gorontalo bersama KPPN di wilayah kerjanya sebagai garis depan pelayanan juga turut memantau dan mengevaluasi kinerja APBN kita dalam praktik dan realisasinya.

Kantor Wilayah DJPb Provinsi Gorontalo setiap bulan menyusun laporan *Regional Chief Economist* (RCE) berisikan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kantor wilayah selaku *Regional Chief Economist* yang mampu memetakan kondisi permasalahan di wilayahnya untuk kemudian mengambil langkah strategis yang dapat ditempuh untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Peran sebagai *Regional Chief Economist* perlu ditempuh mengingat setiap daerah memiliki problematika yang berbeda sehingga perlu dilakukan pendekatan dan identifikasi yang berbeda-beda. Kantor wilayah sebagai unit vertikal dipandang lebih mampu memahami kondisi permasalahan di wilayahnya sekaligus menentukan pendekatan dan menemukan solusi yang paling pas sesuai dengan keberagaman wilayah di Indonesia tersebut.

Kantor wilayah telah mengambil langkah seperti diseminasi KFR, pelaksanaan *Focus Group Discussion* bersama para stakeholder dan pemerintah daerah, sosialisasi KUR dan UMI, penguatan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, dan sosialisasi *Digipay* dan *Marketplace* pemerintah. Diharapkan melalui penguatan peran kantor wilayah melalui *Regional Chief Economist*, banyak permasalahan terkait pelaksanaan anggaran dapat segera diidentifikasi dini sehingga solusi untuk permasalahan tersebut dapat segera untuk dirumuskan. Peran *Regional Chief Economist* yang diemban oleh kantor wilayah juga diharapkan akan mampu menjadi masukan yang terstruktur, sistematis dan komprehensif dalam penyusunan kebijakan baik di

tingkat daerah maupun ditingkat pusat agar dapat diperoleh pertumbuhan ekonomi yang baik serta optimalisasi output hasil belanja pemerintah pusat dan daerah.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian LAKIN Kantor Wilayah DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

C. Kinerja Lainnya

Berisi uraian simpulan umum atas capaian kinerja organisasi (menyimpulkan bahwa kinerja yang telah dilakukan, baik kinerja utama maupun kinerja lainnya, telah berhasil atau belum berhasil/belum memenuhi target).

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

Perjanjian Kinerja Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2021, Rencana Kinerja Tahunan 2021, serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS
- B. PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Visi dan Misi Tujuan Strategis Ditjen Perbendaharaan

Dalam rangka menghadapi perubahan kondisi nasional yang cepat dan dinamis, diperlukan strategi organisasi yang baik sehingga mampu mengikuti segala dinamika perubahan yang terjadi, baik perubahan struktur, sistem, budaya kerja maupun perubahan-perubahan lainnya yang bersifat strategis. sejak periode 2020-2024 Kanwil sudah tidak memiliki visi, misi dan tujuan sendiri, namun sebagai unit vertikal, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo harus mampu mendukung upaya pencapaian visi, misi dan tujuan Ditjen Perbendaharaan, sebagaimana dijabarkan dalam Rancana Strategis (Renstra) Ditjen Perbendaharaan Tahun 2020-2024, Kanwi DJPb mendukung dan mengawal pencapaian visi Ditjen Perbendaharaan yaitu :

“Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Dunia”. Untuk mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan **“Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, Ditjen Perbendaharaan menjalankan misi yang sejalan dengan tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan yang meliputi:

Mewujudkan pengelolaan kas negara yang prudent, efisien, dan optimal;

Mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, dan akuntabel;

Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu;

Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan;

Mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern;

Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi informasi perbendaharaan yang modern, efektif, dan adaptif.

Dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Ditjen Perbendaharaan berperan dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan 1 (API): Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dan Agenda Pembangunan 3 (APS): Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam hal ini, Ditjen Perbendaharaan terlibat dalam arah kebijakan nasional dalam pelaksanaan API, yaitu: (1) penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan koperasi; (2) penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Sementara itu, dalam pelaksanaan APS, Ditjen Perbendaharaan terlibat pada arah kebijakan nasional: mengentaskan kemiskinan.

Dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan, dengan bersinergi dengan unit Eselon I Kementerian Keuangan lainnya, Ditjen Perbendaharaan menjalankan arah kebijakan Kementerian Keuangan tahun 2020-2024, yaitu:

Pengelolaan belanja negara yang berkualitas;

Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali;

Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Di samping itu, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Ditjen Perbendaharaan dalam mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan, ditetapkan lima tujuan Tahun 2020-2024, yaitu :

Pengelolaan kas negara yang prudent dan optimal;

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang andal dan akuntabel;

Tata kelola investasi pemerintah dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern;

Sistem perbendaharaan dan teknologi informasi yang andal, modern, dan sesuai best practice;

Pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara modern dan optimal.

Dalam rangka mendukung pencapaian lima tujuan Ditjen Perbendaharaan, telah ditetapkan 10 (sepuluh) sasaran strategis pada Kanwil beserta indikator kinerjanya, dimana untuk tahun 2021 target kinerjanya sebagai berikut yaitu:

Sasaran strategis “Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel dan produktif” dengan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja adalah:

Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil DJPb dengan target sebesar 94;

Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program dengan target sebesar 82.

Sasaran strategis “Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien” dengan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja adalah:

Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil DJPb dengan target sebesar 4,64.

Sasaran strategis “Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel” dengan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja adalah:

Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran satker yang diselesaikan tepat waktu dengan target sebesar 100%.

Sasaran strategis “Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan” dengan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja adalah:

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi dengan target sebesar 87,5;

Nilai kinerja pelaksanaan pembinaan dan supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN dengan target

sebesar 8,5%.

Persentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI dengan target sebesar 100%.

Sasaran strategis “Pengelolaan kas yang optimal” dengan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja adalah:

Persentase akurasi perencanaan kas dengan target sebesar 82%.

Sasaran strategis “Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien” dengan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja adalah:

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L dengan target sebesar 89;

Rata-rata nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN dengan target sebesar 90.

Sasaran strategis “Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu” dengan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja adalah:

Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal dengan target sebesar 98,1%;

Nilai kualitas Laporan *Government Finance Statistic* (GFS) tingkat wilayah dengan target sebesar 79.

Sasaran strategis “organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi” dengan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja adalah:

Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* dengan target sebesar 84;

Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal dengan target sebesar 83;

Nilai rata-rata *hard competency* pegawai dengan target sebesar 78.

Sasaran strategis “Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel” dengan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja adalah:

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil DJPb dengan target sebesar 95,5%;

Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W dengan target sebesar 82;

Tingkat kualitas pengelolaan BMN dengan target sebesar 100%.

Sasaran strategis “ Sistem informasi dan teknologi yang andal” dengan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja adalah:

Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi dengan target sebesar 80%.

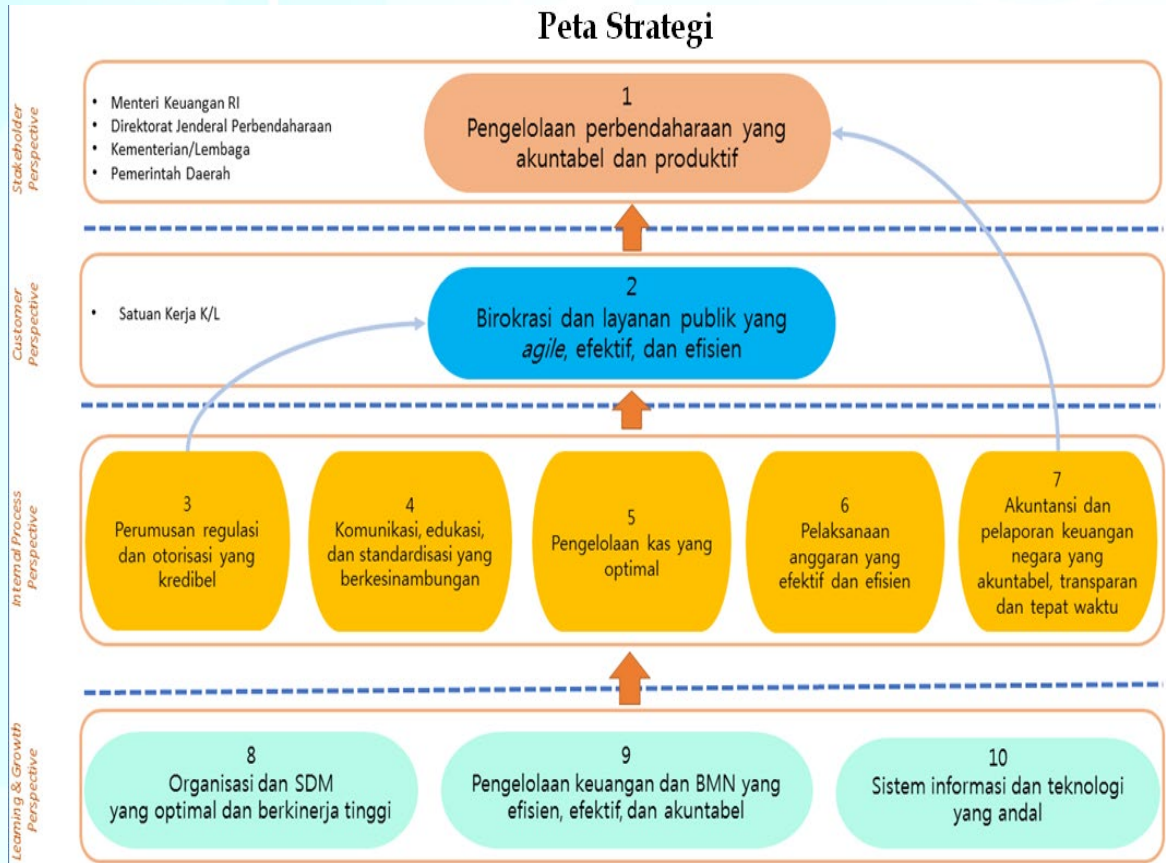
B. PENETAPAN/ PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja tahun 2021 yang merupakan Kontrak Kinerja Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan, dijabarkan dalam 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang terangkum menjadi hubungan sebab akibat dalam Peta Strategi Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2020 tersebut dapat ditunjukkan pada Gambar 2.1.

GAMBAR 2.1

Peta Strategi Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2021

Peta Strategi Perbendaharaan Gorontalo Tahun 2021



Peta Strategi yang telah disusun tersebut dapat dilihat berdasarkan 4 (empat) perspektif, yaitu:

1. Stakeholders Perspective

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang *stakeholder* (pemangku kepentingan). Stakeholder adalah pihak internal dan eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi, tetapi tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

2. Customer Perspective

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *customer* (pengguna layanan) dan/atau harapan organisasi terhadap *customer*. *Customer* merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi.

3. *Internal Process Perspective*

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan dan menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*).

4. *Learning and Growth Perspective*

Perspektif ini mencakup sasaran strategis berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk setiap perspektif dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Stakeholders perspective* terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu:

a. **Pengelola perbendaharaan negara yang akuntabel dan produktif**

Pengelolaan perbendaharaan artinya Ditjen Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi, sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengelolaan perbendaharaan yang dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan juga untuk mendukung pengelolaan pembiayaan dalam rangka mencukupi kebutuhan kas dalam pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan tugas pengelolaan perbendaharaan negara sebagaimana tersebut di atas wajib dikelola secara akuntabel, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, pengelolaan perbendaharaan juga diharapkan dilakukan secara produktif, yaitu dapat menjadi nilai tambah dalam membangun pondasi kokoh atas fundamental ekonomi negara Indonesia. Namun demikian, pengelolaan perbendaharaan dan risiko tersebut harus dilakukan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian, efektif, dan efisien.

2. *Customer perspective* terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu:

a. **Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien**

Sebagaimana undang undang tentang Pelayanan Publik, setiap institusi penyelenggara negara dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai peraturan atas barang/jasa/pelayanan adminstratif yang disediakan oleh penyelenggara negara. Dalam rangka mendapatkan penyelenggara negara yang mampu melayani masyarakat dan mampu meletakkan pondasi yang diperlukan bangsa untuk memenangkan persaingan global, diperlukan birokrasi yang agile, efisien, dan efektif, yaitu yang fleksibel, lincah dan cepat dalam merespon perubahan, serta mampu menggunakan sumber daya yang tersedia dengan seminimal mungkin untuk mendapatkan target/output yang telah ditetapkan secara optimal.

3. *Internal process perspective* terdiri atas 5 (lima) sasaran strategis, yaitu:

a. Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel

Regulasi adalah peraturan yang disusun sebagai dasar dan arah dalam pengelolaan perbendaharaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Otorisasi adalah segala ketetapan yang dibuat oleh DJPb dan unit kerja di bawahnya dalam rangka pengelolaan perbendaharaan. Kredibel adalah dapat dipercaya yang mengandung maksud bahwa kebijakan bidang pengelolaan perbendaharaan merupakan kebijakan yang sistematis, efisien, efektif dan akuntabel dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel mengandung makna bahwa perumusan peraturan yang menjadi dasar dan arah dalam pengelolaan perbendaharaan serta segala ketetapan yang dihasilkan untuk mencapai tujuan sudah sesuai untuk menghasilkan output/outcome yang diharapkan serta merupakan kebijakan yang sistematis, efisien, efektif dan akuntabel.

b. Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan

Komunikasi dan edukasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman stakeholders atas peraturan dan kebijakan di bidang perbendaharaan untuk memperkuat implementasi peraturan dan kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya tujuan organisasi. Standardisasi bertujuan untuk mewujudkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola perbendaharaan melalui peningkatan kompetensi pengelola perbendaharaan berdasarkan kualifikasi kompetensi yang dipersyaratkan dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan APBN yang semakin berkualitas di seluruh Kementerian/Lembaga sehingga dapat menghasilkan output dan outcome yang maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Standardisasi pengelola perbendaharaan dimaksud dilaksanakan melalui program pengembangan kapasitas, uji kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan profesi jabatan fungsional di bidang perbendaharaan. Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan tata kelola keuangan yang bersifat dinamis, dibutuhkan strategi komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang kontinu, tidak tambal sulam serta berorientasi pada usaha membuat satker mampu menguasai secara menyeluruh aspek filosofi sampai dengan aspek teknis pengelolaan perbendaharaan.

c. Pengelolaan kas yang optimal

Sesuai dengan ketentuan UU No.1 tahun 2004, salah satu fungsi Perbendaharaan negara adalah melaksanakan pengelolaan kas. Pengelolaan kas yang optimal melalui perencanaan kas yang efektif dapat menghindarkan terjadinya cash mismatch, dapat menjamin ketersediaan kas secara akurat dan tepat waktu, serta optimalisasi idle cash secara pruden. Pruden artinya berhati-hati dalam setiap pengambilan

putusan/kebijakan maupun dalam melaksanakan pengelolaan kas maupun investasi pemerintah. Sebagai pengelola di bidang pengelolaan investasi, Ditjen Perbendaharaan sebagai regulator mampu mewujudkan penguatan regulasi sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif dan dapat menghasilkan penerimaan negara yang optimal.

d. Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien

Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien adalah Kemampuan BUN untuk mengawal pelaksanaan kebijakan pelaksanaan anggaran berjalan secara efektif dan efisien dengan memastikan kegiatan pelaksanaan anggaran pada BA Kementerian Negara/Lembaga maupun BA BUN berjalan sesuai dengan ketentuan/kebijakan Pelaksanaan Anggaran.

e. Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, Kanwil DJPb sebagai Pengelola Perbendaharaan di daerah menyusun Laporan Keuangan secara akuntabel, transparan, dan tepat waktu. Prinsip transparan dan akuntabilitas mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu dan jelas sebagai perwujudan pertanggungjawaban suatu unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang telah dikelola. Transparansi, akuntabilitas dan tepat waktu akan mendorong diungkapkannya kondisi yang sebenarnya sehingga setiap pihak yang berkepentingan (stakeholder) dapat memperoleh informasi yang akurat, andal dan terkini.

4. *Learning and growth perspective* terdiri atas 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu:

a. Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi

Organisasi yang optimal adalah organisasi yang mampu memwadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. SDM yang optimal adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal.

b. Pengelolaan Keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada

stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Pengelolaan BMN dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkannya adalah melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

c. Sistem informasi dan teknologi yang andal

Sistem informasi dan teknologi yang andal adalah sistem informasi terintegrasi yang mengelola dan mengolah berbagai jenis input data dan informasi (resources) keuangan menjadi hasil keluaran (output) real time data dan informasi keuangan yang konsisten dalam rangka membantu para pengambil kebijakan pada unit-unit organisasi lingkup Kemenkeu dan Kementerian/Lembaga lainnya untuk mengambil keputusan dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Pada tahun 2021, 10 (sepuluh) Sasaran Strategis tersebut terdiri atas 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama yang masing-masing ditargetkan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.2.

TABEL 2.2
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel dan produktif	1a-N Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil DJPb	94
		1b-N Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program	82
		1c-N Rata-rata nilai kualitas output monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	91
2.	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil	4,64 (skala 5)
3.	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	3a-N Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu	100%
4.	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	4a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87,5
		4b-N Nilai kinerja pelaksanaan pembinaan dan supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN	8,5
		4c-CP Presentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI	100%
5.	Pengelolaan kas yang optimal	5a-N Persentase akurasi perencanaan kas	82%

6.	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	6a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89
		6b-N	Rata-rata nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN	90
7.	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu	7a-N	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,1%
		7b-N	Nilai kualitas Laporan <i>Government Finance Statistic</i> (GFS) tingkat wilayah	79
8.	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	84
		8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83
		8c-N	Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	78
9.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel	9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil DJPb	95,5%
		9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W	82
		9c-N	Tingkat kualitas pengelolaan BMN	100%
10.	Sistem informasi dan teknologi yang andal	10a-N	Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	80%

Sebagaimana disepakati dalam Kontrak (Perjanjian) Kinerja Tahun 2020, dalam upaya mencapai 10 (sepuluh) sasaran strategis tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo didukung pendanaan yang dibagi ke dalam beberapa kegiatan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.3.

2.3

Pendanaan Per Kegiatan untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis

TABEL

FUNGSI	01 PELAYANAN UMUM	Rp	4.114.280.000
Sub Fungsi	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	Rp	4.114.280.000
PROGRAM	CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp	241.651.000
Kegiatan	CD.4803 Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp	13.459.000
Kegiatan	CD.4804 Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara	Rp	2.000
Kegiatan	CD.6212 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp	112.021.000
Kegiatan	CD.6213 Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp	83.499.000
Kegiatan	CD.6214 Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	Rp	2.267.000
Kegiatan	CD.6215 Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	Rp	21.802.000
Kegiatan	CD.6216 Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp	8.601.000
PROGRAM	WA Program Dukungan Manajemen	Rp	3.872.629.000
Kegiatan	WA.4715 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	3.189.495.000
Kegiatan	WA.4718 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp	18.100.000
Kegiatan	WA.4719 Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	660.068.000
Kegiatan	WA.4722 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	4.966.000

Adapun rincian atas pendanaan dan kinerja lebih lanjut diuraikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran, pada Lampiran LAKIN ini.

Catatan :Tidak terdapat refinement IKU dan Addendum kontrak selama tahun 2021, juga tidak terdapat perbedaan target kinerja antara Kontrak Kinerja dan Renstra karena Kanwil untuk periode 2020-2024 tidak memiliki Renstra sendiri.

BAB III

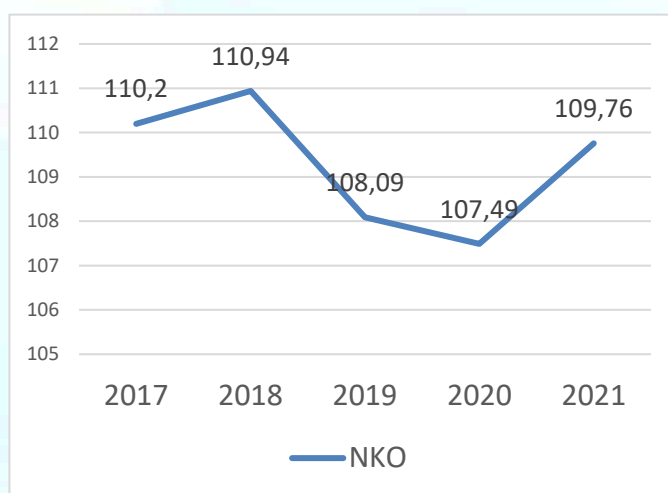
AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- B. REALISASI ANGGARAN
- C. KINERJA LAINNYA

Pengukuran capaian kinerja Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo adalah sebesar 109,76**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada setiap perspektif sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1.

PERSPECTIVE	BOBOT	NILAI
STAKEHOLDER	25%	109,93
CUSTOMER	15%	103,45
INTERNAL PROCESS	30%	108,87
LEARNING AND GROWTH	30%	113,65
NILAI KINERJA ORGANISASI		109,76

TABEL 3.1
Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif
Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1, seluruh perspektif mendapat nilai di atas 100 dengan nilai tertinggi terdapat pada *Internal Process Perspective*. Kinerja Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo ditunjukkan pada Grafik 3.1. GRAFIK 3.1 NKO Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo



Sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.1, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, NKO Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mengalami dinamika naik dan turun. Namun pada tahun 2018 terdapat kenaikan sebesar 0,74. Kemudian, pada tahun 2019 hingga 2020 mengalami penurunan sampai dengan angka 107,49 dan kembali meningkat di tahun 2021 dengan capaian sebesar 109,76. Penurunan ter-

sebut disebabkan oleh perubahan mendasar pada naiknya target dan adanya pandemi Covid-19, namun secara umum hasil yang diperoleh telah melampaui seluruh target yang ditetapkan. Capaian 20 IKU tersebut dapat ditunjukkan pada Tabel 3.2. Penjelasan capaian IKU secara detail dijelaskan pada tabel berikut :

TABEL 3.2
Capaian IKU Kemenkeu- Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2020

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama (bobot)	Target	Realisasi	Nilai
<i>Stakeholder Perspective (25%)</i>				27,48%
1	Pengelola perbendaharaan negara yang akuntabel dan produktif			109,93%
1a-N	Nilai kualitas LK BUN Tingkat Kanwil DJPb	94	99,49	105,84%
1b-N	Indeks Kualitas Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program	82	100	120%
1c-N	Rata-rata nilai kualitas output monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	91	94,63	103,98%

<i>Customer Perspective (15%)</i>				15,52%
2	Birokrasi dan layanan public yang agile, efektif, dan efisien			103,45%
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan kanwil DJPb	4,64	4,80	103,45%
<i>Internal Process Perspective (30%)</i>				33,66%
3	Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal			108,87%
3a-N	Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
4	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan			105,17%
4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87,5	93,28	106,60%
4b-N	Nilai kinerja pelaksanaan pembinaan dan supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN	8,5	9,38	110,35%
4c-CP	Persentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI	100%	100%	100%
5	Pengelolaan kas yang optimal			120%
5a-N	Persentase akurasi perencanaan kas	82	100	120%
6	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien			107,73%
6a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89	94	105,62%
6b-N	Rata-rata nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN	90	99,53	110,59%
7	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu			110,97%
7a-N	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,1%	100%	101,94%
7b-N	Nilai kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah	79	95,10	120%
<i>Learning and Growth Perspective (30%)</i>				34,1%
8	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi			112,42%
8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	84	94,40	112,38%
8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83	87,07	104,90%
8c-N	Nilai rata-rata hard competency pegawai	78	93,90	120%
9	Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel			108,52%
9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil	95,5%	97,19%	101,77%
9b-N	Nilai Kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W Kanwil DJPb	82	91,7	111,83%
9c-N	Persentase pengelolaan BMN yang optimal	100%	112%	112%
10	Sistem informasi dan teknologi yang andal			120%
10a-N	Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem manajemen Keamanan Informasi	80%	100%	120%
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)				109,76%

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2, realisasi seluruh IKU Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo (20 IKU) telah mencapai target yang telah ditentukan. Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1:

Pengelola perbendaharaan negara yang akuntabel dan produktif

Pengelolaan perbendaharaan artinya Ditjen Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi, sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengelolaan perbendaharaan yang dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan juga untuk mendukung pengelolaan pembiayaan dalam rangka mencukupi kebutuhan kas dalam pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan tugas pengelolaan perbendaharaan negara sebagaimana tersebut di atas wajib dikelola secara akuntabel, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mengidentifikasi 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama:

TABEL 3.3
Capaian IKU pada Sasaran Strategis
Pengelola perbendaharaan negara yang akuntabel dan produktif

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
1a-N	Nilai kualitas LK BUN Tingkat Kanwil DJPb	94	99,49	105,84%
1b-N	Indeks Kualitas Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program	82	100	120%
1c-N	Rata-rata nilai kualitas output monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	91	94,63	103,98%

Uraian IKU tersebut adalah :

1a-N Nilai kualitas LK BUN Tingkat Kanwil

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Kanwil Ditjen Perbendaharaan selaku UAKKBUN-Kanwil melakukan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKKBUN-Kanwil berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU berdasarkan hasil pemrosesan data gabungan dan LK UAKBUN-Daerah seluruh KPPN di wilayah kerjanya.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN menyusun laporan keuangan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

Selanjutnya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN menyusun laporan Keuangan dengan sistematika dan lampiran sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6193/PB/2017 tanggal 17 Juli 2017 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kuasa BUN-Daerah dan Koordinator Kuasa BUN-Kanwil.

LK Kuasa BUN tingkat Kanwil tersebut secara periodik disampaikan kepada Dit. PKN (selaku UAPBUN-AP) dan Dit. APK Ditjen Perbendaharaan.

Untuk mewujudkan kualitas penyusunan LK pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Dit. APK memberikan penilaian terhadap Kualitas LK dimaksud berdasarkan Nota Dinas Direktur APK Nomor ND-11/PB.6/2021 tanggal 6 Januari 2021 hal Kriteria Penilaian Laporan Keuangan Tingkat

UAKBUN-D KPPN dan Laporan Keuangan Tingkat UAKKBUN Kanwil Ditjen Perbendaharaan berdasarkan empat kriteria, yaitu: (1) akurasi data (70%); (2) ketepatan waktu (2%); kelengkapan (3%); dan (4) Tingkat Partisipasi (25%). Penilaian LK unaudited berkontribusi sebesar 70% dan audited sebesar 30%. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Kategori kualitas nilai LK Kuasa BUN tingkat Kanwil adalah sebagai berikut:

Level 4 = 95-100 (Sangat Baik)

Level 3 = 80-94 (Baik)

Level 2 = 65-79 (Cukup)

Level 1 = 0-64 (Kurang)

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat historical report. Artinya, untuk realisasi IKU tahun 2021, merupakan hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN tingkat Kanwil tahun 2020.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) tahunan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan).

Target
tahun 2021

Target IKU tersebut untuk tahun 2021 adalah sebesar 94 sebagaimana ditentukan dalam kontrak kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2021. Target IKU tersebut tidak ditentukan dalam Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perbendaharaan 2020-2024. Sebagai tambahan informasi, IKU ini baru ada di Kemenkeu-Two sejak tahun 2021. Dengan menimbang pergerakan capaian di tahun sebelumnya pada level Kemenkeu-Three, target IKU untuk tahun 2021 masih menantang.

Realisasi
tahun 2021

Realisasi IKU Nilai kualitas LK BUN Tingkat Kanwil DJPb Tahun 2021 adalah 99,49. Nilai tersebut diperoleh pada periode Triwulan IV dari penilaian kantor pusat.

TABEL 3.4

Capaian IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target KK	-	-	-	94	88	<i>Maximize/ Average</i>
Realisasi	-	-	-	99,49	91,50	
Nilai Capaian	-	-	-	105,8	105,8	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.4, realisasi tahunan IKU tersebut sebesar 99,47 telah melampaui target yaitu 94 (dengan nilai capaian 105,8) sesuai yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu- *Two* Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2021.

Untuk diketahui perkembangannya dari tahun ke tahun, capaian IKU tahun 2021 dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya yang tertera pada tabel 3.5.

TABEL 3.5

Perbandingan Capaian IKU Nilai kualitas LK BUN Tingkat Kanwil DJPb

Tahun	Realisasi					Target Tahunan
	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Tahunan	
2021	-	-	-	94	99,49	94
2020	-	-	-	94	99,65	94
2019	-	-	-	94	99,47	94
2018	-	-	-	93	98,77	93
2017	-	-	-	93	97,63	93

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi tahunan IKU Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terus melampaui targetnya. Adapun realisasi dari tahun ke tahun terjadi penurunan disebabkan terdapat penyempurnaan parameter penilaian terhadap perhitungan nilai IKU ini dari tahun ke tahun.

Realisasi IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan Renstra Kanwil dan Renstra DJPb karena memang targetnya tidak ada, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.6.

TABEL 3.6

Perbandingan Capaian IKU Nilai kualitas LK BUN Tingkat Kanwil DJPb Tahun 2021 dengan Renstra

Tahun	Realisasi Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPb	Keterangan
2021	99,49	-	-	<i>mulai 2020 Kanwil tidak menyusun renstra sehingga tidak terdapat target</i>
2020	99,65	-	-	
2019	99,47	-	-	
2018	98,77	-	-	
2017	97,63	-	-	

Meskipun target IKU tercapai, terdapat beberapa isu yang perlu mendapat perhatian karena dianggap membuat capaian IKU tersebut kurang optimal dan menjadi tantangan di antaranya:

1. Penilaian LK UAKKBUN-Kanwil Tahun 2020 mengacu pada ND Direktur APK nomor ND-11/PB.6/2021 tentang Kriteria Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKBUND KPPN dan Laporan Keuangan UAKKBUN Tingkat Kanwil DJPb. Penilaian LK Unaudited berkontribusi sebesar 70% dan Audited sebesar 30%. Hasil penilaian tersebut akan dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Reformulasi unsur penilaian LK UAKKBUN menjadi :
 - a. Akurasi Data (70%) (terdiri Analisis LK 80% dan Nilai CaLK 20%).
 - b. Ketepatan Waktu (2%) su : KPPN masih harus diingatkan dalam penyampaian LK BUN D ke Kanwil
 - c. kelengkapan Dokumen (3%)

- d. Tingkat Partisipasi (25%) Isu : Masih terdapat pengesahan hibah terlambat, Pagu Minus, Jurnal Tidak Lazim.
2. Pada bulan April 2021, saat penyusunan LK UAKKBUN Audited 2020, Bidang PAPP juga menyusun GFS Unaudited 2020, GFS Triwulan I 2021, dan Upload GFS menggunakan SIKRI. Sehingga perlu pembagian waktu pengerjaan.
3. Disamping itu, saat penyusunan LK UAKKBUN Audited 2020, juga masih diikuti dengan permintaan reset BAR dari Satker. KPPN dihadapkan pada kondisi, Penyusunan LKBUN-D mengakomodir seluruh perubahan transaksi (menunggu reset BAR selesai) atau melakukan penerikan data dengan menentukan cut off tanggal tertentu, artinya dalam hal terdapat permintaan reset BAR, perubahan data transaksi menjadi tidak tertuang dalam LKBUN-D.
4. Proses run/permintaan laporan pada Aplikasi SPAN yang dilakukan melewati pukul 07,00 LT tidak dapat dilihat hasilnya pada Hari yang sama. (minimal H+1). Sementara laporan ini diperlukan dalam rangka penyusunan CaLK dan sebagai dokumen pendukung LK UAKKBUN.

Dengan demikian, dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan dalam optimalisasi pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran antara lain:

1. Satker masih harus diingatkan untuk menyelesaikan proses rekonsiliasi sampai final (s.d. status BAR Siap *Download*);
2. Run Data Laporan yang disediakan SPAN tidak dapat dihasilkan pada hari yang sama dengan tanggal penarikan (jika dilakukan setelah jam 07.00 WIT).

Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, antara lain:

Atas Kualitas LK BUN Tk Kanwil Tahun 2020 Kanwil DJPb Prov Gorontalo telah mengirimkan:

1. Laporan Keuangan Tingkat UAKKBUN-Kanwil Tahun 2020 Unaudited melalui ND Nomor ND-171/WPB.29/2021 tanggal 16 Februari 2021 (batas akhir penyampaian adalah tanggal 18 Februari 2021);
2. Laporan Keuangan Tingkat UAKKBUN-Kanwil Tahun 2020 Audited melalui ND Nomor ND-432/WPB.29/2021 tanggal 26 April 2021 (batas akhir penyampaian adalah tanggal 28 April 2021);
3. Pada Minggu III Maret 2021, Bidang PAPP melaksanakan FGD dengan KPPN Marisa terkait Analisa Penyusunan LK BUN-D KPPN.

Atas Kualitas LK BUN Tk Kanwil Tahun 2021 Kanwil DJPb Prov. Gorontalo telah mengirimkan

1. Laporan Keuangan Tk UAKKBUN-Kanwil Semester I Tahun 2021 melalui ND 705/WPB.29 tanggal 22 Juli 2021 (batas penyampaian adalah 26 Juli 2021).
2. Melakukan pembinaan on the spot pada UAKPA/UAPPA-W terkait penyelesaian status

rekonsiliasi, TDK, pagu minus, saldo tidak normal, aset belum diregister, jurnal tidak lazim, selisih TK/TM, dsb.

3. Melakukan pembinaan kepada KPPN Gorontalo dan Marisa secara daring pada tanggal 11 Oktober 2021.
4. Melakukan koordinasi dengan KPPN secara online dalam penyusunan LK BUN dan penyelesaian unsur partisipasi berdasarkan monitoring e-rekon.

Selain itu, terdapat rekomendasi rencana aksi (*action plan*) untuk meningkatkan capaian mendatang IKU tersebut yang dilakukan selama tahun 2021 (penanggung jawab: Bidang PAPK), yaitu dengan:

1. Meningkatkan koordinasi dengan KPPN dan satker UAPPA-W baik secara langsung maupun melalui media daring, khususnya terkait penyusunan LK BUN dan penyelesaian Status BAR, TDK, pagu mi-nus, dsb.

Kantor Wilayah DJPb selaku representasi Kementerian Keuangan di daerah perlu melakukan tindakan terhadap permasalahan pinjaman dan kredit program di daerah agar kewajiban Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Hukum Lainnya kepada Pemerintah dapat dipenuhi.

Tindakan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJPb dimaksudkan untuk menjamin peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pinjaman dan kredit program, peningkatan koordinasi dan kecepatan penyampaian data kewajiban kepada debitur, dan tercapainya pemberian pinjaman dan subsidi secara tepat sasaran.

Untuk mengukur efektivitas tindakan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah tersebut, diperlukan pengukuran kinerja yang dapat mencerminkan kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program. Kualitas pelaksanaan pembinaan diukur dari dua aspek, yaitu kualitas pembinaan itu sendiri serta ketepatan waktu penyusunan laporan.

Kualitas pembinaan dimaksudkan untuk mengetahui kesinambungan antara perencanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program dengan pelaksanaan pembinaan dan monitoring yang berupa :

- a. Pembinaan dan monitoring atas pemberian Pinjaman Pemerintah (RDI/RPD) dan Penerusan Pinjaman
- b. Rekonsiliasi Outstanding pinjaman yang andal dan tepat waktu
- c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kredit Program

Ketepatan waktu laporan dimaksudkan sebagai salah satu alat early warning system (EWS) yang digunakan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi dalam menghadapi permasalahan pinjaman dan kredit program di daerah.

Penilaian IKU bersifat historical report, yaitu untuk Nilai IKU Semester I Tahun 2021 merupakan hasil penilaian laporan Monitoring Evaluasi Penerusan Pinjaman dan Kredit Program Lainnya Semester II Tahun 2020, dan Nilai IKU Semester II Tahun 2021 merupakan hasil penilaian laporan Monitoring Evaluasi Penerusan Pinjaman dan Kredit Program Lainnya Semester I Tahun 2021.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) semesteran, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah rata-rata realisasi setiap periode).

Mekanisme penilaian oleh Kantor Pusat DJPb adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai} = \left\{ \left(\sum \text{Kualitas Pembinaan} \times 80\% \right) + \left(\text{Ketepatan Waktu} \times 20\% \right) \right\}$$
$$\text{Kualitas Pembinaan} = \left\{ (A1 \times 10\%) + (A2 \times 15\%) + (A3 \times 5\%) + (A4 \times 70\%) \right\}$$

A1 = Perencanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program
Perencanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program

100 = Dokumen Perencanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program dibuat sesuai dan tepat waktu dengan kriteria dalam Perdirjen Perbendaharaan No. PER-19/PB/2017

75 = Dokumen Perencanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program dibuat sesuai tetapi tidak tepat waktu dengan kriteria dalam Perdirjen Perbendaharaan No. PER-19/PB/2017

50 = Dokumen Perencanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program tidak dibuat sesuai dengan kriteria dalam Perdirjen Perbendaharaan No. PER-19/PB/2017.

A2 = Pembinaan dan monitoring atas pemberian Pinjaman Pemerintah (RDI/RPD) dan Penerusan Pinjaman

100 = Pembinaan dan Monitoring atas Pemberian Pinjaman Pemerintah (RDI/RPD) dan Penerusan Pinjaman dilakukan satu kali dalam enam bulan dan dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada PER-19/PB/2017

50 = Pembinaan dan Monitoring atas Pemberian Pinjaman Pemerintah (RDI/RPD) dan Penerusan Pinjaman dilakukan satu kali dalam enam bulan dan dilaksanakan tidak sesuai dengan kriteria pada PER-19/PB/2017

0 = Tidak dilakukan Pembinaan dan Monitoring atas Pemberian Pinjaman Pemerintah (RDI/RPD) dan Penerusan Pinjaman

A3 = Rekonsiliasi Outstanding pinjaman yang andal dan tepat waktu

Tepat waktu adalah debitur melakukan rekonsiliasi pinjaman dengan kanwil sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, yaitu paling lambat akhir Juli untuk Semester I dan akhir Januari tahun berikutnya untuk Semester II, atau mengacu pada kebijakan khusus yang ditetapkan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Andal adalah rekonsiliasi dilaksanakan sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Rekonsiliasi sebagai bentuk persetujuan atas kebenaran data. Komponen penghitungan IKU ini berdasarkan jumlah pinjaman yang harus dilakukan rekonsiliasi, bukan berdasarkan jumlah debitur, mengingat satu debitur dapat mempunyai pinjaman lebih dari satu.

$$\left(\frac{\sum \text{Pinjaman yang direkonsiliasi secara tepat waktu dan andal}}{\sum \text{Pinjaman yang seharusnya direkonsiliasi}} \right) \times 100\%$$

A4 = Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kredit Program

100 = Dilakukan satu kali dalam enam bulan dan dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada PER-19/PB/2017

50 = Dilakukan satu kali dalam enam bulan dan dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada PER-19/PB/2017

0 = tidak dilakukan monitoring

Ketepatan waktu penyampaian laporan dihitung berdasarkan ketentuan dalam PER-19/PB/2017

1 hari sd 5 hari sesudah semester berakhir = 100

6 hari sd 10 hari sesudah semester berakhir = 80

11 hari sd 15 hari sesudah semester berakhir = 50

16 hari sd 20 hari sesudah semester berakhir = 25

Diatas 20 hari = 0

Target tahun 2021

Target IKU tersebut untuk tahun 2021 adalah sebesar 82 sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Two* Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2021 baik secara semesteran maupun tahunan.

Realisasi tahun 2021

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2021 adalah 100 yang diperoleh dari penilaian kantor pusat dengan nilai capaian 120 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.7

TABEL 3.7

Capaian IKU *Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program* Tahun 2021

Target/Realisasi	Semester I	Semester II	Tahunan	Pol /KP
Target	82	82	82	<i>Maximize/Average</i>
Realisasi	100	100	100	
Nilai Capaian	120	120	120	

Perbandingan realisasi IKU tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Perbandingan IKU dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat ditunjukkan pada Tabel 3.8

TABEL 3.8

Perbandingan Capaian IKU *Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program* Tahun 2017 s.d. 2021

Target/Realisasi	2021	2020	2019	2018	2017
Target	82	82	78	75	97%
Realisasi	100	98	100	91	N/A

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.8, dapat dikatakan bahwa IKU tersebut memiliki capaian baik dan berhasil memenuhi target yang ditetapkan pada Kontrak Kinerja Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo di tahun masing-masing.

Realisasi IKU ini pada tahun 2017 ditargetkan dalam Renstra Kanwil DJPb Tahun 2015-2019 dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.9

Perbandingan Realisasi s.d. 2021 dengan Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dan Renstra DJPb

TABEL 3.9

Perbandingan Realisasi IKU *Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program* s.d 2021 dengan Renstra

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPB	Keterangan
2021	100			mulai tahun 2020 Kanwil tidak menyusun Renstra
2020	98	-	-	
2019	100	-	-	
2018	91	-	-	
2017	N/A	97%	-	

Meskipun target IKU tercapai, pada pelaksanaannya selama satu tahun ditemukan isu sebagai berikut :

1. Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo perlu meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan penyalur dan debitur, serta koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait penyaluran kredit program.

2. Pandemi Covid 19 membuat site visit ke debitur tidak mungkin dilakukan.

Dengan demikian, dapat diidentifikasi akar permasalahan dalam optimalisasi pencapaian kinerja tersebut antara lain:

1. Pihak bank tidak melakukan update kredit outstanding, sehingga beberapa debitur yang sudah lunas masih terdapat kredit di SIKP
2. Bimbingan Teknis aplikasi SIKP kepada operator SIKP di Pemda tidak bisa dilaksanakan karena adanya pandemi meskipun sudah direncanakan.
3. Penetapan penerima subsidi UMKM dalam rangka PEN terkait kredit program ditentukan oleh penyalur, sementara data tsb tidak dapat diperoleh di aplikasi SIKP
4. Kegiatan kerjasama Pembiayaan Umi antara Bone Bolango dan Pegadaian mengalami kendala penyaluran selama semester I 2020 akibat pandemic COVID-19, sehingga dana tersalur per Mei 2020 belum mencapai 100%
5. Pinjaman daeran (RDI/RPD) dan penerusan pinjaman di Provinsi Gorontalo tidka/belum ada.
6. Adanya perubahan metode survei kredit program, yang sebelumnya secara langsung, berubah menjadi via telfon

Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, antara lain:

1. Telah melakukan Koordinasi dan Evaluasi penyelenggaraan Kredit Program dengan pihak penyalur di wilayah Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Pohuwato dan pemerintah daerah setempat terkait aplikasi SIKP user Pemda.
2. Telah menjalin komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan pihak Penyalur.
3. Telah melakukan penyusunan laporan sesuai dengan Timeline yang ada dan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, terdapat rekomendasi rencana aksi (*action plan*) untuk meningkatkan capaian mendatang IKU tersebut yang dilakukan selama tahun 2021 (penanggung jawab: Bidang PPA II), yaitu dengan:

1. Melakukan Koordinasi dan Evaluasi penyelenggaraan Kredit Program dengan KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa serta pemerintah daerah setempat.
2. Menjaln komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan pihak Penyalur.
3. Melakukan penyusunan laporan sesuai dengan Timeline dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 bahwasanya Kanwil DJPb berkewajiban menyusun Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) dan Kajian Fiskal Regional (KFR). Penyusunan RPA bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan anggaran dari level satuan kerja sampai K/L, menghasilkan rekomendasi kebijakan mekanisme pelaksanaan anggaran, serta menilai apakah belanja pemerintah telah memenuhi tujuan, efisien, efektif dan berbagai indikator lain yang mewakili kinerja atau kualitas. Sedangkan dalam rangka menjadi representasi Kementerian Keuangan di daerah sebagai pengelola fiskal, Kanwil DJPb diharapkan dapat memiliki data, informasi dan kemampuan untuk menganalisis dan menyajikan laporan kajian fiskal tingkat wilayah (regional).

Sesuai ketentuan SE- 28/PB/2015, laporan RPA tingkat wilayah disusun oleh Kanwil DJPb secara periodik (semesteran) dan disampaikan kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Untuk mewujudkan kualitas penyusunan Laporan reviu pelaksanaan anggaran pada Kanwil DJPb, Kantor Pusat DJPb memberikan penilaian dan penghargaan atas kesungguhan dan upaya nyata Kanwil DJPb dalam menyelesaikan dan meningkatkan kualitas Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran Tingkat Wilayah. Terdapat beberapa parameter/aspek yang digunakan dalam penilaian RPA, meliputi: kesesuaian tujuan, ruang lingkup, dan objek reviu RPA; Alur pikir/flow; kualitas analisis dan inovasi; ketajaman rekomendasi; analisis aspek khusus; format review/sistematika; penyajian dashboard; ketepatan waktu; dan desain/layout.

Sedangkan sesuai ketentuan SE- 61/PB/2017, setiap Kanwil DJPb menyusun Laporan Kajian Fiskal Regional (KFR) secara periodik (triwulanan) dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kantor Pusat DJPb. Untuk mewujudkan kualitas penyusunan Kajian Fiskal Regional pada Kanwil DJPb, Kantor Pusat DJPb memberikan penilaian dan penghargaan atas kesungguhan dan upaya nyata kanwil dalam menyelesaikan dan meningkatkan kualitas Kajian Fiskal Tingkat Wilayah. Penilaian KFR dilakukan secara Semesteran. Terdapat beberapa parameter/aspek yang digunakan dalam penilaian KFR, meliputi: ketepatan waktu penyampaian laporan; kesesuaian dengan petunjuk dan contoh penyajian sebagaimana diatur dalam SE; kelengkapan, relevansi dan kualitas data; kualitas analisis; teknik penyajian dan estetika, serta kemanfaatan laporan.

Kategori kualitas nilai Reviu Pelaksanaan Anggaran dan Kajian Fiskal Regional Kanwil DJPb adalah sebagai berikut:

Level 5 = 91-100 (Excellent)

Level 4 = 75-90 (Good)

Level 3 = 61-74 (Fair)

Level 2 = 41-60 (Poor)

Level 1 = 0-40 (Unqualified)

Pengisian realisasi disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan yang bersifat historical report. Artinya, untuk realisasi IKU semester I tahun 2021 merupakan hasil penilaian Laporan RPA semester II tahun 2020 dan Laporan KFR tahunan 2020, sedangkan untuk realisasi IKU semester II tahun 2021 merupakan hasil penilaian Laporan RPA semester I tahun 2021 dan Laporan KFR semester I tahun 2021.

Target tahun 2021

Target IKU tersebut untuk tahun 2021 adalah sebesar 91 sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Two* Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2021. IKU ini merupakan IKU yang baru di tahun 2021 sehingga tergetnya tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Realisasi tahun 2021

Realisasi IKU Rata-rata nilai kualitas output monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun 2021 adalah 94,63 diperoleh dari rata-rata nilai RPA dan KFR yang masing-masing ditetapkan oleh Kantor Pusat.

Dengan demikian realisasi IKU tersebut telah memenuhi target yang ditentukan dalam kontrak kinerja tahun 2021 sebagaimana ditunjukkan capaiannya pada Tabel 3.10.

TABEL 3.10

Capaian IKU *Rata-rata nilai kualitas output monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran* tahun 2021

Target/ Realisasi	Semester I	Semester II	Tahunan	Pol /KP
Target	91	91	91	Maximize/ Take Last Known
Realisasi	94,37	94,87	94,63	
Nilai	103,70	104,25	103,99	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.10, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 94,63 tersebut melampaui target IKU sebesar 91 (dengan nilai capaian 103,99) yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Two* Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2021.

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2021 dan tahun sebelumnya

IKU ini belum dapat dibandingkan capaiannya dari tahun ke tahun karena merupakan IKU baru di tahun 2021, meskipun dalam pelaksanaannya dijalankan tuis yang sama dengan tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.11.

TABEL 3.11

Perbandingan Capaian IKU *Rata-rata nilai kualitas output monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran* Tahun 2017 s.d. 2021

Tahun	Realisasi	Target
2021	94,63	91
2020	-	-
2019	-	-
2018	-	-
2017	-	-

Namun demikian, capaian IKU di tahun 2021 (sebesar 94,63) diharapkan dapat menjadi pemacu peningkatan capaian di tahun berikutnya.

Perbandingan Realisasi s.d. 2021 dengan Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dan Renstra DJPb

Karena merupakan IKU baru, capaian IKU tersebut juga belum bisa dibandingkan dengan Renstra Kanwil dan Renstra DJPb sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.12.

TABEL 3.12

Perbandingan Realisasi IKU *Rata-rata nilai kualitas output monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran* s.d. 2020 dengan Renstra

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPB	Keterangan
2021	94,63	-	-	<i>mulai Tahun 2020 Kanwil tidak menyusun Renstra sehingga tidak ada target</i>
2020	-	-	-	
2019	-	-	-	
2018	-	-	-	
2017	-	-	-	

Isu utama dalam pencapaian IKU tersebut adalah :

Merupakan IKU baru dengan formulasi rata-rata nilai Laporan RPA yang disusun oleh Bidang PPA I dan Laporan KFR yang disusun oleh Bidang PPA II.

Isu yang dialami oleh Bidang PPA I dalam penyusunan Laporan RPA adalah :

1. Poin penjelasan sesuai arahan dalam Juknis RPA banyak dan cukup detil menyebabkan ruang penjelasan menjadi cukup padat sehingga ruang untuk penjelasan inovasi /analisis menjadi kurang maksimal dalam penyusunan RPA akibatnya adalah mempengaruhi pada penambahan jumlah halaman dari yang telah ditetapkan
2. Desain RPA kurang maksimal.

Sedangkan isu yang dialami oleh Bidang PPA II dalam penyusunan Laporan KFR adalah :

1. Beberapa indikator penilaian menghasilkan nilai yang tidak optimal, yaitu : Aktifitas Kemanfaatan (9,04) dan Dashboard, Design dan Layout (4,68).

Dengan demikian, dapat disimpulkan akar permasalahan dalam pencapaian IKU tersebut, yaitu:

1. Analisis dan penyajian data yang termuat pada Juknis RPA cukup banyak sehingga terdapat keterbatasan untuk menjelaskan inovasi pada detil pembahasan sehingga berpengaruh pada penilaian
2. Kebutuhan data dari unit eksternal yang harus dicantumkan pada RPA juga mempengaruhi kualitas pendalaman analisis karena data yang dikumpulkan kurang maksimal
3. Keterbatasan waktu dan sumber daya dalam desain menyebabkan laporan kurang maksimal dalam hal estetika
4. Kegiatan aktivitas kemanfaatan kurang komprehensif
5. Dashboard dan Layout kurang menarik.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, yaitu:

1. In house training desain grafis
2. Koordinasi intensif dengan pihak stakeholder untuk percepatan penyediaan data yang dibutuhkan
3. Melakukan evaluasi terhadap hasil KFR yang tertuang pada ND-10/PB/PB.2/2021
4. Mencari referensi dashboard dan layout dari Kanwil lain untuk dapat dijadikan referensi
5. Memperkaya bahan bacaan mengenai isu terkini untuk meningkatkan kualitas literasi para pegawai agar dapat memperbaiki kualitas KFR.
6. Mempelajari berbagai kebijakan pemerintah dan laporan berkala yang dikeluarkan lembaga dan jurnal akademik untuk menambah referensi dan kedalaman analisis KFR.

Rekomendasi Rencana Aksi (*action plan*) yang dilakukan pada tahun 2021 untuk meningkatkan pencapaian IKU tersebut (penanggung jawab: Bidang PPA I dan PPA II), yaitu dengan:

1. Meningkatkan kemampuan analisis pegawai dengan cara FGD maupun mengikuti diklat dan bimtek
2. Melaksanakan identifikasi permasalahan pelaksanaan anggaran secara lebih rinci, sehingga masih tersedia cukup waktu untuk konfirmasi dan mendalaminya
3. Melaksanakan SE tentang juknis penyusunan RPA dan guideline penyusunan RPA
4. Mempelajari metode penelitian terbaru, diskusi dengan kanwil lain atau juga mempelajari laporan RPA kanwil lain yang lebih baik
5. Mempelajari desain grafis untuk membantu menyelesaikan desain oleh petugas desain
6. Koordinasi secara intensif dengan unit pemilik data sehingga data dapat dengan cepat diterima dan segera dilakukan analisis

Sasaran Strategis 2:
Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Sebagaimana undang undang tentang Pelayanan Publik, setiap institusi penyelenggara negara dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai peraturan atas barang/jasa/pelayanan administraf yang disediakan oleh penyelenggara negara. Dalam rangka mendapatkan penyelenggara negara yang mampu melayani masyarakat dan mampu meletakkan pondasi yang diperlukan bangsa untuk memenangkan persaingan global, diperlukan birokrasi yang agile, efisien, dan efektif, yaitu yang fleksibel, lincah dan cepat dalam merespon perubahan, serta mampu menggunakan sumber daya yang tersedia dengan seminimal mungkin untuk mendapatkan target/output yang telah ditetapkan secara optimal. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mengidentifikasi 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.13.

TABEL 3.13
Capaian IKU pada SasaranStrategis
Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, efisien

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil	4,66	4,80	103

2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil merupakan salah satu IKU *Kemenkeu-Two* Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tahun 2021. IKU ini disusun untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo. IKU ini merupakan nilai kepuasan pengguna layanan atas layanan unggulan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo terhadap pihak eksternal. Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil adalah rata-rata tingkat kepuasan satker terhadap layanan revisi DIPA yang diberikan oleh Kanwil. Indeks kepuasan satker diukur melalui survei oleh masing-masing Kanwil dengan metode sampling kepada responden terpilih dari seluruh mitra kerja yang dilayani oleh Bidang PPA I. Indeks Pengukuran menggunakan skala 1-5 yaitu 5 = Sangat Puas; 4 = Puas; 3 = Cukup Puas; 2 = Kurang Puas; 1 = Tidak Puas. Perhitungan polarisasi data menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Target tahun 2021

Target IKU tersebut untuk tahun 2021 adalah sebesar 4,66 dengan periode pelaporan tahunan. Target tersebut meningkat dari tahun 2020 sebesar 4,55.

Realisasi tahun 2021

Rincian skor indeks untuk aspek layanan revisi DIPA serta sarana dan prasarana yang diteliti dalam hasil survei tersebut pada tahun 2021 ditunjukkan pada Tabel 3.14

TABEL 3.14
Rincian Skor Indeks Kepuasan atas Layanan Tahun 2021

No	Aspek Layanan	Indeks
1	Kinerja Layanan Revisi Dokumen Anggaran	4,81
2	Sarana dan Prasarana	4,78
Indeks Kepuasan Masyarakat		0,96 (sangat puas)

*tidak terdapat biaya untuk memperoleh layanan pada Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, melalui survei kepuasan pengguna layanan tersebut dapat diketahui bahwa target IKU *Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil* tahun 2021 dapat dipenuhi dengan capaian ditunjukkan pada Tabel 3.15.

TABEL 3.15
Capaian IKU *Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil*

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	-	4,66	-	-	4,66	<i>Maximize / TLK</i>
Realisasi	-	4,80	-	-	4,80	
Nilai capaian	-	103	-	-	103	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.15, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 4,80 tersebut (yang diperoleh pada triwulan II) melampaui target IKU sebesar 4,66 (dengan nilai capaian 103) yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2021.

Secara berturut-turut capaian IKU tersebut tahun 2017 s.d. 2021 yaitu : 4.45, 4.69, 4.74, 4,76, dan 4,80. Sehingga dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan capaian IKU setiap tahunnya sejak tahun 2017 s.d tahun 2021. Perbandingan target dan realisasi IKU tersebut untuk tahun 2017 s.d 2021 dapat ditunjukkan pada Tabel 3.16.

TABEL 3.16

Perbandingan Capaian IKU *Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil* Tahun 2017 s.d. 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Target	4.09	4.52	4,53	4,55	4,66
Indeks Realisasi	4,45	4,69	4,74	4,76	4,80

Dari tabel 3.16, dapat diketahui bahwa realisasi capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada tahun 2017 s.d. 2021 mengalami kenaikan secara berturut-turut dan yang tertinggi berada di tahun 2021 dengan perolehan nilai 4,80.

Realisasi IKU pada tahun 2017 s.d. 2021 mencerminkan realisasi dari Renstra DJPb Tahun 2015-2019 dan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.17.

Tabel 3.17

Perbandingan Realisasi IKU *Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil* dengan Renstra 2015-2020

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPb	Keterangan
2021	4,80	-	4,05	<i>mulai Tahun 2020 Kanwil tidak menyusun Renstra sehingga tidak ada target</i>
2020	4,76	-	4	
2019	4,74	4,18	4,15	
2018	4,69	4,15	4,12	
2017	4,45	4,12	4,09	

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2020 dan tahun sebelumnya

Perbandingan Realisasi s.d. 2021 dengan Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dan Renstra DJPb

Isu utama terkait pencapaian IKU tersebut pada tahun 2021 adalah:

1. Pelayanan yang diberikan oleh Bidang PPA I khususnya revisi anggaran akan terus ditingkatkan demi memperoleh hasil terbaik dan dapat memenuhi standart kualitas layanan bermutu dan baik ke pihak masyarakat mau-pun Satker pada khususnya. Pemberian layanan yang baik kepada satker dan juga penyelesaian proses revisi akan mempengaruhi dari kecepatan dan penyelesaian revisi sehingga akan berimbas pada indeks kepuasan satker.
2. Pelayanan yang diberikan oleh Bagian Umum khususnya terkait sarana dan prasarana dan lingkungan pelayanan. Pada saat pandemi layanan kebanyakan dilakukan secara online sehingga mempengaruhi nilai survei atas layanan sarpras.

Dengan demikian dapat diidentifikasi akar permasalahannya pada tahun 2021 adalah:

1. Permasalahan pada sistem aplikasi dan juga peraturan revisi yang kurang simple turut mempengaruhi pada indeks kepuasan satker.
2. Penentuan Responden Kuesioner mengingat masa pandemi kegiatan layanan kebanyakan dilakukan melalui online

Tindakan yang telah dilaksanakan terkait pencapaian IKU tersebut adalah:

1. Bidang PPA I seringkali mengadakan mini GKM untuk meningkatkan pengetahuan para pegawai dan pelayanan yang diberikan.
2. Membuat forum komunikasi informasi dengan bidang PA I di Kanwil lain untuk menanyakan permasalahan dan menyamakan persepsi pelaksanaan aturan.
3. Koordinasi dan komunikasi secara efektif dengan seluruh stakeholder, aktif melakukan pembinaan baik melalui wag, sosialisasi ZOOM dan lainnya agar tidak mempengaruhi kualitas layanan ke satker selama menghadapi pandemi wabah covid. Kanwil DJPb Gorontalo juga telah melaksanakan peningkatan mutu layanan melalui diklat service excellent dengan pihak perbankan .
4. Pemenuhan sarana prasarana ruang front office sesuai dengan protokol kesehatan layanan tatap muka.

Adapun secara umum rekomendasi rencana aksi Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo pada tahun 2021 dalam upaya meningkatkan Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil (Penanggung Jawab : Bidang PPA I dan Bagian Umum) adalah :

1. Terus menerapkan service excellent, menerapkan SOP yang ada secara baik dan terus menjalin kerjasama dan hubungan yang baik dengan satker agar hubungan dengan satker terjalin baik.
2. Meningkatkan fasilitas sarana prasarana dalam mendukung layanan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, sesuai dengan perkembangan kebijakan standar layanan teruma terkait sarana dan prasaran layanan secara daring.

Sasaran Strategis 3: Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel

Regulasi adalah peraturan yang disusun sebagai dasar dan arah dalam pengelolaan perbendaharaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Otorisasi adalah segala ketetapan yang dibuat oleh Kanwil DJPb dalam rangka pengelolaan perbendaharaan. Kredibel adalah dapat dipercaya yang mengandung maksud bahwa kebijakan bidang pengelolaan perbendaharaan merupakan kebijakan yang sistematis, efisien, efektif dan akuntabel dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel mengandung makna bahwa perumusan peraturan yang menjadi dasar dan arah dalam pengelolaan perbendaharaan serta segala ketetapan yang dihasilkan untuk mencapai tujuan sudah sesuai untuk menghasilkan output/outcome yang diharapkan serta merupakan kebijakan yang sistematis, efisien, efektif dan akuntabel.

TABEL 3.18
Capaian IKU pada Sasaran Strategi
Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
3a-N	Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

3a-N Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu

Revisi dokumen pelaksanaan anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN dan disahkan dalam DIPA. Berdasarkan PMK 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun 2021 pasal 27, untuk usulan revisi anggaran yang dapat ditetapkan, Kepala Kantor Wilayah DJPb menetapkan surat pengesahan revisi anggaran, paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima dengan lengkap, serta notifikasi dari sistem tercetak. Dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\sum \text{revisi DIPA yang diselesaikan tepat waktu}}{\sum \text{Usulan pengesahan revisi DIPA yang diterima dari satker}} \times 100\%$$

Dalam perhitungan IKU tersebut, digunakan polarisasi data maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan average (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan).

Target tahun 2021

Target IKU tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2021 adalah sebesar 100%, baik untuk target IKU tahunan maupun triwulanan. Target tersebut sama dengan target tahun 2020 (sebesar 100%).

Realisasi tahun 2021

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2021 adalah 100% yang diperoleh dari rata-rata Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.19.

TABEL 3.19

Capaian IKU *Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu* Tahun 2021

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	Maximize/ Average
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	
Nilai Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	

Perbandingan IKU dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat ditunjukkan pada Tabel 3.20.

Tabel 3.20

Perbandingan Capaian IKU *Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu* Tahun 2016 s.d. 2021

Target/Realisasi	2021	2020	2019	2018	2017
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%

Realisasi IKU pada tahun 2017 s.d. 2021 mencerminkan realisasi dari Rencana Strategis (Renstra) Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019 sedangkan tahun 2020 Kanwil tidak menyusun Renstra sehingga tidak ada target sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.21.

TABEL 3.21

Perbandingan Realisasi IKU *Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu* s.d 2021 dengan Renstra.

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPB	Keterangan
2021	100%	-	-	<i>mulai Tahun 2020 Kanwil tidak menyusun Renstra sehingga tidak ada target</i>
2020	100%	-	-	
2019	100%	100%	-	
2018	100%	100%	-	
2017	100%	100%	-	

Isu utama yang terjadi dalam pencapaian IKU tersebut antara lain adalah :

1. Keterlambatan proses penyelesaian revisi, dapat dimungkinkan terjadi jika ADK yang dikirimkan dalam aplikasi SatuDJA gagal diupload di Aplikasi CW SPAN.
2. Maintenance aplikasi SPAN dan nadine yang tidak dapat diprediksi dapat berimbas pada keterlambatan proses pengesahan DIPA.
3. Perubahan proses bisnis penyampaian usulan revisi secara online..

Akar permasalahan pencapaian IKU yang dapat disimpulkan dalam hal ini adalah :

1. Kurangnya pengetahuan SDM Satker sehingga menyebabkan kesalahan proses create ADK pada aplikasi SAKTI
2. Maintenance server dan data base pada Nadine dan juga CW SPAN
3. Aplikasi sering terkunci yang disebabkan lupa dilakukan log out oleh pegawai setelah

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2021 dan tahun sebelumnya

Perbandingan Realisasi s.d. 2021 dengan Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dan Renstra DJPb

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

mengakses aplikasi CW SPAN

4. Proses bisnis penyampaian usulan revisi secara online menyebabkan jam layanan menjadi tidak terbatas.
5. Tidak adanya notifikasi pada aplikasi penyampaian usulan revisi

Tindakan yang telah dilakukan untuk mengatasi IKU tersebut di antaranya :

1. Dilakukan broadcast message pada grup pengelolaan satker lingkup Kanwil DJPb Prov Gorontalo;
2. Melakukan pendampingan penggunaan aplikasi SAKTI
3. Konsultasi dengan Puslay DJA, PA dan juga Pengembang Nadine.

Adapun rekomendasi rencana aksi yang telah dilakukan selama tahun 2021 adalah:

1. Melakukan broadcast ke satker agar memperhatikan batas-batas pengajuan revisi
2. Melakukan komunikasi yang baik dengan satker dan memberikan layanan yang prima dalam memproses dokumen revisi satker
3. Aktif berkoordinasi dengan puslay DJA, Dit.PA terkait adanya permasalahan dalam memproses revisi satker

Sasaran
Strategis 4:

Komunikasi,
edukasi, dan
standardisasi
yang
berkesinambungan

Komunikasi dan edukasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman stakeholders atas peraturan dan kebijakan di bidang perbendaharaan untuk memperkuat implementasi peraturan dan kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya tujuan organisasi.

Standardisasi bertujuan untuk mewujudkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola perbendaharaan melalui peningkatan kompetensi pengelola perbendaharaan berdasarkan kualifikasi kompetensi yang dipersyaratkan dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan APBN yang semakin berkualitas di seluruh Kementerian/Lembaga sehingga dapat menghasilkan output dan outcome yang maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Standardisasi pengelola perbendaharaan dimaksud dilaksanakan melalui program pengembangan kapasitas, uji kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan profesi jabatan fungsional di bidang perbendaharaan. Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan tata kelola keuangan yang bersifat dinamis, dibutuhkan strategi komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang kontinu, tidak tambal sulam serta berorientasi pada usaha membuat satker mampu menguasai secara menyeluruh aspek filosofi sampai dengan aspek teknis pengelolaan perbendaharaan. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mengidentifikasi 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.22

TABEL 3.22

Capaian IKU pada Sasaran Strategis

Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87,5	93	106,90%
4b-N	Nilai kinerja pelaksanaan pembinaan dan supervisi Kanwil	90	97,78	108,64%
4c-CP	Persentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI	100%	100%	100%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

Tingkat pemahaman stakeholders merupakan tingkat daya tangkap peserta (stakeholders) terhadap segala materi yang diberikan pada pelatihan teknis (bimtek atau yang dipersamakan dengan itu). Tolok ukur hasil pelatihan teknis didasarkan pada peningkatan pemahaman peserta atas materi yang diberikan dalam pelatihan untuk satu periode. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh Kanwil DJPb.

Untuk bimtek diukur dengan rata-rata hasil post test sedangkan untuk sosialisasi diukur dengan hasil kuesioner. Jika pada satu periode pelaporan (satu semesteran) terdapat kegiatan bimtek dan kegiatan sosialisasi, maka total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi pada periode tersebut dibobot dengan formula sebagai berikut:

Capaian = hasil post test 60% + hasil kuesioner 40%

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi bertujuan untuk

4a-N Indeks
efektivitas
edukasi dan
komunikasi

mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan pembinaan teknis perbendaharaan.

Formula perhitungan IKU tersebut adalah rata-rata Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi, dengan pembagian nilai seperti di bawah ini :

$0 < x \leq 20$ = sangat tidak efektif; $20 < x \leq 40$ = tidak efektif $40 < x \leq 60$ = kurang efektif; $60 < x \leq 80$ = efektif; $80 < x \leq 100$ = sangat efektif

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (trajectory) semesteran, dan jenis konsolidasi periode menggunakan average (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan).

Target IKU Tahun 2021

Target IKU tersebut sebagaimana terdapat pada Kontrak Kinerja Tahun 2021 adalah 87,5. Target lebih tinggi dari periode sebelumnya yaitu 87.

Realisasi IKU Tahun 2021

Realisasi Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi tahun 2021 adalah 93,28. Capaian ini diperoleh dari rata-rata semester I dan semester II. Perhitungan IKU tersebut dapat ditunjukkan pada Tabel 3.23.

TABEL 3.23

Perhitungan IKU *Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi* tahun 2021

Target/Realisasi	Semester I	Semester II	Tahunan	Pol /KP
Target	87,5	87,5	87,5	<i>Maximize/Average</i>
Realisasi	92,04	94,51	93,28	
Nilai Capaian	105,18	108,01	106,60	

Dengan demikian, realisasi IKU tersebut telah memenuhi target pada tahun 2021, yaitu sebesar 93,28 dengan nilai capaian 106,60. Perbandingan IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi tahun 2017 s.d. 2021 dapat ditunjukkan pada Tabel 3.24

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2021 dan tahun sebelumnya

TABEL 3.24

Perbandingan Capaian IKU *Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi* tahun 2017 s.d. 2021

Target/Realisasi	2021	2020	2019	2018	2017
Target	87,5	87	86	85	84
Realisasi	93,28	93	91,66	87,36	86,6

Tidak ada target untuk IKU ini pada Renstra Kanwil maupun Renstra DJPb baik 2015-2019 maupun 2020-2024 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.25.

Perbandingan Realisasi s.d. 2021 dengan Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dan Renstra DJPb

TABEL 3.25

Perbandingan Realisasi IKU *Rata-rata nilai kinerja KPPN* sebagaimana hasil pembinaan dan supervisi Kanwil dengan Renstra

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPB	Keterangan
2021	93,28	-	-	<i>tidak terdapat penargetan IKU tersebut pada Renstra DjPb Tahun 2015-2019 dan Tahun 2020 Kanwil tidak menyusun Renstra sehingga tidak ada target</i>
2020	93	-	-	
2019	91,66	-	-	
2018	87,36	-	-	
2017	86,6	-	-	

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Isu utama dalam pencapaian IKU tersebut adalah :

1. Pelaksanaan kegiatan meeting online belum secara maksimal menjaring satker untuk mengisi kuisoner. Banyak-nya permintaan survei sejenis membuat satker enggan untuk mengisi kuisoner dan kanwil harus seringkali mengingatkan satker agar cepat mengisi kuisoner yg disampaikan Kanwil
2. Di masa pandemic COVID-19 penyelenggaraan bimtek secara offline menjadi dibatasi dan diutamakan dil-aksanakan secara online/daring. Jika terpaksa dilakukan secara hybrid maka dilakukan pembatasan jumlah pe-serta yang hadir secara offline. Bagi peserta online/daring sering kali kurang memperhatikan materi yang disam-paikan oleh narasumber sehingga pada saat ada posttest nilainya tidak optimal.
3. Beberapa peserta sosialisasi/bimtek (terutama yang mengikuti secara daring/online) tidak berkenan (malas) men-gisi kuesioner/posttest karena dianggap tidak penting.
4. Dalam rangka menjamin terlaksananya kondisi pelayanan prima kepada masyarakat dan terwujudnya pengel-olaan keuangan negara yang profesional, perlu melakukan bimbingan teknis TIK kepada para pegawai pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara secara berkala

Akar permasalahan dalam hal ini yaitu:

1. Kejenuhan satker untuk mengisi Survei yang disebabkan banyaknya permintaan survei baik dari Kanwil ataupun dari KPPN.
2. Peserta sosialisasi/FGD kurang memahami pentingnya hasil penilaian kuesioner (dianggap tidak penting).
3. Kompetensi dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dari keseluruhan pegawai KPPN lingkup Provinsi Gorontalo merupakan faktor kunci dalam menghasilkan output pekerjaan dan layanan yang optimal.
4. Pesatnya perkembangan teknologi informasi juga memunculkan risiko-risiko baru pada keamanan informasi.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut, yaitu:

1. Menyebarkan survei ke satker
2. Aktif menghubungi satker untuk segera mengisi survei.
3. Bidang PPAK telah melaksanakan bimtek/sosialisasi pada bulan Juli, Oktober, dan November.
4. Kegiatan monitoring TIK dan Internalisasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) kepada para pegawai Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa pada tanggal 19 Mei 2021 (Semester I) dan 19 Oktober 2021 (Semester II).
5. Melakukan evaluasi atas setiap kegiatan yang telah dilaksanakan
6. Menggunakan hasil kuesioner sebagai salah satu masukan penyelenggaraan kegiatan selanjutnya

Rekomendasi rencana aksi yang dilakukan pada tahun 2020 (penanggung jawab: Bidang PPA I, PPAK dan SKKI), yaitu :

1. Untuk pelaksanaan kegiatan dengan memberikan treatment yang agak berbeda dalam kegiatan sosialisasi ke satker, seperti dengan pola pemberian materi yang agak rileks dan menggunakan sarana komunikasi sosial media untuk menyebarluaskan peraturan maupun membentuk forum-forum diskusi untuk membantu permasalahan satker.
2. Memberikan hadiah/ cinderamata agar satker cepat mengisi kuissoner/survei dari Kanwil
3. Melakukan monitoring secara berkala hasil survei dan menghubungi satker yang masih belum mengisi survei

Sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, setiap Kantor Wilayah DJPb wajib melakukan pembinaan dan supervisi pada KPPN di lingkup wilayah kerjanya secara periodik 2 (dua) kali dalam setahun.

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan dan kepuasan masyarakat, Kanwil melalui tim Pembinaan dan Supervisi KPPN melakukan penilaian dan mapping kinerja KPPN di lingkup wilayah kerjanya berdasarkan indikator-indikator pada setiap komponen berikut:

1. Efektivitas & Akuntabilitas Pelaksanaan APBN
2. Pengelolaan Perbendaharaan Negara
3. Representasi Kementerian Keuangan Di Daerah
4. Tugas Khusus Perbendaharaan Lainnya (Special Mission)
5. Tata Kelola Internal
6. Inovasi Dan Prestasi

Selanjutnya, paling lambat 31 Juli tahun berkenaan dan 31 Januari tahun berikutnya, Kepala Kanwil DJPb menyampaikan Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Berdasarkan laporan tersebut, Sekretariat DJPb melakukan penilaian atas Laporan Kinerja KPPN lingkup Kantor Wilayah DJPb.

Pengisian realisasi IKU bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU semester I tahun 2021 merupakan hasil pembinaan semester II tahun 2020. Sedangkan realisasi IKU Semester II tahun 2021 merupakan rata-rata hasil pembinaan semester I tahun 2021.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kerjanya), periode pelaporan (trajectory) semesteran, dan jenis konsolidasi periode menggunakan average (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan).

**Target IKU
Tahun 2021**

Target IKU tersebut untuk tahun 2021 adalah sebesar 8,5 sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*TWO* Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2021. Target tersebut lebih tinggi dari target tahun sebelumnya namun dengan formula dan wording yang berbeda yaitu Rata-rata nilai kinerja KPPN sebagaimana hasil pembinaan dan supervisi Kanwil.

**Realisasi IKU
Tahun 2021**

Realisasi IKU Nilai kinerja pelaksanaan pembinaan dan supervisi Kanwil tahun 2021 adalah 9,38. Capaian ini diperoleh dari rata-rata nilai kantor pusat dan nilai kedua KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo. Perhitungan IKU tersebut dapat ditunjukkan pada Tabel 3.26

TABEL 3.26

Capaian IKU *Nilai kinerja pelaksanaan pembinaan dan supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN Tahun 2021*

Target/Realisasi	Smt I	Smt II	Tahunan	Pol /KP
Target	8,5	8,5	87	<i>Maximize/ Average</i>
Realisasi	9,4	9,34	9,38	
Nilai Capaian	110,82	109,88	109,07	

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2021 dan tahun sebelumnya

Realisasi IKU *Nilai kinerja pelaksanaan pembinaan dan supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN* pada tahun 2021 belum dapat dibandingkan dengan capaian sebelumnya karena formula dan wording yang digunakan berbeda sebagaimana ditunjukkan pada table 3.27

TABEL 3.27

Perbandingan Capaian IKU *Nilai kinerja pelaksanaan pembinaan dan supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN* tahun 2017 s.d. tahun 2021

Target/Realisasi	2021	2020	2019	2018	2017
Target	8,5	90	88	90	85
Realisasi	9,34	97,78	96,77	97,36	96,49

Perbandingan Realisasi s.d. 2021 dengan Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dan Renstra DJPb

Realisasi IKU pada tahun 2017 s.d. 2021 mencerminkan realisasi dari Rencana Strategis (Renstra) Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019 sedangkan tahun 2020 Kanwil tidak menyusun Renstra sehingga tidak ada target sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.28.

TABEL 3.28

Perbandingan Realisasi IKU *Nilai kinerja pelaksanaan pembinaan dan supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN* dengan Renstra

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPB	Keterangan
2021	9,34	-	-	<i>tidak terdapat penargetan IKU tersebut pada Renstra DJPb Tahun 2015-2019 dan Tahun 2020 Kanwil tidak menyusun Renstra sehingga tidak ada target</i>
2020	97,78	-	-	
2019	96,77	75	-	
2018	97,36	75	-	
2017	96,49	75	-	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.28, nilai realisasi tahunan IKU untuk tahun 2017 s.d. 2019 tersebut telah memenuhi target tahunan yang ditetapkan dalam Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019

Meskipun telah memenuhi target yang telah ditentukan untuk tahun 2021, terdapat beberapa isu yang perlu mendapatkan perhatian yaitu:

1. Mulai Semester II Tahun 2020, pembinaan dan supervisi mempedomani Perdirjen Perbendaharaan No. PER-24/PB/2019 dengan perubahan yang signifikan dan cakupan yang lebih luas sehingga perlu sinergi yang lebih intensif dengan bidang-bidang teknis.
2. Dengan adanya dinamika situasi dan kebijakan, terdapat tugas dan fungsi yang sudah secara nyata diimplementasikan namun belum tercakup ketentuan pembinaan dan supervisinya dalam Perdirjen di atas.

Dapat disimpulkan akar masalahnya adalah:

1. Pada beberapa subkomponen, tidak adanya petunjuk teknis dari kantor pusat terhadap ketentuan yang mengatur mengenai output yang dihasilkan KPPN, misalnya Laporan RPA tingkat KPPN dan Analisis PNBP.

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai IKU tersebut antara lain:

1. Internalisasi Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2020 kepada seluruh pegawai Kanwil DJPb Prov. Gorontalo, KPPN Gorontalo, dan KPPN Marisa secara daring pada tanggal 24 September 2020.
2. Melakukan monitoring harian secara rutin melalui OMSPAN terhadap kinerja KPPN dan monitoring Kinerja KPPN secara mingguan
3. Monitoring tindak lanjut atas hasil pembinaan yang sudah dilakukan pada periode semester II tahun 2020.
4. Penyusunan dan pengiriman LHPS KPPN periode semester II tahun 2020
5. Penyusunan Rencana Pembinaan dan Supervisi KPPN Periode I tahun 2021.
6. Pelaksanaan Pembinaan dan Supervisi KPPN Periode I tahun 2021.
7. Monitoring atas tanggapan sementara hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Periode I tahun 2021.
8. Penyusunan LHPS KPPN periode semester I tahun 2021
9. Penyusunan Rencana Pembinaan dan Supervisi KPPN Periode II tahun 2021.

Selain itu, rekomendasi rencana aksi yang dilakukan terkait pencapaian IKU tersebut selama tahun 2021 (penanggung jawab: Bidang SKKI), yaitu:

1. Penyusunan Penyusunan LHPS selanjutnya secara tepat waktu.

IKU ini mengukur tingkat pemenuhan implementasi Aplikasi SAKTI pada tahun 2021 oleh satuan kerja-satuan kerja lingkup Kementerian/Lembaga, yang ruang lingkupnya ditetapkan melalui peraturan/keputusan Menteri Keuangan, dengan menggunakan sumber daya manusia, bisnis proses, infrastruktur, dan teknologi SAKTI.

Pengukuran tingkat pemenuhan implementasi SAKTI tahun 2021, dilakukan melalui kriteria sebagai berikut :

- A. Pencapaian atas pelaksanaan porsi tahapan kegiatan yang telah ditetapkan untuk periode semester I dan II tahun 2021 secara tepat waktu (sesuai target dalam Tabel A), dan;
- B. Pencapaian atas jumlah satker yang mengimplementasikan SAKTI tahun 2021 secara nasional (sesuai target dalam Tabel B).

Periode	No	Kegiatan Utama	Target Waktu Pelaksanaan			Bobot (% Tertimbang)
			Mulai	Selesai	Durasi (hari)	
	A	B	C	D	E	F
Semester I	Tahap 1	Penunjukan Trainer SAKTI Modul Penganggaran (mandatory) dan modul lainnya (optional)	01-Jan-21	31-Mar-21	89	3%
	Tahap 2	Penetapan Kelompok Kerja Daerah (Gugus Tugas) persiapan rollout SAKTI	01-Jan-21	31-Mar-21	89	6%
	Tahap 3	Monitoring dan Koordinasi pendampingan transaksi awal dan Migrasi Saldo Awal SAKTI Satker Piloting tahap V	01-Jan-21	30-Jun-21	180	6%
	Tahap 4	Monitoring dan Koordinasi Pendaftaran pengguna SAKTI Satker non piloting	01-Mar-21	30-Jun-21	121	12%
	Tahap 5	Monitoring dan Koordinasi FGD SAKTI KL dengan Kategori Mega (Kemenag, MA, Polri, Kemenkumham) dan DKJTP	01-Apr-21	30-Jun-21	90	8%
	Tahap 6	Publikasi tahap 1 SAKTI	01-Apr-21	30-Jun-21	90	5%
	Tahap 7	Monitoring dan Koordinasi Fasilitasi <i>Change Readiness Survey</i> Satker Non Piloting	01-Apr-21	31-Oct-21	213	7%
Semester II	Tahap 8	FGD atas laporan hasil Monev Implementasi SAKTI Satker Piloting SAKTI Tahap I s.d. V di wilayah kerjanya	01-Jul-21	30-Sep-21	91	5%
	Tahap 9	Workshop/Rakor SAKTI manajerial (Unit wilayah K/L non piloting)	01-Jul-21	30-Sep-21	91	6%
	Tahap 10	Monitoring dan koordinasi EUT SAKTI Satker Non Piloting	01-Jul-21	31-Oct-21	122	20%
	Tahap 11	Publikasi tahap 2 SAKTI	01-Oct-21	31-Dec-21	91	5%
	Tahap 12	Monitoring dan Koordinasi Pemutakhiran data pengguna SAKTI Satker <i>rollout</i>	01-Oct-21	31-Dec-21	91	7%
	Tahap 13	Monitoring dan Koordinasi Pendampingan Pembuatan SPM Gaji Induk Januari TA 2022	#####	31-Dec-21	30	10%
				Total	1.388	100%

No.	Satker	Keterangan
1	Satker Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan PMK Implementasi SAKTI tahun 2021 (di luar satker lingkup Kemenkeu, PPATK, Kemensekneg, KPK, Kemenpan RB, Bappenas, LKPP, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dan LPSK)	Untuk implementasi seluruh modul SAKTI

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (trajectory) triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan take last known value (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir periode terakhir).

Target IKU Tahun 2021

Target IKU tersebut untuk tahun 2021 adalah 100% sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Kinerja Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2021 dan masih sama dengan target di tahun sebelumnya. IKU tersebut merupakan IKU yang dilaksanakan pada Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mulai tahun 2018 dan telah ada pada IKU Kantor Pusat DJPb sejak tahun 2016.

Realisasi IKU Tahun 2021

Realisasi tersebut mencapai target yang telah ditetapkan (100%) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.29.

TABEL 3.29

Capaian IKU *Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI* Tahun 2021

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Tahunan	Pol /KP
Target	13%	40%	70%	100%	100%	<i>Maximize/ Take Last Known Value</i>
Realisasi	18%	38,31%	78%	100%	100%	
Capaian	120	95,77	105	100%	100%	

Perbandingan realisasi IKU 2021 dan tahun sebelumnya

Perbandingan capaian IKU tersebut dari tahun ke tahun ditunjukkan pada Tabel 3.29. Ditunjukkan bahwa tidak terdapat target (pada Kontrak Kinerja Kemenkeu- *Two* Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo) dan realisasi IKU tersebut untuk tahun 2017 karena IKU tersebut baru diterapkan pada tahun 2018.

Tabel 3.30

Perbandingan Capaian IKU *Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI* tahun 2016 s.d. 2021

Target/Realisasi	2021	2020	2019	2018	2017
Target	100%	100%	95%	90%	-
Realisasi	100%	100%	100%	100%	-

Perbandingan Realisasi s.d. 2021 dengan Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, Renstra DJPb

Realisasi IKU tahun 2018 s.d. 2019 mencerminkan realisasi Renstra DJPb Tahun 2015-2019 sedangkan pada Tahun 2020 tidak ada target pada Renstra DJPb dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.31.

TABEL 3.31

Perbandingan Realisasi IKU *Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI* dengan Renstra

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPB	Keterangan
2021	100%	-	-	pada Tahun 2020 tidak ada target pada Renstra DJPb maupun Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo
2020	100%	-	-	
2019	100%	-	86%	
2018	100%	-	86%	
2017	-	-	75%	

Isu,
permasalahan,
tindakan, dan
action plan

Meskipun realisasi IKU tersebut telah mencapai target tahun 2021, ada beberapa Potensi kendala (faktor yang mungkin menjadi penghambat) dalam pelaksanaannya diantaranya :

1. Salah satu tantangan dan potensi kendala yang mungkin terjadi pada Implementasi Roll Out SAKTI Web Full Module 2021 adalah kesiapan pengguna sistem, yaitu kesiapan pengguna dalam mengimplementasikan SAKTI (budaya/kompetensi teknis aplikasi) di seluruh pengguna yang belum mengimplementasikan SAKTI Web Full Module

Akar permasalahan dalam pencapaian IKU tersebut, yaitu:

1. Aplikasi SAKTI dalam pelaksanaan melibatkan peran pejabat Pengelola Keuangan seperti KPA, PPK, PPSPM, Ben-dahara Pengeluaran/Bendahara Penerima, dan operator dalam kedudukannya sebagai Maker, Checker, Approver secara individu. Sementara itu, selama ini (sebelum adanya Aplikasi SAKTI), dalam pelaksanaan proses bisnis pen-yaluran anggaran dan penyusunan laporan pertanggungjawabannya, pengelola keuangan seperti KPA, PPK, dan PPSPM terbiasa menyerahkan pelaksanaan proses bisnis yang menjadi kewenangannya kepada Bendahara Penge-luaran dan/atau staf pengelola keuangan yang menjadi operator. Hal ini tentunya sangat berpengaruh kepada kesia-pan pejabat pengelola keuangan seperti KPA, PPK, dan PPSPM tersebut dalam implementasi Aplikasi SAKTI di satuan kerjanya..

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut antara lain:

1. Memenuhi seluruh tahapan pada semester I dan II termasuk mengadakan implementasi seluruh modul SAKTI pada Kementerian/Lembaga.

Rekomendasi rencana aksi yang dilakukan pada tahun 2021 adalah dengan menyelesaikan seluruh tahapan implementasi SAKTI secara tepat waktu.

Sasaran Strategis 5

Pengelolaan kas yang optimal

Sesuai dengan ketentuan UU No.1 tahun 2004, salah satu fungsi Perbendaharaan negara adalah melaksanakan pengelolaan kas. Pengelolaan kas yang optimal melalui perencanaan kas yang efektif dapat menghindarkan terjadinya cash mismatch, dapat menjamin ketersediaan kas secara akurat dan tepat waktu, serta optimalisasi idle cash secara pruden. Pruden artinya berhati-hati dalam setiap pengambilan putusan/kebijakan maupun dalam melaksanakan pengelolaan kas maupun investasi pemerintah. Sebagai pengelola di bidang pengelolaan investasi, Ditjen Perbendaharaan sebagai regulator mampu mewujudkan penguatan regulasi sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif dan dapat menghasilkan penerimaan negara yang optimal. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mengidentifikasi 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.32.

TABEL3.32
Capaian IKU pada Sasaran Strategis
Pengelolaan kas dan fasilitasi investasi yang pruden, efisien dan optimal

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
5a-N	Persentase akurasi perencanaan kas	82%	100%	120%

5a-N
Persentase akurasi perencanaan kas

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas, perencanaan kas akumulasi RPD Harian, Rencana Penerimaan Dana, dan proyeksi pengeluaran/penerimaan unit eselon I Kementerian Keuangan selama periode tertentu untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang dituangkan dalam perencanaan kas pemerintah pusat.

Rencana Penarikan Dana (RPD) dan/atau Perkiraan Pendapatan bulanan, RPD harian, dan Perkiraan Pendapatan mingguan tingkat Satker serta pemutakhirannya disampaikan kepada Kepala KPPN oleh KPA.

Perencanaan Kas KPPN dinyatakan akurat apabila deviasi Rencana Penarikan Dana Satker berada dalam batas kewajaran sebagaimana ditentukan dalam target IKU.

Pemberian dispensasi RPD, baik nilai maupun waktu, tetap diperhitungkan sebagai penarikan dana yang akurat dalam formulasi akurasi RPD Satker.

Persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi seluruh satker pada periode tertentu.

Akurasi Perencanaan Kas Kanwil DJPb merupakan rata-rata akurasi perencanaan kas KPPN di wilayah kerjanya. Dengan demikian, dapat diformulasikan perhitungan realisasi IKU sebagai berikut:

100% - (Rata - Rata Deviasi RPD harian per periode)

Keterangan :

Tingkat deviasi RPD diperoleh dari Laporan Deviasi dari Modul Renkas pada Aplikasi OMSPAN untuk kemudian disesuaikan dengan penyesuaian deviasi RPD. Penyesuaian deviasi adalah:

- a) Pemberian dispensasi RPD atas pengajuan SPM, deviasinya dihitung 0%.
- b) Penyesuaian RPD satker BA BUN yang tidak terealisasi SPM-nya.
- c) Penyesuaian RPD atas SPM-KP yang SPM-nya melebihi batas waktu update RPD Harian (4 hari kerja).
- d) Penghapusan deviasi pada RPD harian akibat satker tidak mengajukan SPM sesuai RPD harian yang telah disampaikan.
- e) Penghapusan deviasi pada beberapa RPD Harian yang nilainya sama di beberapa tanggal yang berurutan, tapi satker hanya mengajukan 1 SPM
- f) Sepanjang belum ada update aplikasi terkait RPD Harian (a.l. SAKTI / SAS / Konversi), deviasi atas pengajuan SPM dengan nilai 1 miliar rupiah sampai dengan 4,9 miliar rupiah dihitung 0%."

Tujuan IKU ini adalah untuk mengoptimalkan peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam melakukan pembinaan dan supervisi terhadap akurasi perencanaan kas satker.

Dalam perhitungan IKU tersebut, digunakan polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan).

**Target IKU
Tahun 2021**

Target IKU tersebut untuk tahun 2021 adalah 82% sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Kinerja Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2021. Target tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan target sebelumnya pada tahun 2020 yaitu sebesar 80%. IKU ini merupakan IKU baru dan mulai dicantumkan pada tahun 2020.

**Realisasi IKU
Tahun 2021**

Realisasi atas IKU Persentase akurasi perencanaan kas kanwil diperoleh dari modul perencanaan kas pada aplikasi OMSPAN atau laporan akurasi renkas dari KPPN. Capaian IKU tersebut untuk tahun 2021 ditunjukkan pada Tabel 3.33

TABEL 3.33

Capaian IKU *Persentase akurasi perencanaan kas* Tahun 2021

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Tahunan	Pol /KP
Target	82%	82%	82%	82%	82%	<i>Maximize/ Average</i>
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.32, realisasi IKU tersebut untuk tahun 2021 adalah sebesar 100% dan telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo sebesar 82% (dengan nilai capaian 120%).

Sebagai catatan, IKU ini adalah IKU yang baru dicantumkan pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two pada tahun 2020 sehingga capaiannya hanya dapat dibandingkan antara tahun 2020 dan 2021 sebagaimana tertuang pada table 3.34

Tabel 3.34
Perbandingan Capaian IKU Persentase Akurasi perencanaan kas tahun 2020 s.d. 2021

Target/Realisasi	2021	2020
Target	82%	80%
Realisasi	100%	100%

Berdasarkan table tersebut, dapat kita bandingkan capaiannya antara Renstra Kanwil dan Renstra DJPb sebagaimana ditunjukkan pada table 3.35

TABEL 3.35
Perbandingan Realisasi IKU *Persentase akurasi perencanaan kas* dengan Renstra

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPB	Keterangan
2021	100%	-	-	pada Tahun 2020 tidak ada target pada Renstra DJPb maupun Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo
2020	100%	-	-	

Isu,
permasalahan,
Tindakan dan
action plan

Meskipun realisasi IKU tersebut telah mencapai target tahun 2021, terdapat beberapa hal terkait yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu:

1. Satker kesulitan dalam membuat rencana penarikan dana karena terdapat kegiatan yang tidak dapat diprediksi.
2. Adanya refocussing menyebabkan satker harus melakukan perencanaan ulang.
3. Kondisi pandemi yang masih belum menentu.
4. Kurang pemahaman satker mengenai pentingnya perencanaan kas..

Akar permasalahan dari IKU ini adalah:

1. Kepedulian satker terhadap ketersediaan kas masih kurang, karena mereka masih beranggapan bahwa semua SPM akan cair apabila sudah benar perhitungan dan kesesuaian pagunya dalam DIPA.
2. Adanya perubahan kegiatan secara mendadak yang tidak dapat dihindari
3. Kurangnya perencanaan yang matang disatukan kerja terhadap pelaksanaan kegiatan.
4. Kondisi pandemi menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kegiatan karena masih bergantung pada penetapan PPKM yang dilakukan update tiap minggu

Berdasarkan hal tersebut, Tindakan yang telah dilakukan selama tahun 2021 yaitu :

1. Edukasi kepada satuan kerja pada pelaksanaan EPA periode bulan
2. Koordinasi dengan KPPN
3. Koordinasi dengan satker untuk melakukan update kegiatan

Rekomendasi rencana aksi (action plan) yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2021 adalah:

1. Memberikan edukasi terhadap satker untuk tertib mengirimkan RPD secara tepat jumlah dan tepat waktu
2. Menginfokan pentingnya RPD untuk manajemen kas agar terhindar dari cash-mismatch

Sasaran Strategis 6	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien adalah Kemampuan BUN untuk mengawal pelaksanaan kebijakan pelaksanaan anggaran berjalan secara efektif dan efisien dengan memastikan kegiatan pelaksanaan anggaran pada BA Kementerian Negara/Lembaga maupun BA BUN berjalan sesuai dengan ketentuan/kebijakan Pelaksanaan Anggaran. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.36
Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	

TABEL3.36
Capaian IKU pada Sasaran Strategis
Monev Perbendaharaan yang optimal

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
6a-CP	Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89	94	105,62%
6b-N	Rata-rata nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN	90	99,53	110,59%

6a-CP	Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran K/L	Uraian mengenai 2 (dua) IKU tersebut adalah sebagaimana berikut: Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran Satker, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir Satker dalam pelaksanaan anggaran. Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh aspek pelaksanaan anggaran meliputi:
--------------	---	--

1. Aspek Kesesuaian dengan perencanaan
2. Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran
3. Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan
4. Aspek Kepatuhan terhadap regulasi

Setiap aspek memiliki beberapa variabel yang mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan satker K/L.

Jumlah dan rincian variabel untuk setiap aspek diatur dalam ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Dalam perhitungan IKU tersebut, digunakan polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) semesteran, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan).

Perhitungan formula IKU tersebut adalah sebagai berikut :

$$IKPA = \sum (\text{Bobot} \times \text{Nilai Variabel}) \times 100$$

Keterangan:

1. IKPA adalah Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L.
2. Tata cara perhitungan nilai IKPA diatur dalam ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang ditetapkan oleh DJPb"

Target IKU
Tahun 2021

Target IKU tersebut untuk tahun 2021 adalah 89 sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Kinerja Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2021, lebih tinggi dari target tahun 2020 (88).

Realisasi IKU
Tahun 2021

Realisasi IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2021 adalah 94. Nilai tersebut diperoleh dari rata-rata nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L tahun 2021 secara triwulanan. Capaian IKU tersebut untuk tahun 2021 ditunjukkan pada Tabel 3.37.

TABEL 3.37

Capaian IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2021

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target KK	89	89	89	89	89	
Realisasi	96,65	90,73	94,25	94,37	94	Maximize/ Average
Nilai Capaian	108,59	101,94	105,89	106,03	105,61	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.37, realisasi IKU tersebut untuk tahun 2021 adalah sebesar 94 dan telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Two* Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo sebesar 89 (dengan nilai capaian 105,61).

Untuk diketahui perkembangannya dari tahun ke tahun, capaian IKU tahun 2021 dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan pada table 3.38.

Perbandingan
Realisasi IKU
tahun 2021
dan tahun
sebelumnya

TABEL 3.38

Perbandingan Capaian IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L tahun 2017 s.d. 2021

Tahun	Realisasi					Target Tahunan
	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Tahunan	
2021	96,65	90,73	94,25	94,37	94	89
2020	N/A	N/A	91,76	91,24	91,50	88
2019	92,18	94,11	94,41	96,68	94,35	88
2018	87,06%	89,08%	92,39%	94,55%	90,77%	80%
2017	92,71%	95,58%	98,12%	96,81%	95,81%	75%

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi IKU terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan seluruh realisasi IKU tahun 2017 s.d. 2021 dan telah memenuhi target yang telah ditentukan.

Realisasi IKU pada tahun 2017 s.d. 2021 mencerminkan realisasi dari Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019, sedangkan tahun 2020 tidak terdapat target karena Kanwil tidak menyusun Renstra dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.39.

TABEL 3.39
Perbandingan Realisasi IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L dengan Renstra

Tahun	Realisasi Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPb	Keterangan
2021	94	-	89	<i>Tahun 2020 Kanwil tidak menyusun renstra sehingga tidak terdapat target</i>
2020	91,50	-	88	
2019	94,35	75%	80%	
2018	90,77%	75%	80%	
2017	95,81%	75%	75%	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.39, dapat diketahui bahwa nilai realisasi IKU untuk tahun 2017 s.d. 2021 tersebut telah memenuhi seluruh target yang ditetapkan dalam Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019 dan Renstra DJPb 2020-2024.

Meskipun realisasi IKU tersebut telah mencapai target tahun 2021, terdapat beberapa hal terkait yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu:

1. Capaian Nilai IKPA yang tidak maksimal disebabkan rendahnya 4 capaian indikator yaitu Capaian Output, De-vasi hal 3, data kontrak dan kesalahan SPM
2. Nilai Caput Belum Optimal karena masih ada batas waktu rekonsiliasi dg KPPN
3. Nilai capaian Halaman III masih rendah
4. Indikator Kesalahan SPM memiliki capaian minimal karena ratio penilaian untuk indikator ini memakai jumlah akumulasi kesalahan SPM.

Akar permasalahan dalam hal ini antara lain:

1. Faktor rendahnya 4 capaian indikator yaitu Capaian Output, Deviasi hal 3, data kontrak dan kesalahan SPM
2. Untuk indikator Capaian Output, nilai diperoleh dari realisasi per triwulan, sehingga sulit melakukan monitoring secara real time permasalahan per satker
3. Banyak data kontrak yang terlambat diajukan ke KPPN
4. Satker lebih memprioritaskan bagaimana anggaran terserap/habis (realisasi anggaran terserap) tanpa memperhitungkan rencana penarikan dana sehingga sering terjadi ketidaksesuaian dengan perencanaan awal.
5. Satker masih banyak yang terlambat menyampaikan revisi hal 3 DIPA ke Kanwil.

Tindakan yang telah dilaksanakan terkait pencapaian IKU tersebut, yaitu:

1. Berkoordinasi dengan KPPN agar selalu mengingatkan satker untuk melakukan pengisian Caput secara berkala dan memonitoring sistem monitoring pengisian caput di Omspan agar bisa mengetahui progres pengisian
2. Membuat surat ke satker terkait pemberian apresiasi dan juga strategi peningkatan nilai IKPA
3. Mengingatkan satker agar terus menjaga kinerja pelaksanaan anggaran melalui nilai IKPA baik langsung atau melalui aplikasi peri IKPA.

Rekomendasi rencana aksi yang dilaksanakan pada tahun 2021 (penanggung jawab: Bidang PPA I), yaitu dengan:

1. Melakukan monitoring dan pembinaan capaian IKPA satuan kerja berdasarkan pegangan masing-masing seksi baik melalui kegiatan sosialisasi, on the spot, surat menyurat maupun via group WA pembinaan.
2. Melakukan Evaluasi dan Pembinaan kepada Satuan kerja dengan perolehan IKPA dibawah rata-rata untuk dapat meningkatkan Perolehan IKPA diatas target minimal.
3. Monev Akselerasi Belanja Modal
4. Menginfokan ke satker bahwa terdapat perpanjangan update Halaman III untuk triwulan III sehingga akan meningkatkan nilai capaian IKPA satker.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik, DAK Non Fisik (BOS) dan Dana Desa berjalan dengan efisien dan efektif, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja seluruh stakeholder dalam pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik, DAK Non Fisik (BOS) dan Dana Desa.

Nilai Kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa pada KPPN diukur dengan menggunakan beberapa variabel sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda. (SYARAT)
2. Tingkat akurasi penyusunan proyeksi penyaluran dana transfer DAK dan Dana Desa oleh KPPN (PROYEKSI).
3. Ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK dan Dana Desa oleh KPPN. (SPPSPM)
4. Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK dan Dana Desa. (MONEV)
5. Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN DAK dan Dana Desa. (LK-UAKPA)

SYARAT adalah rata-rata indeks ketepatan waktu penyampaian (dhi. pengunggahan/upload melalui aplikasi omSPAN) dokumen persyaratan penyaluran DDD oleh pemda per jenis transfer per bidang/sub bidang per tahap penyaluran dengan mengacu pada ketentuan batas akhir yang disampaikan/dijelaskan/ditetapkan oleh Kantor Pusat mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait maupun Nota Dinas atau Surat resmi dari pejabat Menteri Keuangan/Eselon I/II Kantor Pusat.

Penentuan nilai indeks ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DDD per jenis transfer per bidang per tahap penyaluran (NIKWPDP DDD) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1,00 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap 3 bulan sebelum batas waktu yang ditentukan.

0,95 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap 2 bulan sebelum batas waktu yang ditentukan.

0,90 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap 1 bulan sebelum batas waktu yang ditentukan.

0,85 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap 1 minggu sebelum batas waktu yang ditentukan.

0,80 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap tepat pada batas waktu yang ditentukan dokumen persyaratan disampaikan.

0,75 = dokumen persyaratan terlambat disampaikan/diunggah (apabila terdapat dispensasi)

SYARAT = Rata-rata indeks ketepatan waktu penyampaian = $\sum \text{NIKWPDP DDD} / \text{Jumlah penyaluran DFDD per jenis transfer per bidang per tahap penyaluran yang dilakukan.}$

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "SYARAT" bersifat data kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data dari awal tahun hingga periode triwulan berkenaan, bukan hanya data pada triwulan terkait

PROYEKSI adalah KPA Penyaluran DAK dan Dana Desa menyampaikan Proyeksi melalui Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan Penyaluran DAK dan Dana Desa serta pemutakhirannya kepada Koordinator KPA Penyaluran DAK dan Dana Desa secara otomatis pada Aplikasi SAKTI. RPD bulanan pada Aplikasi Sakti disusun dengan memperhatikan tahapan, persentase, nilai, periode dan kesiapan Pemda dalam menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran. KPA Penyaluran DAK dan Dana Desa berkoordinasi dengan Pemda untuk mendapatkan informasi terkait kesiapan Pemda dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran.

Proyeksi dinyatakan akurat apabila deviasi antara rencana penarikan dana dengan realisasinya maksimal 15%. Persentase proyeksi yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi proyeksi penyaluran pada periode tertentu. Periode data proyeksi KPA Penyaluran DAK dan Dana Desa adalah setiap 7 Hari Kerja sebelum bulan berkenaan berakhir dengan menggunakan aplikasi SAKTI.

PROYEKSI = % Akurasi Proyeksi = $100\% - (\text{Rata2 Deviasi Proyeksi Penyaluran DDD per periode})$

Tingkat deviasi proyeksi diperoleh dari:

Penentuan nilai indeks proyeksi penyaluran DDD dihitung dengan ketentuan sistem layering deviasi sebagai berikut:

1,00 = deviasi per periode 0%;

0,80 = deviasi per periode 1 % sd 15%

0,00 = deviasi per periode di atas 15%.

SSPSPM adalah indeks ketepatan waktu penyaluran dana transfer DAK dan Dana Desa oleh KPPN selaku KPA Penyaluran diukur dengan menggunakan 2 variabel, yaitu penyelesaian tagihan dan penyelesaian retur SP2D penyaluran dengan mengacu pada ketentuan serta kriteria sebagai berikut:

- a. penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK dan Dana Desa oleh KPPN

selaku KPA Penyaluran dilakukan paling lambat 7 HK setelah dokumen persyaratan telah diterima oleh KPA Penyaluran DAK dan Dana Desa dengan lengkap dan benar.

- b. Ketepatan waktu penyelesaian retur SP2D Penyaluran DAK dan Dana Desa berdasarkan PER-9/PB/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

$SPPSPM = (\text{Jumlah tagihan DAKDD yang diselesaikan proses pembayarannya tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tagihan DAKDD yang diproses KPPN} \times 0.8) + (\text{Jumlah penyelesaian retur SP2D Penyaluran DAKDD yang diproses secara tepat waktu} / \text{jumlah seluruh retur SP2D DAKDD} \times 0.2).$

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "SPPSPM" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya.

MONEV adalah nilai indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK dan Dana Desa yang disampaikan secara triwulanan oleh KPPN kepada Koordinator KPA penyaluran sesuai ketentuan pelaksanaan monev DAK dan Dana Desa. Laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK dan Dana Desa oleh KPA Penyaluran disampaikan kepada Kanwil dengan tembusan kepada Koordinator KPA melalui alamat email subditpa4@gmail.com paling lambat 5 HK setelah periode triwulanan berakhir.

Penentuan nilai indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAKDD oleh KPPN dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1,00 = dokumen laporan monev disampaikan 5-4 Hari kerja sebelum batas waktu yang ditentukan.

0,95 = dokumen laporan monev disampaikan 3-2 Hari kerja sebelum batas waktu yang ditentukan.

0,85 = dokumen laporan monev disampaikan 1 Hari kerja sebelum batas waktu yang ditentukan.

0,80 = dokumen laporan monev disampaikan tepat pada batas waktu yang ditentukan.

0,65 = dokumen laporan monev disampaikan terlambat sesudah batas waktu yang ditentukan.

0,00 = dokumen laporan monev tidak disampaikan.

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "MONEV" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya.

LK-UAKPA adalah indeks ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN DFDD sesuai dengan ketentuan. Sesuai dengan ketentuan tersebut, dinyatakan bahwa batas waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN adalah sebagai berikut:

- a. LK Bulanan berupa LRA dan Neraca disampaikan paling lambat tanggal 13 bulan

berikutnya.

- b. LK Semester I disampaikan paling lambat tanggal 15 Juli TA berjalan.
- c. LK Tahunan disampaikan paling lambat 5 Februari TA berikutnya.
- d. LK Tahunan yang telah diaudit disampaikan paling lambat tanggal 23 April TA berikutnya

LK-UAKPA = prosentase ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN = $\frac{\sum \text{Laporan yang disampaikan tepat waktu pada Triwulan berkenaan}}{\sum \text{Laporan yang harus disampaikan pada Triwulan berkenaan}}$.

LK tingkat UAKPA BUN kepada UAKKPA disampaikan melalui ftp://172.16.2.124/ sesuai batas waktu yang ditentukan di atas (dapat ditentukan lain oleh surat Dirjen Perbendaharaan/Direktur APK)

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "LK-UAKPA" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka hanya digunakan data pada periode triwulan berkenaan dengan basis periode penyampaian laporan bukan periode laporan (historical report).

Penentuan Nilai Indeks ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN kepada UKKPA BUN dihitung dengan ketentuan sbb:

1,00 = dokumen LK tingkat UAKPA BUN disampaikan 5-4 Hari kerja sebelum batas waktu yang ditentukan.

0,90 = dokumen LK tingkat UAKPA BUN disampaikan 3-1 Hari kerja sebelum batas waktu yang ditentukan.

0,80 = dokumen LK tingkat UAKPA BUN disampaikan tepat pada batas waktu yang ditentukan.

0,50 = dokumen LK tingkat UAKPA BUN disampaikan terlambat sd 2 minggu dari batas waktu yang ditentukan.

0,25 = dokumen LK tingkat UAKPA BUN disampaikan terlambat diatas 2 minggu dari batas waktu yang ditentukan.

0,00 = dokumen LK tingkat UAKPA BUN disampaikan di atas 1 bulan atau tidak disampaikan

Dalam kondisi tertentu, batas waktu penyampaian LK dapat juga diatur dengan Nota Dinas/Surat yang diterbitkan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Realisasi IKU dihitung berdasarkan jumlah rata-rata Nilai Kinerja penyaluran DAK fisik dan Dana Desa yang disalurkan melalui KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa. Dengan demikian, dapat diformulasikan perhitungan realisasi IKU sebagai berikut:

$$\bar{x} \text{ NKP DDD} = \frac{\sum [\text{NKP DDD di KPPN}]}{\text{Jumlah KPPN}}$$

$$\text{NKP DDD} = [0,15 (\text{SYARAT}) + 0,20 (\text{PROYEKSI}) + 0,30 (\text{SPPSPM}) + 0,15 (\text{MONEV}) + 0,20 (\text{LK-UAKPA})] \times 100$$

Dalam perhitungan IKU tersebut, digunakan polarisasi data maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (trajectory) triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan average (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan).

Target IKU Tahun 2021

Target IKU tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2021 adalah sebesar 90, baik untuk target IKU triwulanan maupun tahunan.

Realisasi IKU Tahun 2021

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2021 adalah 99,53 yang diperoleh dari rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa yang telah memenuhi targetnya dengan nilai capaian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.40

TABEL 3.40

Capaian IKU Rata-rata nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN Tahun 2021

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	90	90	90	90	90	Maximize/ Average
Realisasi	100	99,68	99,53	98,92	99,53	
Nilai Capaian	111,11	110,93	110,76	109,91	110,58	

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2021 dan tahun sebelumnya

Perbandingan IKU dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat ditunjukkan pada Tabel 3.41.

Tabel 3.41

Perbandingan Capaian IKU Rata-rata nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN Tahun 2017 s.d. 2021

Target/Realisasi	2021	2020	2019	2018	2017
Target	90	80	75	70	-
Realisasi	99,53	98,12	96,86	87,53	-

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.41, meskipun IKU ini baru ditetapkan pada tahun 2018, dapat dikatakan bahwa IKU tersebut memiliki capaian baik dan berhasil memenuhi target yang ditetapkan pada Kontrak Kinerja Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun masing-masing.

Perbandingan Realisasi s.d. 2021 dengan Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dan Renstra DJPb

Perbandingan realisasi IKU tersebut s.d. tahun 2021 dengan Renstra DJPb sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.42

TABEL 3.42

Perbandingan Realisasi IKU Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN s.d 2020 dengan Renstra

Tahun	Realisasi IKU	Renstra Kanwil	Renstra DJPB	Keterangan
2021	99,53	-	83	Realisasi lebih besar dari Renstra DJPb 2020-2024.
2020	98,12	-	80	
2019	96,86	-	-	
2018	87,53	-	-	
2017	-	-	-	

Isu utama yang terjadi dalam pencapaian IKU tersebut antara lain adalah:

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

1. Nilai Kualitas Kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa pada KPPN diukur dengan menggunakan beberapa variabel sebagai berikut :
2. Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda. (SYARAT)
3. Tingkat akurasi penyusunan proyeksi penyaluran dana transfer DAK dan Dana Desa oleh KPPN (PROYEKSI).
4. Ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK dan Dana Desa oleh KPPN. (SPPSPM)

5. Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK dan Dana Desa oleh KPPN. (MONEV)
6. Kelengkapan dan Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN DAK dan Dana Desa. (LK-UAKPA)
7. Seluruh nilai indikator telah mendapatkan nilai maksimal kecuali variable syarat

Akar permasalahan pencapaian IKU yang dapat disimpulkan dalam hal ini adalah :

1. Pemerintah daerah masih belum dapat melengkapi syarat penyaluran minimal 2 bulan sebelum batas waktu penyaluran.
2. Lambatnya OPD/Pemerintah Daerah dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa kegiatan DAK Fisik.
3. Terdapat Desa yang terlambat dalam penetapan Perkades tentang APBDes.
4. Adanya Desa yang mengalami permasalahan di internal Pemerintah Desa..

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian IKU tersebut, yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara online (vidcon) maupun dengan media komunikasi telepon/whatsapp.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara onsite terhadap Pemerintah Daerah yang realisasi penyalurannya sangat rendah.
3. Rapat Koordinasi Evaluasi Penyerapan Anggaran secara 1 on 1 dengan Pemerintah Daerah
4. Meningkatkan kinerja pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa di KPPN dengan melaksanakan koordinasi serta evaluasi atas pemenuhan seluruh aspek penilaian kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang telah dilaksanakan KPPN.

Rekomendasi Rencana Aksi yang dilakukan pada tahun 2021 (penanggung jawab: Bidang PPA II), yaitu dengan:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara onsite terhadap Pemerintah Daerah yang realisasi penyalurannya sangat rendah.
2. Rapat Koordinasi Evaluasi Penyerapan Anggaran secara 1 on 1 dengan Pemerintah Daerah
3. Meningkatkan kinerja pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa di KPPN dengan melaksanakan koordinasi serta evaluasi atas pemenuhan seluruh aspek penilaian kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang telah dilaksanakan KPPN
4. Mengingatkan KPPN secara berkala terkait laporan-laporan yang diperlukan terkait tusi PPA II
5. Melakukan pengawasan atas penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang dilakukan oleh KPPN
6. Melakukan supervisi pada KPPN untuk membahas capaian dan strategi dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran kedepannya.

Sasaran Strategis 7**Akuntansi dan Pelaporan Keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu**

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Pengelola Perbendaharaan di daerah menyusun Laporan Keuangan secara akuntabel, transparan, dan tepat waktu. Prinsip transparan dan akuntabilitas mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu dan jelas sebagai perwujudan pertanggungjawaban suatu unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang telah dikelola. Transparansi, akuntabilitas dan tepat waktu akan mendorong diungkapkannya kondisi yang sebenarnya sehingga setiap pihak yang berkepentingan (stakeholder) dapat memperoleh informasi yang akurat, andal dan terkini. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 3.43.

TABEL 3.43
Capaian IKU pada Sasaran Strategis

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
7a-N	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,1%	100%	101,94
7b-N	Nilai kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah	79	95,10	120

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

7a-N Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan LKBUN dan LKKL, Satuan Kerja selaku UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan UAKKBUN-Daerah di wilayah kerjanya setiap bulan.

Selanjutnya, sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4841/PB/2016 tanggal 14 Juni 2016 hal Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal tingkat KPPN Bulan Januari s.d. Mei 2016, Kanwil DJPb tidak lagi melakukan rekonsiliasi antara UAPPA-W, namun diwajibkan untuk memantau pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA pada seluruh KPPN di wilayah kerjanya.

Realisasi IKU dihitung berdasarkan:

- (1) Perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara tepat waktu dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%)
- (2) Perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara andal dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%).

Ketepatan waktu rekonsiliasi yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang melakukan upload data ke aplikasi E-Rekon sebelum batas akhir yang ditetapkan.

Keandalan data hasil rekonsiliasi yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang tidak memiliki

suspen belanja dan Kas di BP (ambang batas suspen 0%) sesuai dengan BAR (Berita Acara Rekonsiliasi) yang paling akhir diterbitkan.

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat historical report. Cakupan data setiap triwulan adalah sebagai berikut:

Triwulan I 2021 = Desember 2020 - Februari 2021

Triwulan II 2021 = Maret - Mei 2021

Triwulan III 2021 = Juni - Agustus 2021

Triwulan IV 2021 = September - November 2021

Realisasi IKU pada Kanwil DJPb diukur berdasarkan pelaksanaan rekonsiliasi UAKPA seluruh satker yang menjadi mitra kerja seluruh KPPN di wilayahnya.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan tahunan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Target IKU Tahun 2021

Target IKU tersebut sebagaimana terdapat pada Kontrak Kinerja Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2021 adalah 98,1% dengan periode pelaporan triwulanan. Sebagai informasi bahwa IKU ini sebelumnya ada pada level Kemenkeu-Three, pada tahun 2021 IKU tersebut baru ditetapkan di dalam kontrak kinerja Kemenkeu-Two.

Realisasi IKU Tahun 2021

Realisasi IKU Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal adalah 100% berdasarkan hasil penilaian dari aplikasi e-Rekon.

Dengan demikian realisasi IKU tersebut telah memenuhi target yang ditentukan dalam kontrak kinerja tahun 2021 sebagaimana ditunjukkan capaiannya pada Tabel 3.44

TABEL 3.44

Capaian IKU *Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal* tahun 2021

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	98,1%	98,1%	98,1%	98,1%	98,1%	<i>Maximize/ Average</i>
Realisasi	100%	N/A	100%	100%	100%	
Nilai Capaian	101,94	N/A	101,94	101,94	101,94	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.44, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 100% tersebut melampaui target IKU sebesar 98,1% (dengan nilai capaian 101,94) yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Two* Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2021.

Untuk diketahui perkembangannya dari tahun ke tahun, capaian IKU tahun 2021 dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.45

TABEL 3.45

Perbandingan Capaian *Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal* Tahun 2017 s.d. 2021

Target/Realisasi	2021	2020	2019	2018	2017
Target	98,1%	98,1%	98,1%	98%	98%
Realisasi	100%	99,96%	100%	99,75%	99,60%

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi IKU pada tahun 2017 s.d. 2021 telah memenuhi target yang telah ditentukan.

Realisasi IKU pada tahun 2017 s.d. 2021 tidak dapat dibandingkan dengan Renstra Kanwil DJPb Tahun 2015-2019 dan Resntra DJPb 2020-2024 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.46

TABEL 3.46

Perbandingan Realisasi IKU *Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal* dengan Renstra

Tahun	Realisasi IKU	Renstra Kanwil	Renstra DJPB	Keterangan
2021	100%	-	-	Pada tahun 2020 Kanwil tidak menyusun Renstra.
2020	99,96%	-	-	
2019	100%	-	-	
2018	99,75%	-	-	
2017	99,60%	-	-	

Meskipun realisasi sebesar tersebut telah mencapai target yang ditentukan, terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian. Dari penilaian GFS yang ada, terdapat tiga unsur yang hasil penilaiannya masih perlu ditingkatkan, yaitu :

1. Sesuai ND 6/PB/PB.6/2021 tanggal 30 Maret 2021, sampai dengan akhir TW I 2021 sedang dilakukan pemeriksaan LKKL, LKBUN, dan LKPP 2020 oleh BPK dan sedang dilakukan penyempurnaan aplikasi pelaporan sehingga rekonsiliasi transaksi 2021 belum dapat dilakukan.
2. Sesuai ND 12/PB/PB.6/2021 tanggal 30 Juni 2021, disebutkan hasil pelaksanaan rekonsiliasi s.d. Mei 2021 tidak diperhitungkan dalam capaian IKU sehingga realisasi capaian adalah N/A

Akar permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan IKU tersebut adalah:

1. Sesuai Manual IKU:
 - Data Capaian Triwulan I 2021 hanya menggunakan data pelaksanaan rekonsiliasi bulan Desember 2020 (Data Januari sd Februari 2021 belum tersedia).
 - Data Capaian Triwulan II 2021, data rekonsiliasi Maret sd Mei 2021 belum tersedia maka capaian Triwulan II 2021 menjadi N/A.
2. Bid. PAK Kanwil DJPb Gorontalo terhitung bulan Juli 2021 secara rutin melakukan monitoring rekonsiliasi melalui Aplikasi e-Rekon LK.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut antara lain:

1. Pembentukan Tim Saber Rekon untuk asistensi/pembinaan on the spot pada satker yang rekonsiliasinya belum optimal.
2. Pada awal Tahun 2021, Bidang PAK telah melaksanakan kegiatan Bimtek Penyusunan LKKL dengan para UAPPA-W Satker sekaligus sebagai sarana pembinaan dengan satker melalui UAPPA-W nya.

3. Seksi PSAPP telah mengikuti kegiatan Penyuluhan SAI di Jakarta tanggal 15 s.d. 18 Juni 2021.
4. Seksi PSAPP telah menyelenggarakan Bimtek Penyusunan LKKL Tingkat wilayah Se-mester I Tahun 2021 pada tanggal 21 Juli 2021.
5. Seksi ASPLK telah menyusun ND-646/WPB.29/2021 tanggal 7 Juli 2021 tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA dan KPPN bulan Mei 2021.
6. Seksi ASPLK telah menyusun ND 712/WPB.29/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Monitoring Pelaksanaan Rekonsiliasi bulan Juli 2021.
7. Melakukan pembinaan on the spot pada beberapa satker untuk menyelesaikan permasalahan rekonsiliasi sesuai ST-229/WPB.29/2021 tanggal 30 Agustus 2021.
8. Melakukan pembinaan on the spot pada satker di Kab. Gorontalo, Bone Bolango, dan Boalemo
9. Melakukan koordinasi dengan KPPN dan UAPPA-W dalam rangka pendampingan jika terjadi permasalahan dan memastikan penyelesaian pelaksanaan rekonsiliasi data.

Rekomendasi rencana aksi yang dilakukan pada tahun 2021 (penanggung jawab: Bidang PAPK), yaitu :

1. Melakukan koordinasi dengan KPPN dan UAPPA-W dalam rangka pendampingan jika terjadi permasalahan dan memastikan pelaksanaan rekonsiliasi data s.d. Agustus 2021.

7a-N Nilai
kualitas
Laporan
Government
Finance
Statistic
(GFS)
tingkat
wilayah

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

Government Finance Statistic (GFS) telah menjadi salah satu milestones dalam reformasi manajemen keuangan. Dalam rangka meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah, UU Nomor 1 tahun 2004 mengamanatkan agar laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antar negara.

Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 41/PB/2013, Kanwil Ditjen PBN mengkonsolidasikan seluruh data LKPD dalam wilayah kerjanya untuk selanjutnya dikonsolidasikan dengan data LKPP tingkat wilayah. Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah selanjutnya diproses untuk menghasilkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (GFS regional). Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah ini selanjutnya secara periodik (triwulanan, semesteran dan tahunan) disampaikan kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) untuk dilakukan penilaian. Kategori nilai Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat Wilayah adalah sebagai berikut:

Level 4 = 90-100 (Sangat Baik), Level 3 = 60-89 (Baik), Level 2 = 40-59 (Cukup), Level 1 = <39 (Kurang)

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini bertujuan untuk mewujudkan laporan GFS tingkat Kanwil DJPb yang berkualitas.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan tahunan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

**Target IKU
Tahun 2021**

Target IKU tersebut sebagaimana terdapat pada Kontrak Kinerja Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2021 adalah 79 dengan periode pelaporan tahunan. Target tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan target tahun sebelumnya pada tahun 2020 yaitu sebesar 78.

**Realisasi IKU
Tahun 2021**

Realisasi IKU Nilai kualitas Laporan *Government Finance Statistic* (GFS) tingkat wilayah adalah 95,10 berdasarkan hasil penilaian dari Kantor Pusat DJPb c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Dengan demikian realisasi IKU tersebut telah memenuhi target yang ditentukan dalam kontrak kinerja tahun 2021 sebagaimana ditunjukkan capaiannya pada Tabel 3.47

TABEL 3.47

Capaian IKU *Nilai kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah* tahun 2021

Target/ Realisasi	Tahunan	Pol /KP
Target	79	Maximize/ Take Last Known
Realisasi	95,10	
Nilai	120	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.47, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 95,10 tersebut melampaui target IKU sebesar 79 (dengan nilai capaian 120) yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu- *Two* Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2021.

Untuk diketahui perkembangannya dari tahun ke tahun, capaian IKU tahun 2021 dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.48

TABEL 3.48

Perbandingan Capaian IKU *Nilai kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah* Tahun 2017 s.d. 2021

Tahun	Realisasi	Target
2021	95,10	79
2020	92,62	78
2019	95,16	77
2018	94,09	75
2017	95,35	70

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2021 dan tahun sebelumnya

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi IKU pada tahun 2017 s.d. 2021 telah memenuhi target yang telah ditentukan.

Realisasi IKU pada tahun 2017 s.d. 2021 mencerminkan realisasi dari Renstra Kanwil DJPb Tahun 2015-2019 dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.49

TABEL 3.49

Perbandingan Realisasi IKU *Nilai kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah* s.d 2020 dengan Renstra

Tahun	Realisasi IKU	Renstra Kanwil	Renstra DJPB	Keterangan
2021	95,10	-	-	Pada tahun 2020 Kanwil tidak menyusun Renstra.
2020	92,62	-	-	
2019	95,16	3	-	
2018	94,09	3	-	
2017	95,35	3	-	

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Meskipun realisasi sebesar tersebut telah mencapai target yang ditentukan, terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian. Dari penilaian GFS yang ada, terdapat tiga unsur yang hasil penilaiannya masih perlu ditingkatkan, yaitu :

1. Penyusunan GFS (LKPK TW dan LSKP TW Tahun 2020) baik Preliminary maupun Unaudited dan TW 1 2021 dilaksanakan secara paralel menggunakan kertas kerja excel dan SIKRI Modul Pelaporan.
2. Penyediaan Data LKPP pada OMSPAN terlalu mepet dengan batas penyusunan (Contoh: untuk Data Unaudited 2020 baru disediakan tanggal 13 April 2021, Untuk Data Semester I 2021 disediakan pada 3 Agustus 2021).

Akar permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan IKU tersebut adalah :

1. Data LKPD yang diberikan oleh sebagian Pemda kadang belum detail per jenis laporan

keuangan sebagaimana yang dibutuhkan pada Kertas Kerja GFS;

2. Kode akun yang digunakan pada masing-masing Pemda kadang berbeda-beda sehingga menyulitkan proses konsolidasi data;
3. Perlu ketelitian dalam menyusun kertas kerja dan pencantuman pada face laporan/CaLK GFS;
4. Partisipasi (usulan, pertanyaan, masukan) yang telah dilakukan oleh Bidang PAPK perlu didokumentasikan dengan baik.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut antara lain:

Atas Kualitas Laporan GFS Tahun 2020:

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemda untuk mendapatkan LKPD sebagai sumber data pembuatan GFS.
2. Melakukan pengujian data SIKRI MP atas GFS Preliminary dan menyampaikan hasilnya melalui ND-237/WPB.29/2021 tanggal 4 Maret 2021.
3. Menyusun dan menyampaikan Laporan GFS Tahun 2020 Unaudited melalui ND No-mor ND-407/WPB.29/2021 tanggal 20 April 2021.
4. Melakukan pengujian data SIKRI MP atas GFS Unaudited 2020, serta menyampaikan hasilnya melalui ND 502/WPB.29/2021 tanggal 11 Mei 2021;
5. Melakukan kegiatan Publikasi GFS Regional Gorontalo melalui kegiatan Government Accounting Seminar on Campus di Univ. Negeri Gorontalo tanggal 24 Juni 2021
6. Menyusun dan menyampaikan Laporan GFS Tahun 2020 Audited melalui ND-830/WPB,29/2021 tanggal 30 Agustus 2021

Atas Kualitas Laporan GFS Tahun 2021:

1. Menyusun dan menyampaikan Laporan GFS Triwulan I Tahun 2021 melalui ND No-mor ND-426/WPB.29/2021 tanggal 26 April 2021;
2. Melakukan pengujian data SIKRI MP atas GFS Triwulan I 2021 dan menyampaikan hasil upload melalui ND 502/WPB.29/2021 tanggal 11 Mei 2021;
3. Melakukan pengujian data SIKRI MP atas GFS Semester I 2021 dan menyampaikan hasil upload melalui ND 724/WPB.29/2021 tanggal 28 Juli 2021;.

Rekomendasi rencana aksi yang dilakukan pada tahun 2020 (penanggung jawab: Bidang PAPK), yaitu :

1. Menyusun GFS untuk setiap periodenya secara tepat waktu

**Sasaran
Strategis 8:**

**Organisasi dan
SDM yang optimal
dan berkinerja
tinggi**

Organisasi yang optimal adalah organisasi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. SDM yang optimal adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal. Dalam sasaran strategis ini Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo menjalankan 3 (tiga) IKU yang di antaranya :

TABEL 3.50
Capaian IKU pada Sasaran Strategis
Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	84	94,40	112,38%
8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83	87,07	104,90%
8c-N	Nilai rata-rata hard competency pegawai	78	93,30	119,40%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut:

**3a-N Nilai kualitas
pengelolaan
kinerja
berbasis
Strategy
Focused
Organization**

Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup DJPb, telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja.

Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan bagi unit kerja lingkup DJPb untuk melaksanakan action plan yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip Strategy Focused Organization (SFO).

Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJPb, Kantor Pusat DJPb melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing.

Penilaian dimaksud dilaksanakan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- Nilai Kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode sampai dengan triwulan III 2021 (70%).
- Nilai NKO Unit periode tahunan 2020 (30%).

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan tahunan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir periode terakhir).

target IKU
tahun 2021

Target IKU tersebut untuk tahun 2021 adalah sebesar 84 dengan periode pelaporan tahunan. Target tersebut lebih besar dari target tahun 2020 (84). Target tersebut lebih besar dari target IKU pada Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2015- 2019. Untuk tahun 2019 terdapat perbedaan wording IKU yang ditetapkan dalam Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo yaitu IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja.

Realisasi IKU
Tahun 2021

Realisasi IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* adalah 91,14 berdasarkan hasil penilaian kualitas Pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan sesuai c.q. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.51.

TABEL 3.51

Capaian IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* Tahun 2021

Target/ Realisasi	Tahunan	Pol /KP
Target	84	Maximize/ Take Last Known
Realisasi	94,40	
Nilai	112,38	

Perbandingan
Realisasi IKU
Tahun 2021
dengan realisasi
periode
sebelumnya

Realisasi tersebut tahun 2021 sebesar 94,40 meningkat dibanding realisasi tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan target dan realisasinya pada Tabel 3.52

TABEL 3.52

Perbandingan Capaian IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* Tahun 2017 s.d. 2021

Tahun	Realisasi	Target
2021	94,40	84
2020	91,14	83
2019	93,27	83
2018	94,27	81
2017	89,31	79

Perbandingan
Realisasi IKU
Tahun 2021
dengan Renstra
Kanwil DJPb
Provinsi
Gorontalo dan
Resnra DJPb

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.52, realisasi IKU tersebut pada tahun 2017 s.d. 2021 masing-masing telah melampaui targetnya.

Realisasi IKU tahun 2017 s.d. 2021 mencerminkan realisasi Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019 dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.53.

TABEL 3.53

Perbandingan Realisasi IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* s.d. 2021 dengan Renstra

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPB	Keterangan
2021	94,40	-	-	Pada tahun 2020 Kanwil tidak menyusun Renstra
2020	91,14	-	-	
2019	93,27	80	-	
2018	94,27	80	-	
2017	89,31	80	-	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.50 nilai realisasi tahunan IKU sebesar 94,40 untuk tahun 2021 telah meningkat dari capaian tahun 2020, namun demikian capaian IKU tahun 2019-2020 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan Renstra Kanwil dan Renstra DJPb 2020-2024.

Isu utama yang perlu menjadi perhatian selama pelaksanaan IKU ini adalah

1. Masih ada beberapa kegiatan yang masih harus dilaksanakan dalam rangka langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja berbasis SFO.

Akar masalah yang menjadi potensi penghambat pelaksanaan IKU ini adalah

1. Telah dilakukan monitoring terhadap kegiatan dan data dukung dalam rangka penyusunan laporan SFO.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pemenuhan IKU tersebut, yaitu:

1. Sosialisasi Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja Berbasis SFO pada seluruh Pejabat dan Pegawai Pada Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tanggal 10 Februari 2021
2. FGD Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja Berbasis SFO Kepada Seluruh Pejabat Administrator dan Pengawas serta PIC Pengelola Kinerja Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tanggal 22 April 2021.
3. Bincang Kinerja tanggal 10 Mei 2021
4. Sosialisasi strategi organisasi Triwulan II dan Sosialisasi cascading/alignment IKU Kemenkeu Two-Three-Four-Five Periode April-Juni Tahun 2021 pada tanggal 14 Juli 2021
5. Sosialisasi strategi organisasi Triwulan III sekaligus Sosialisasi Pengisian IIAA tanggal 14 Juli 2021
6. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Laporan Langkah Langkah Peningkatan Kualitas pengelolaan Kinerja Berbasis SFO bersama UIC terkait
7. Pelaksanaan kegiatan Bincang Kinerja Triwulan IV tahun 2021 tanggal 21 Oktober 2021
8. Melaksanakan Evaluasi terhadap Hasil Penilaian Kantor Pusat DJPb atas Pemenuhan Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja dan Bincang Kinerja Triwulan I Tahun 2022.

Rekomendasi rencana aksi yang telah dilakukan untuk pemenuhan hard competency di tahun 2021 (penanggung jawab: Bagian Umum), yaitu dengan:

1. Menyusun dan menyampaikan laporan SFO setiap periodenya secara tepat waktu.

Nilai hasil evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pusat, Kantor Wilayah DJPb, dan KPPN. Penilaian tersebut dilakukan oleh Sekretariat DJPb c.q. Bagian Kepatuhan Internal .

Penilaian dilaksanakan dengan berpedoman pada Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-239/PB/2020 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Unsur-unsur penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal, terdiri atas:

1. Penerapan manajemen risiko (bobot: 35%)
2. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, kode etik/disiplin pegawai, dan pengendalian gratifikasi (bobot: 55%)
3. Pengelolaan pengaduan dan rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional (bobot: 10%)

IKU ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelaksanaan tugas kepatuhan internal di lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo.

Realisasi IKU ini diperoleh dari hasil penilaian pelaksanaan tugas KI dari kantor Pusat Ditjen Perbandaharaan.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan tahunan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir periode terakhir).

Target tahun 2021

Target IKU tersebut untuk tahun 2021 adalah sebesar 83 dengan periode pelaporan tahunan. Target tersebut sama dengan target tahun 2020.

Realisasi tahun 2021

Realisasi IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal adalah 87,07. Dengan demikian realisasi IKU tersebut telah memenuhi target yang ditentukan dalam kontrak kinerja tahun 2021 sebagaimana ditunjukkan capaiannya pada Tabel 3.54.

TABEL 3.54

Capaian IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal tahun 2021

Target/ Realisasi	Tahunan	Pol /KP
Target	83	Maximize/ Take Last Known
Realisasi	87,07	
Nilai	104,90	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.54, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 87,07 tersebut melampaui target IKU sebesar 83 (dengan nilai capaian 104,90) yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Two* Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2021.

Untuk diketahui perkembangannya dari tahun ke tahun, capaian IKU tahun 2021 dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.55.

TABEL 3.55

Perbandingan Capaian IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal Tahun 2017 s.d. 2021

Tahun	Realisasi	Target
2021	87,07	83
2020	88,25	83
2019	86,9	83
2018	93,02	78
2017	89,31	77

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi IKU tahun 2017 s.d. 2021 telah memenuhi target yang telah ditentukan.

Realisasi IKU tahun 2017 s.d. 2021 mencerminkan realisasi dari Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019 dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.56

TABEL 3.56

Perbandingan Realisasi IKU *Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal* s.d. 2021 dengan Renstra

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPB	Keterangan
2021	87,07	-	-	Pada tahun
2020	88,25	-	-	2020 Kanwil
2019	86,9	80	-	tidak
2018	93,02	80	-	menyusun
2017	89,31	80	-	Renstra

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.56, meskipun realisasi IKU pada tahun 2021 mengalami penurunan namun nilai realisasi tahunan IKU untuk tahun 2017 s.d 2021 telah memenuhi target yang ditetapkan.

Meskipun realisasi sebesar tersebut telah mencapai target yang ditentukan, terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian yaitu:

1. Objek penilaian hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal mempunyai cakupan yang luas yang meliputi penerapan manajemen risiko, pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern, kode etik dan disiplin pegawai serta pengendalian gratifikasi dan pengelolaan pengaduan dan tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil audit (LHA) aparat pengawas fungsional

Akar masalah dari isu tersebut adalah :

1. Tidak/belum semua pegawai yang menangani tugas kepatuhan internal pernah mengikuti pelatihan/workshop/bimtek/diklat dan kegiatan-kegiatan tersebut relatif masih jarang dilakukan sehingga persepsi/implementasi dalam pelaksanaan tugas bisa berbeda-beda.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut antara lain:

1. Menyusun Laporan Rekapitulasi Pengendalian Gratifikasi periode bulanan dan triwulanan s.d. September 2021;

2. Menyusun Laporan Penanganan Pengaduan periode bulanan dan triwulanan s.d. September 2021;
3. Menyusun Laporan Penanganan Benturan Kepentingan bulanan s.d. September 2021;
4. Melaksanakan pemantauan kode etik dan disiplin pegawai metode Desk Review Triwulan III Tahun 2021 dan metode Sidak pada KPPN Gorontalo dan Marisa di bulan September 2021.
5. Kepala Seksi Kepatuhan Internal telah mengikuti kegiatan e-Learning Audit untuk non-Pejabat Fungsional Auditor pada tanggal 15-28 September 2021.
6. Kepala Bidang SKKI telah mengikuti e-Learning Penguatan, Revitalisasi, dan Optimalisasi UKI (PRO UKI) pada tanggal 13-23 September 2021.

Rekomendasi rencana aksi yang dilakukan pada tahun 2021 (penanggung jawab: Bidang SKKI) :

1. Penanganan Gratifikasi;
2. Melakukan pemantauan Pengaduan dan menindaklanjutinya (bila ada);
3. Melaksanakan Pemantauan Pengendalian Utama (LHPPU);
4. Rapat Bulanan Pengendalian Risiko ;
5. Internalisasi manajemen risiko; dan
6. Melakukan dan menyusun Laporan Mon-itoring dan Evaluasi Peningkatan Budaya Kerja Bebas dari Korupsi Periode Ok-tober - Desember 2021.

8a-N Nilai rata-rata hard competency pegawai

IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman para pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan terhadap tugas dan fungsi yang mereka jalankan, sehingga outputnya dapat dijadikan sebagai pemetaan hard competency pegawai. Teknisnya, para pegawai akan mendapat tes secara online yang terdiri dari beberapa soal untuk diselesaikan, yaitu 70% tuisi eselon IV yang bersangkutan + 30% tuisi/pengetahuan lainnya.

Untuk Kemenkeu-Two Kanwil, realisasi IKU tersebut diukur berdasarkan rata-rata hasil tes yang dicapai oleh seluruh pegawai Kanwil. Dengan demikian, pimpinan unit dan atasan langsung agar memberikan bimbingan dan tutorial kepada para pegawai di lingkungan masing-masing. Bagi para pegawai yang berkewajiban mengikuti tes hard competency namun berhalangan karena alasan tertentu, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat eselon II masing-masing unit, dan capaian IKU pegawai bersangkutan adalah N/A (Not Available). Namun jika tidak disertai surat keterangan, maka capaian IKU bagi pegawai bersangkutan adalah 0 (nol). Pegawai yang tidak mengikuti tes, tidak dimasukkan dalam penghitungan capaian IKU atasan.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan tahunan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir periode terakhir)

Target IKU Tahun 2021

Target IKU ini sebagaimana yang ditetapkan pada kontrak kinerja Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2021 adalah 78, target ini lebih besar dari target tahun sebelumnya yaitu 77.

Realisasi IKU Tahun 2021

Realisasi IKU tersebut tahun 2021, yaitu sebesar 93,90, telah melebihi target yang telah ditetapkan (78) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.57.

TABEL 3.57
Capaian IKU Nilai rata-rata hard competency pegawai Tahun 2021

T/R	Q4	Y-21	Pol /KP
Target	78	78	<i>Maximize / TLK</i>
Realisasi	93,90	93,90	
Capaian	120	120	

Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021 dengan realisasi periode

Realisasi tersebut tahun 2021 sebesar 93,90 meningkat dibanding realisasi tahun 2021 sebelumnya ditunjukkan target dan realisasinya pada Tabel 3.58

TABEL 3.58
Perbandingan Capaian IKU Nilai rata-rata hard competency pegawai Tahun 2016 s.d. 2020

Target/ realisasi	2017	2018	2019	2020	2021
Target KK	75	77	77	77	78
Realisasi	91,28	88,72	89,9	90,22	93,90

Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2020 dengan Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dan Resnra DJPb

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.58, realisasi IKU tersebut pada tahun 2017 s.d. 2021 masing-masing telah melampaui targetnya.

Realisasi IKU tahun 2017 s.d. 2021 mencerminkan realisasi Renstra Kanwil DJPb Provinsi

Gorontalo Tahun 2015-2019 dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.59.

TABEL 3.59
Perbandingan Realisasi IKU *Nilai rata-rata hard competency pegawai* s.d. 2021 dengan Renstra

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPB	Keterangan
2021	93,90	-	-	Pada tahun 2020 Kanwil tidak menyusun Renstra.
2020	90,22	-	-	
2019	89,9	90	-	
2018	88,72	90	-	
2017	91,28	90	-	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.59 nilai realisasi tahunan IKU sebesar 93,90 untuk tahun 2021 telah meningkat dari capaian tahun 2020, namun demikian capaian IKU tahun 2019-2021 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya karena terdapat perbedaan ruang lingkup perhitungan dimana dalam Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo hanya mengukur dari sisi persentase jumlah pegawai yang mendapat nilai *hard competency 'baik'*.

Isu utama yang perlu menjadi perhatian selama pelaksanaan IKU ini adalah

1. Sampai dengan triwulan IV telah diperoleh capaian sebesar 93,90 berasal dari nilai uji hard competency yang dilaksanakan oleh 16 pegawai
2. Pengetahuan dan peraturan di masing-masing bidang dan bagian terus berkembang, memerlukan usaha dan konsistensi masing-masing pegawai untuk terus melakukan update informasi, aturan dan pengetahuan yang juga diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan.

Akar permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan IKU ini diantaranya :

1. Apabila pegawai tidak rutin melakukan update informasi aturan/ pengetahuan akan mengalami kesulitan dalam mengerjakan test hard competency maupun dalam melaksanakan tugas pekerjaan

Tindakan yang telah dilaksanakan :

1. Melaksanakan GKM internal secara berkala dan sharing knowledge dengan rekan kerja, maupun atasannya.
2. Memberikan coaching terkait tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dan bagian
3. Mengusulkan diklat dan pembelajaran secara daring melalui e-learning
4. Melaksanakan ujian hard competency pada periode 27-30 September 2021

Rekomendasi rencana aksi yang dilaksanakan selama tahun 2021 (PIC: Bagian Umum) adalah:

1. Sharing Knowledge tugas dan fungsi masing-masing bidang dan bagian
2. GKM internal terkait tugas dan fungsi masing-masing bidang dan bagian

Sasaran Strategis 9: Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Pengelolaan BMN yang optimal apabila seluruh BMN Kementerian Keuangan telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi. Dalam pencapaian SS ini, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 3.60.

TABEL 3.60
Capaian IKU pada Sasaran Strategis
Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil	95%	97,19%	101,77%
9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W Kanwil DJPb	82	91,70	111,83%
9c-N	Tingkat kualitas pemenuhan BMN	100%	112%	112%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

9a-CP **Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kanwil**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" Kementerian Keuangan mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu.

Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Perhitungan realisasi IKU :

Capaian IKU PKPA Triwulan I = Capaian IKPA Januari s.d. Maret

Capaian IKU PKPA Triwulan II = Capaian IKPA Januari s.d. Juni

Capaian IKU PKPA Triwulan III = Capaian IKPA Januari s.d. September

Capaian IKU PKPA Triwulan IV = 40% Capaian IKPA Januari s.d. Desember + 60% Capaian SMART

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan tahunan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir periode terakhir).

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan tahunan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir periode terakhir)

Target IKU Tahun 2021

Target IKU *Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran* Kanwil untuk tahun 2021 adalah sebesar 95,5% sebagaimana ditentukan dalam kontrak kinerja Kemenkeu-*Two* tahun 2021. Target tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan target tahun sebelumnya yang hanya sebesar 95%.

Realisasi IKU Tahun 2021

Realisasi IKU *Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran* Kanwil Tahun 2021 adalah 97,19%. Persentase tersebut diperoleh dari nilai realisasi terakhir periode pelaporan pada tahun 2021, yaitu nilai pada triwulan IV. Perhitungan nilai tersebut dapat ditunjukkan pada Tabel 3.61.

TABEL 3.61
Capaian IKU *Persentase kualitas pelaksanaan anggaran kanwil* Tahun 2021

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Tahunan	Pol /KP
Target	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	<i>Maximize</i>
Realisasi	100%	100%	100%	97,19%	97,19%	<i>/ TLK</i>
Capaian	104,71	104,71	104,71	101,77	101,77	

Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021 dengan realisasi periode sebelumnya

Perbandingan capaian IKU tersebut tahun 2017 s.d. 2021 ditunjukkan pada Tabel 3.62.

TABEL 3.62
Perbandingan Capaian IKU *Persentase kualitas pelaksanaan anggaran kanwil* Tahun 2017 s.d. 2021

	Q1	Q2	Q3	Q4	Tahunan
2021	100%	100%	100%	97,19%	97,19%
2020	N/A	N/A	98,93%	96,50%	96,50%
2019	99,48%	99,69%	99,59%	99,37%	99,53%
2018	38,03%	69,67%	86,87%	96,64%	96,64%
2017	38,56%	49,26%	80%	100,06%	100,06%

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.62, capaian IKU *Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran* kanwil Tahun 2021 dan 2020 berbeda dengan capaian di tahun-tahun sebelumnya karena jenis penilaian serta target mengalami perubahan. Selain itu, capaian di triwulan I dan I tahun 2020 menunjukkan N/A dikarenakan dampak pandemi Covid-19.

Realisasi IKU tahun 2017 s.d. 2021 mencerminkan realisasi Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019 dan Renstra DJPb 2020-2024 dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.63

TABEL 3.63

Perbandingan Realisasi IKU *Persentase kualitas pelaksanaan anggaran* s.d. 2021 dan Renstra

Tahun	Realisasi IKU	Renstra Kanwil	Renstra DJPB	Keterangan
2021	97,19%	-	95%	Pada tahun 2020 Kanwil tidak menyusun Renstra
2020	96,50%	-	95%	
2019	99,53%	95%	95%	
2018	96,64%	95%	95%	
2017	100,06%	95%	95%	

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Isu terkait pencapaian IKU *Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran* tahun 2021 antara lain:

1. IKU Tahunan merupakan gabungan dari SMART DJA dan IKPA (60%SMART dan 40% IKPA), dan terdiri dari 17 indikator.
2. Indikator penyerapan dan efisiensi memiliki strategi berbeda dalam upaya memperoleh hasil terbaik. Semakin tinggi realisasi, semakin rendah efisiensi dalam hal realisasi volume rincian output sama dengan target volume rincian output

Akar masalah IKU tersebut adalah:

1. Dengan banyaknya indikator yang harus dicapai, perlu upaya ekstra agar target dapat tercapai.

Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2021 untuk mendukung pencapaian IKU tersebut antara lain:

1. Realisasi anggaran telah dilaksanakan secara optimal sehingga mencapai 98,64% dari alokasi pagu anggaran.
2. Seluruh SPM selama tahun 2021 telah disampaikan ke KPPN tepat waktu, terakhir adalah SPM TUP Nihil pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Melaksanakan revisi anggaran sesuai ketentuan, terakhir adalah revisi pemutakhiran POK pada tanggal 27 Desember 2021. Untuk revisi pagu tetap, telah dilaksanakan maksimal 1 kali setiap triwulan.
4. Menyampaikan seluruh ADK kontrak secara tepat waktu dan penyelesaian tagihan tepat waktu selama tahun 2021.
5. Menyampaikan pemutakhiran Halaman III DIPA sesuai dengan kebutuhan. Pemutakhiran terakhir dilakukan pada bulan November 2021 untuk kepentingan konsistensi halaman III DIPA pada SMART DJA.
6. Melakukan penggantian uang persediaan atau pertanggungjawaban uang persediaan secara tepat waktu (tidak lebih dari 30 hari).
7. Menyampaikan LPJ secara tepat waktu, terakhir untuk LPJ Desember pada tanggal 3 Januari 2022.
8. Meminta data capaian output dari masing-masing bidang dan melakukan input pada SAKTI dan SMART DJA.

9. Melakukan rapat rencana kerja tahunan dan triwulanan sebagai mekanisme perencanaan dan mitigasi risiko dalam pelaksanaan anggaran tahun 2021

Rekomendasi rencana aksi yang dilakukan selama tahun 2021 adalah:

1. Menyelenggarakan rapat rencana kerja dan anggaran triwulan IV TA 2021 pada tanggal 8 Oktober 2021
2. Melakukan koordinasi dengan kantor pusat terkait penyelesaian revisi DJA
3. Melakukan pemutakhiran halaman III sebelum 14 Oktober 2021
4. Melakukan penyelesaian dan pembayaran belanja modal renovasi interior dalam rangka ABW
5. Melakukan pembelian belanja modal peralatan perkantoran dalam hal revisi DIPA telah selesai di DJA
6. Mengoptimalkan capaian output dengan menggunakan dana yang tersedia
7. Menyampaikan LPJ dan mengisi Capaian Output, ADK Kontrak, GU, dan tagihan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
8. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mem-percepat realisasi anggaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, UAPPA-W menyampaikan Laporan Keuangan ke UAPA-E1 dan UAPPB-W menyampaikan laporan kepada UAPB-E1 secara periodik. Berdasarkan laporan yang disampaikan tersebut, Sekretariat DJPb selaku UAPA-E1 dan UAPB-E1 melakukan penilaian yang dituangkan dalam Kepdirjen Perbendaharaan tentang Penilaian LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W.

IKU ini digunakan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB lingkup Kanwil DJPb dengan dilakukan penilaian laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB yang meliputi kriteria a) Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan b) keakuratan data laporan keuangan c) kepatuhan pelaksanaan anggaran d) Penyajian Laporan Keuangan e) Beban Kerja f) Partisipasi dan g) Laporan BMN. IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Kanwil DJPb.

Penilaian IKU ini berasal dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan c.q. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan tahunan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir periode terakhir).

Target IKU *Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W Kanwil DJPb* untuk tahun 2021 adalah sebesar 82 sebagaimana ditentukan dalam kontrak kinerja Kemenkeu-*Two* tahun 2021. Target tersebut sebelumnya hanya ada pada level Kemenkeu-*Three*, dan pada tahun 2021 baru ditetapkan pada level Kemenkeu-*Two*.

Realisasi IKU *Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W Kanwil DJPb* Tahun 2021 adalah 91,70. Nilai tersebut diperoleh dari nilai realisasi terakhir periode pelaporan pada tahun 2021, yaitu nilai pada triwulan IV. Perhitungan nilai tersebut dapat ditunjukkan pada Tabel 3.64

TABEL 3.64

Capaian IKU *Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W Kanwil DJPb* Tahun 2021

T/R	Q4	Y-21	Pol /KP
Target	82	82	<i>Maximize</i> / <i>TLK</i>
Realisasi	91,70	91,70	
Capaian	111,83	111,83	

Perbandingan capaian IKU tersebut tahun 2017 s.d. 2021 ditunjukkan pada Tabel 3.65

TABEL 3.65

Capaian IKU *Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W Kanwil DJPb* Tahun 2021

Target/ realisasi	2017	2018	2019	2020	2021
Target KK	-	-	81	81	82
Realisasi	-	-	91,66	92	91,70

Target IKU Tahun 2021

Realisasi IKU Tahun 2021

Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021 dengan realisasi periode sebelumnya

Realisasi IKU tersebut belum dapat dibandingkan dengan Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019 dan Resntra DJPb 2020-2024 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.66

Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021 dengan Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dan Resntra DJPb

TABEL 3.66
Perbandingan Realisasi IKU IKU Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W Kanwil DJPb s.d. Tahun 2021 dengan Renstra

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPB	Keterangan
2021	91,70	-	-	Pada tahun 2020 Kanwil tidak
2020	92	-	-	menyusun
2019	91,66	-	-	Renstra
2018	-	-	-	
2017	-	-	-	

Isu terkait pencapaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2021 antara lain:

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

- Secara umum, capaian IKU tahun 2021 untuk Kualitas LK Tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W sudah baik dan melebihi target yang ditetapkan. Namun demikian, terdapat ruang untuk peningkatan untuk LK Tahun 2021 (yang tahun ini dalam rangkaian proses penyusunan, tetapi menjadi IKU di Tahun 2022).

Akar masalah IKU tersebut adalah:

- Keandalan data laporan keuangan
- Kesesuaian penyesuaian laporan keuangan sesuai standar akuntansi, termasuk kesesuaian akun dengan Bagan Akun Standar
- Kelengkapan pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
- Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2021 untuk mendukung pencapaian IKU tersebut antara lain:

- Untuk LK UAPPA-W dan UAPPB-W tahun 2020, seluruh proses sudah dilaksanakan dan sudah mendapatkan hasil berupa nilai LK Tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W.
- Untuk tahun LK UAPPA-W dan UAPPB-W Tahun 2021, telah dilakukan proses sebagai berikut:
 - Melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi tahun 2021, baik yang dilakukan secara otomatis dari aplikasi (misalnya pencatatan belanja atas SP2D yang terbit) maupun yang dilakukan secara manual melalui aplikasi (misalnya jurnal manual).
 - Melaksanakan proses rekonsiliasi laporan keuangan sepanjang tahun 2021, baik internal (antara pengelola barang dan pengelola keuangan) maupun dengan KPPN.
 - Pengiriman LK UAPPA-W dan UAPPB-W Tahun 2021 (Semester dan Triwulan III)
 - Melakukan koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan barang

Rekomendasi rencana aksi yang dilaksanakan selama tahun 2021 (PIC: Bagian Umum) adalah :

- Menyelesaikan laporan keuangan sesuai dengan periodenya secara tepat waktu

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2021 berfokus Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan, Penertiban administrasi rumah negara dan digitalisasi pengelolaan BMN. IKU ini diukur melalui beberapa komponen yakni persentase kesesuaian pelaksanaan RP4 (Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan), Indeks ketepatan waktu penyampaian RP4 BMN, Persentase penyelesaian penertiban rumah negara, Indeks Kelengkapan Data Rumah Negara pada Profil Master Aset, Persentase Digitalisasi Pengelolaan BMN, Persentase Rekomendasi Optimalisasi Aset Terindikasi Idle Kementerian Keuangan yang Ditindaklanjuti, dan Indeks Kepatuhan Pengisian RUP.

Penilaian IKU ini berasal dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan c.q. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan. Pada penilaiannya, perhitungan IKU ini perlu memperhatikan:

1. Kesesuaian pelaksanaan RP4

Kesesuaian pelaksanaan RP4 diukur dari Persentase pelaksanaan Penggunaan atas Rencana Penggunaan, persentase pelaksanaan Pemanfaatan atas Rencana Pemanfaatan, persentase pelaksanaan Pemindahtanganan atas Rencana Pemindahtanganan, dan Persentase pelaksanaan Penghapusan atas Rencana Penghapusan. Realisasi pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan diukur ketika penyampaian usulan pelaksanaan Pemindahtanganan dan Penghapusan dari satuan kerja kepada Unit Eselon I yang ditembuskan kepada Biro Manajemen BMN dan Pengadaan. Realisasi penggunaan dan pemanfaatan diukur ketika satuan kerja mengajukan usulan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan kepada Unit Eselon I atau Pengelola Barang yang ditembuskan kepada Biro Manajemen BMN dan Pengadaan. Rencana penggunaan yang diukur selain rencana Penggunaan BMN untuk digunakan sendiri sesuai tugas dan fungsi.

2. Indeks ketepatan waktu penyampaian RP4 BMN

Penyusunan RP4 BMN dilaksanakan untuk mewujudkan Perencanaan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan yang terarah. RP4 BMN meliputi Rencana Penggunaan, Rencana Pemanfaatan, Rencana Pemindahtanganan, dan Rencana Penghapusan. Ketepatan waktu dalam penyusunan perencanaan BMN diperlukan agar tersedianya waktu yang cukup dan optimal dalam penelitian dan reviu atas usulan Perencanaan BMN untuk dapat dihasilkan Perencanaan yang efektif dan efisien. Penyampaian RP4 BMN setiap Unit Eselon I kepada Biro Madan. Target waktu berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Pengguna Barang sesuai dengan KMK nomor 855/KM.1/2018 tentang Perencanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan.

3. Persentase penyelesaian penertiban rumah negara

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan rumah negara yang tertib, terarah, dan akuntabel,

serta sejalan dengan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Periode 2020-2024. Penertiban Rumah Negara meliputi tiga aspek yaitu : (1) Aspek Administrasi, (2) Aspek Hukum, dan (3) Aspek Fisik. Implementasi kegiatan tahun 2020 Penertiban Rumah Negara dari Aspek Administrasi ini adalah penyelesaian kelengkapan administrasi yang meliputi Surat Keputusan Penetapan Status Golongan (PSG) Rumah Negara, Penetapan Huruf Daftar Nomor (HDNo) Rumah Negara.

Realisasi PSG diukur pada saat draft penetapan status golongan rumah negara disampaikan kepada Biro Hukum (apabila aturan terkait pelimpahan wewenang pengelolaan BMN telah ditetapkan, realisasi IKU diukur sampai dengan penetapan oleh Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan).

Realisasi HDNo diukur pada saat Unit Eselon I/Biro Umum maupun pejabat yang ditunjuk mendaftarkan rumah negara kepada Direktur Jenderal Cipta Karya dalam hal ini (apabila aturan terkait pelimpahan wewenang pengelolaan BMN telah ditetapkan, realisasi IKU diukur sampai dengan permohonan dari Kuasa Pengguna Barang):

- a) Direktur Bina Penataan Bangunan untuk rumah negara yang terletak di wilayah JABODETABEK;
- b) Direktur Bina Penataan Bangunan melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang membidangi rumah negara di provinsi untuk rumah negara yang terletak di luar wilayah

4.Persentase Completeness Master Aset

Master Aset di aplikasi SIMAN berisi data-data informasi manajemen terkait BMN. Data-data ini kemudian digunakan oleh berbagai plugin di SIMAN seperti sensus BMN, RKBMN, Wasdal, dsb. Pencatatan BMN yang tertib atas aset tersebut penting peranannya dalam mendukung pengambilan keputusan dan monitoring.

Profil BMN yang yang perlu dilengkapi untuk Rumah Negara yaitu

- a. detail bangunan (alamat, luas bangunan, dan luas dasar bangunan),
- b. foto,
- c. dokumen berupa SK PSP, SK Golongan, dan SIP (bila ada)
- d. batas dan GPS,
- e. fasilitas, dan
- f. konstruksi.

5. Persentase jumlah tindak lanjut terhadap BMN Dihentikan Penggunaannya

Biro Manajemen Barang Milik Negara dan pengadaan selaku Pengguna Barang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Kuasa

Pengguna Barang yang berada di wilayah kerjanya atas pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Pemindahtanganan Barang Milik Negara merupakan pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah. Jika suatu Barang Milik Negara dijual, maka Barang Milik Negara tersebut akan diserahkan kepada pembeli Barang Milik Negara setelah pembeli menyetorkan harga Barang Milik Negara yang bersangkutan tersebut ke Kas Negara. Penghapusan merupakan tindakan administratif dari Barang Milik Negara yaitu mengeluarkan data Barang Milik Negara dari catatan yang dibuat. Sehingga tidak terlihat lagi di dalam neraca. IKU diukur dari data BMN yang dihentikan penggunaannya berdasarkan Laporan Barang Pengguna Tahun 2020 unaudited.

6. Persentase Rekomendasi Optimalisasi Aset Terindikasi Idle Kementerian Keuangan

Pengelolaan BMN yang efektif dan efisien apabila seluruh BMN Kementerian Keuangan telah dimanfaatkan secara optimal dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

Dalam rangka melaksanakan optimalisasi tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Nota Dinas nomor ND-325/PB.1/2021 tanggal 22 Januari 2021 hal Rekomendasi pelaksanaan Optimalisasi Barang Milik Negara di Lingkungan Satuan Kerja Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai rekomendasi optimalisasi BMN terindikasi idle. Penyelesaian tindak lanjut sampai dengan dikeluarkannya produk pengelolaan bmn berupa usulan/persetujuan yang menjadi kewenangan pengguna barang.

7. Indeks Kepatuhan Pengisian RUP

Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. Salah satu informasi yang terdapat pada RUP adalah rencana pelaksanaan pengadaan. Informasi rencana pelaksanaan pengadaan akan membantu rencana penganggaran Kementerian. Oleh karena itu, satuan kerja wajib untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang dikembangkan oleh LKPP sebelum dilakukan pelaksanaan pengadaannya. Bagian Perencanaan melakukan pemantauan terhadap pengumuman RUP yang dilakukan satuan kerja. Standar ketentuan pengisian RUP dari LKPP yakni paling lambat sebelum dimulainya tahun anggaran berjalan. Sehingga fokus pemantauan yang dilakukan yaitu kepada satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki belanja modal dan belanja barang tahun anggaran 2022. Total Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 yang menjadi target pengisian RUP berdasarkan pada Nota Dinas dari Biro Manajemen BMN dan Pengadaan setelah penetapan pagu alokasi anggaran Tahun 2022.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan tahunan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir periode terakhir).

Target IKU Tahun 2021

Target IKU tersebut untuk tahun 2021 adalah 100% sebagaimana ditentukan dalam kontrak kinerja Kemenkeu-*Two* Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2021.

Realisasi IKU Tahun 2021

Realisasi IKU Persentase pemenuhan BMN yang optimal tahun 2021 adalah 112%. Dengan demikian realisasi IKU tersebut telah memenuhi target yang ditentukan dalam kontrak kinerja tahun 2021 sebagaimana ditunjukkan capaiannya pada Tabel 3.67.

TABEL 3.67

Capaian IKU *Tingkat kualitas pemenuhan BMN* tahun 2021

Target/ Realisasi	Smt I	Smt II	Tahunan	Pol /KP
Target	30%	100%	100%	<i>Maximize/ Take Last Known Value</i>
Realisasi	75,5%	112%	112%	
Nilai	120%	112%	112%	

Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021 dengan realisasi periode sebelumnya

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.66, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 112% tersebut melampaui target IKU sebesar 100% (dengan nilai capaian 112%) yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2021.

Untuk diketahui perkembangannya dari tahun ke tahun, capaian IKU tahunan 2021 dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.68.

TABEL 3.68

Perbandingan Capaian IKU *Tingkat kualitas pemenuhan BMN* Tahun 2017 s.d. 2021

Tahun	Realisasi			Target Tahunan
	Smt I	Smt II	Tahunan	
2021	75,5%	112%	112%	100%
2020	93,03%	98,15%	106,67%	92%
2019	84,68%	96,32%	104,69%	92%
2018	95,62%	103,02%	103,02%	91%
2017	90,80%	94,97%	94,97%	90%

Realisasi IKU tahun 2017 s.d. 2021 mencerminkan realisasi dari Renstra DJPb Tahun 2015-2019 dan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.69.

TABEL 3.69

Perbandingan Realisasi IKU *Tingkat kualitas pemenuhan BMN* s.d. 2021 dengan Renstra

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPB
2021	112%	-	100%
2020	98,15%	-	100%
2019	96,32%	95%	-
2018	103,02%	95%	-
2017	94,97%	95%	-

Isu,
permasalahan,
tindakan, dan
action plan

Meskipun target IKU tercapai, ada beberapa isu yang perlu mendapat perhatian seperti:

1. Masih terdapat 5 Rumah Negara yang belum dapat diusulkan penetapan PSG dan 6 Rumah Negara yang belum dapat diusulkan nomor HDNo
2. Completeness Master Aset yang belum terisi secara Optimal
3. Masih terdapat 5 rumah dengan tanah masih atas nama pihak ketiga
4. Optimalisasi Aset yang belum maksimal
5. Pengisian RUP yang tidak Maksimal

Akar masalah IKU tersebut adalah:

1. Bug pada Master Aset SIMAN yang menyebabkan field monitoring kosong yang seharusnya terisi.
2. Terdapat 5 rumah negara yang memiliki sertifikat bukan a.n. Kanwil sehingga terdapat field yang masih kosong dan rumah negara tersebut belum bisa diusulkan penetapan PSG dan HDNo.
3. Petunjuk pengisian aplikasi SIMAN yang kurang detail.
4. Tidak Terdapat Calon Penyewa yang mau mengoptimalkan Aset.

Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan K anw i l DJPb Provinsi Gorontalo dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, antara lain:

1. Mengajukan Usul PSP, Usul Pemanfaatan, dan Usul Penghapusan BMN Tahun 2021.
2. Menyampaikan RP4 BMN 2022 s.d. 2024
3. Menyusun dan Menyampaikan RKBMN 2023
4. Telah mengajukan penetapan PSG sebanyak 22 rumah dan HDNo sebanyak 23 rumah.
5. Melakukan pengisian data master aset atas field yang memungkinkan.
6. Mencari mitra untuk menjadi calon penyewa aset.
7. Mengajukan Permohonan Alih Fungsi BMN.
8. Melakukan penginputan RUP sesuai dengan ketentuan.

Selain itu, terdapat rekomendasi rencana aksi (*action plan*) untuk meningkatkan capaian mendatang IKU tersebut yang dilakukan selama tahun 2021 (penanggung jawab: Bagian Umum), yaitu :

1. Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penyelesaian Completeness Master Aset
2. Penyampaian Alih Fungsi BMN di tahun 2022 dan perubahan RP4 sebagai tindak lanjut Rencana Pemanfaatan pada RP4 BMN

Sasaran Strategis 10: Sistem informasi dan teknologi yang andal Sistem informasi dan teknologi yang andal adalah sistem informasi terintegrasi yang mengelola dan mengolah berbagai jenis input data dan informasi (resources) keuangan menjadi hasil keluaran (output) real time data dan informasi keuangan yang konsisten dalam rangka membantu para pengambil kebijakan pada unit-unit organisasi lingkup Kemenkeu dan Kementerian/Lembaga lainnya untuk mengambil keputusan dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Dalam pelaksanaan sasaran strategis ini, Kanwil DJPb PProvinsi Gorontalo menjalankan 1 (satu) IKU yaitu:

TABEL 3.70
Capaian IKU pada Sasaran Strategis
Sistem informasi dan teknologi yang andal

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
10a-N	Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	100%	100%	100%

10a-N Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi Uraian IKU tersebut adalah :
Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) adalah sistem manajemen yang meliputi kebijakan, organisasi, perencanaan, penanggung jawab, proses, dan sumber daya yang mengacu pada pendekatan risiko bisnis untuk menetapkan, mengimplementasikan, mengoperasikan, memantau, mengevaluasi, mengelola, dan meningkatkan keamanan informasi.

IKU Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi mengukur tingkat penerapan keamanan informasi di lingkungan Kanwil DJPb dan KPPN dengan berpedoman pada Perdirjen Perbendaharaan nomor Per-1/PB/2021 tentang Kebijakan SMKI di lingkungan DJPb.

Pengukuran dilakukan melalui penilaian atas pemenuhan checklist kegiatan Rencana SMKI di lingkup Kanwil DJPb dan KPPN yang didukung dengan dokumentasi sebagai bukti dukung telah dilaksanakannya kegiatan keamanan informasi di lingkup Kanwil DJPb dan KPPN. Summary Checklist Rencana SMKI sebagaimana dalam tabel berikut ini :

No	Komponen Pengendalian	Jumlah Checklist	UIC
1	Pengendalian Kebijakan Keamanan Informasi	1	Bidang SKKI
2	Pengendalian Organisasi Keamanan Informasi	1	Bidang SKKI
3	Pengendalian Keamanan Sumber Daya Manusia	1	Bagian Umum
4	Pengendalian Pengelolaan Aset Informasi	1	Bagian Umum dan Bidang SKKI
5	Pengendalian Akses	1	Bidang SKKI
6	Pengendalian Keamanan Fisik dan Lingkungan	2	Bagian Umum
7	Pengendalian Keamanan Komunikasi	1	Bidang SKKI
8	Pengendalian Hubungan Dengan Pihak Ketiga/ Pemasok	1	Bagian Umum
Total		9	

Dengan demikian formula perhitungan IKU tersebut adalah :

$$x = \frac{\sum \text{Checklist Rencana SMKI lingkup Kanwil DJPb yang selesai dilaksanakan}}{\sum \text{Target Checklist Rencana SMKI lingkup Kanwil DJPb}} \times 100\%$$

Penilaian tersebut diberikan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat SITP.

Target IKU Tahun 2021

Target IKU tersebut untuk tahun 2021 adalah 100% sebagaimana ditentukan dalam kontrak kinerja Kemenkeu-*Two* Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2021. Perlu diketahui bahwa IKU ini merupakan IKU yang baru dicantumkan pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Two* Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo pada tahun 2021.

Realisasi IKU Tahun 2021

Realisasi IKU Persentase pemenuhan BMN yang optimal tahun 2021 adalah 112%. Dengan demikian realisasi IKU tersebut telah memenuhi target yang ditentukan dalam kontrak kinerja tahun 2021 sebagaimana ditunjukkan capaiannya pada Tabel 3.71.

TABEL 3.71

Capaian IKU *Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi* tahun 2021

Target/ Realisasi	Smt I	Smt II	Tahunan	Pol /KP
Target	30%	100%	100%	<i>Maximize/ Take Last Known Value</i>
Realisasi	55,56%	100%	100%	
Nilai	120%	100%	100%	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.70, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 100% tersebut mencapai target IKU sebesar 100% (dengan nilai capaian 100%) yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Two* Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2021.

Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021 dengan realisasi periode sebelumnya

IKU ini belum dapat diketahui perkembangannya dari tahun ke tahun, karena merupakan IKU baru di tahun 2021 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.72.

TABEL 3.72

Perbandingan Capaian IKU *Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi* Tahun 2017 s.d. 2021

Tahun	Realisasi			Target Tahunan
	Smt I	Smt II	Tahunan	
2021	55,56%	100%	100%	100%
2020	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2017	-	-	-	-

Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021 dengan Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dan Resnra DJPb

Realisasi IKU tersebut tidak dapat dibandingkan dengan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.73.

TABEL 3.73

Perbandingan Realisasi IKU *Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi* s.d. 2021 dengan Renstra

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPB
2021	100%	-	-
2020	-	-	-
2019	-	-	-
2018	-	-	-
2017	-	-	-

Meskipun target IKU tercapai, ada beberapa isu yang perlu mendapat perhatian seperti:

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

1. Implementasi SMKI dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keamanan informasi sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
2. SMKI diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2021. Dari 14 pengendalian SMKI, untuk tahun 2021 dilaksanakan 8 pengendalian, yaitu kebijakan keamanan informasi, organisasi keamanan informasi, keamanan SDM, pengelolaan aset informasi, akses, keamanan fisik dan lingkungan, keamanan komunikasi, hubungan dengan pihak ketiga/pemasok.

Akar permasalahan yang ditemukan yaitu :

1. Kesadaran dan ketaatan keamanan informasi oleh seluruh pegawai dan pihak eksternal
2. Pemahaman pegawai akan tanggung jawab terkait keamanan informasi
3. Perlunya perlindungan terhadap aset informasi
4. Risiko pelanggaran keamanan oleh pengguna ke data dan sumber daya penting.

Tindakan yang telah dilaksanakan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo selama tahun 2021 adalah :

1. Diterbitkannya SK Organisasi Keamanan Informasi lingkup Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Nomor KEP-33/WPB.29/2021
2. Dilaksanakannya Survei Pemanfaatan TIK Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo setiap bulan untuk mengukur tingkat implementasi TIK di wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.
3. Dilaksanakan Internalisasi Kebijakan Keamanan Informasi.
4. Telah diterbitkan Nota Dina Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Nomor ND-519/WPB.29/2021 tentang Kewajiban Penggunaan Tanda Pengenal (Nametag) di Lingkungan Kantor selama Jam Kerja
5. Untuk memastikan perangkat pendukung TIK berupa genset dan Uninterruptible power supply (UPS) tetap berfungsi dengan baik telah dilaksanakan pengecekan dan uji coba fungsi barang milik negara (BMN) tersebut sesuai Berita Acara uji coba UPS nomor BA-14/WPB.29/2021 dan Berita Acara uji coba Genset nomor BA-15/WPB.29/2021
6. Penyusunan Laporan Join Domain

Rekomendasi rencana aksi selama tahun 2021 (Penanggung jawab: Bidang SKKI dan Bagian Umum) yaitu :

1. Mengkoordinasikan kegiatan inventarisasi aset informasi dan mendokumentasikannya dalam daftar inventaris aset informasi. Daftar inventaris aset informasi harus dipelihara dan dikelola perubahannya.
2. Mengelola dan melindungi jaringan dari berbagai bentuk ancaman dengan memastikan perangkat terhubung join domain.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi yang Telah Dilaksanakan

Berdasarkan penjelasan terkait capaian kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dapat dikatakan sangat baik, hal ini dapat dilihat dari analisis penyebab keberhasilan dan faktor pendukung sebagai berikut :

1. Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo telah melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan Nilai Kinerja Organisasi yang semakin tinggi di tiap tahunnya.
2. Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dalam pencapaian kerjanya juga telah memberikan pelayanan yang baik, terbukti dengan capaian IKU Indeks kepuasan pengguna layanan Kanwil yang mencapai nilai 4,80.
3. Tugas dan fungsi yang dijalankan oleh Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan IKU selama satu tahun ke belakang.

Hal tersebut tentunya tidak terjadi begitu saja melainkan didukung dengan beberapa faktor pendukung di antaranya:

1. Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo memiliki sumber daya manusia yang produktif sehingga dapat membantu penyelesaian kinerja yang lebih baik.
2. Pimpinan pada Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo memberikan motivasi, arahan, dan bimbingan kepada seluruh jajarannya pada setiap kesempatan.

Namun demikian, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo juga menemui penyebab kegagalan dan penurunan capaian kinerja di antaranya :

1. Penyelesaian tugas dan fungsi terkadang masih bersifat sektoral, dalam hal ini biasanya lebih mengutamakan tugas di Bidang dan Bagianya masing-masing.

Sebagai bagian dari penyelesaian masalah, penyebab kegagalan dan penurunan capaian kinerja tersebut dapat di atasi dengan melaksanakan alternatif solusi, di antaranya:

1. Memperkuat koordinasi antar Bidang dan Bagian yang didukung oleh pimpinan sehingga dapat mendukung peningkatan capaian kinerja.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi merupakan ukuran yang menunjukkan perbandingan antara penggunaan sumber daya (anggaran) terhadap output yang dihasilkan. Anggaran dianggap efisien jika dengan sumber daya yang lebih sedikit akan menghasilkan output tertentu, atau dengan sumber daya tertentu akan menghasilkan output yang lebih besar.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, efisiensi pada tingkat satuan kerja merupakan efisiensi RO (Rincian Output) untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat satuan kerja.

Efisiensi dihitung dari beberapa komponen, yaitu:

- capaian Rincian Output (RO)
- pagu dalam DIPA terakhir
- realisasi anggaran.

Untuk menentukan berapa efisiensi satuan kerja, dapat didapatkan dengan rumus sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{j=1}^m \left(\left(\text{AAKRO}_j \times \left(\prod_{i=1}^n \text{CRO}_{ji} \right)^{\frac{1}{n}} \right) - \text{RAKRO}_j \right)}{\sum_{j=1}^m (\text{AAKRO}_j)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

AAKRO_j : alokasi anggaran KRO j

RAKRO_j : realisasi anggaran KRO j

CRO_{ji} : capaian RO i pada KRO j

m : Jumlah KRO pada suatu satuan kerja

n : Jumlah RO pada suatu KRO

Untuk mengetahui berapa efisiensi satuan kerja, dapat diperoleh melalui aplikasi SMART Kemenkeu. Efisiensi memiliki rentang nilai -20 s.d. 20. Dalam hal ini, efisiensi (disimbolkan e) yang diperoleh oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo adalah sebesar 9,7

Efisiensi kemudian dihitung untuk diseratuskan, dengan menggunakan rumus Nilai efisiensi (NE). Perhitungan NE terdapat dalam PMK 22/PMK.02/2021. Namun demikian, sesuai dengan Nota Dinas Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-3418/PB.1/2021 tanggal 30 Agustus 2021, adanya refocusing anggaran pada tahun 2021 diperhitungkan pada penilaian efisiensi. Adanya refocusing menunjukkan adanya penggunaan anggaran yang lebih efisien karena jumlah anggaran / sumber daya yang digunakan untuk memperoleh output adalah lebih kecil padahal target output tetap.

Berikut ini adalah formula perhitungan Nilai Efisiensi sesuai PMK Nomor 22/PMK.02/2021 dan formula penyesuaian 2021 sesuai Nota Dinas Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Nomor ND-3418/PB.1/2021

Uraian	Formula 22/PMK.02/2021	PMK	Formula Penyesuaian 2021
Rumus Nilai Efisiensi	$NE = 50 + (e/20*50)$		$NE = 70,25 + (e/20*29,75)$

Berdasarkan rumus di atas, Nilai Efisiensi (NE) yang diperoleh oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut (skala 100):

Uraian	Formula 22/PMK.02/2021	PMK	Formula Penyesuaian 2021
Nilai Efisiensi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo	$NE=50 + (9,7/20*50)$ $NE = 74,24$		$NE=70,25 + (9,7/20*29,75)$ $NE = 84,68$

Capaian Inisiatif Strategis yang Ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Tahun 2021

1. Tingkat Implementasi Learning Organization pada Unit Kerja

Berdasarkan input bukti dukung pada aplikasi Training, diperoleh nilai sebagai berikut

- Triwulan II : Pelaksanaan kegiatan inisiatif strategis dimulai di Triwulan II sesuai dengan yang tercantum pada perjanjian kinerja dan telah tercapai sebesar 59,24% dari target 60%.
- Triwulan III : Pelaksanaan kegiatan inisiatif strategis dimulai di Triwulan III sesuai dengan yang tercantum pada perjanjian kinerja dan telah tercapai sebesar 60,47% dari target 60%.
- Triwulan IV : Pelaksanaan kegiatan inisiatif strategis dimulai di Triwulan IV sesuai dengan yang tercantum pada perjanjian kinerja dan telah tercapai sebesar 96,4% dari target 80%.

Inisiatif strategis ini merupakan IS mandatory yang diberikan langsung oleh Kantor Pusat, dalam pelaksanaannya IS ini tidak mendukung salah satu IKU. Namun demikian, IS ini mendukung salah satu sasaran strategis Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo yaitu Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi.

2. Peningkatan Nilai kualitas pengelolaan kinerja ber-basis Strategy Focused Organization melalui koordinasi yang intens

Dalam rangka pemenuhan is tersebut, telah dilaksanakan bermacam-macam kegiatan di antaranya:

- Triwulan I : Telah dilaksanakan sosialisasi Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja Berbasis Strategy Focused Organization (SFO) kepada seluruh pejabat dan pegawai pada Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo pada hari Rabu, 10 Februari 2021 sesuai Nota Dinas Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Nomor : ND-140/WPB.29/2021 tanggal 05 Februari 2021 Hal Pelaksanaan DKO Periode s.d. Januari tahun 2021, Pembahasan Cascading dan Alignment IKU Kemenkeu-Two-Three-Four-Five, Sosialisasi Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja berbasis SFO, dan Pembahasan IKU Tambahan.
- Triwulan II : Telah dilaksanakan FGD bersama Bagian OTL Setditjen pada tanggal 22 April 2021 sesuai dengan Nota Dinas Kepala Kanwil DJPb No-mor : ND-408/WPB.29/2021
- Triwulan III : Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan IS Peningkatan nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization melalui koordinasi yang Intens di internal dan eksternal sesuai dengan Nota Dinas Kepala Kanwil Nomor ND-881/WPB.29/2021 pada tanggal 15 September 2021.
- Triwulan IV : Telah dilaksanakan Evaluasi terhadap Hasil Penilaian Kantor Pusat DJPb atas Pemenuhan Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja sesuai dengan Nota Dinas Kepala Kanwil Nomor ND-29/WPB.29/2022 tanggal 10 Januari 2022.

Sesuai dengan namanya, IS tersebut mendukung pencapaian IKU Nilai kualitas pengel-olaan kinerja ber-basis Strategy. Adanya IKU ini dapat meningkatkan capaian IKU tersebut hingga meraih peringkat I untuk kategori Kanwil Kecil.

Rencana Aksi Masa Depan

Meksipun realisasi seluruh IKU telah mencapai targetnya, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo selalu berusaha untuk memperbaiki diri dalam rangka pencapaian yang optimal atas target-target kinerja, baik kinerja utama maupun kinerja-kinerja lainnya. Upaya yang akan dilakukan guna meningkatkan kinerjanya di masa mendatang antara lain:

1. Meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran K/L melalui Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA), *Spending Review*, *Performance Dialogue*, dan monitoring proyeksi dan realisasi belanja K/L;
2. Meningkatkan kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa melalui pendampingan yang intens kepada Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi dan *one on one meeting* menggali setiap permasalahan untuk dapat diselesaikan dengan tuntas;
3. Meningkatkan kualitas LKBUN dengan menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan akuntansi berkelanjutan dan monitoring penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP, LKKL, dan LKBUN;
4. Menghadirkan narasumber kunci dalam rangka meningkatkan kualitas Kajian dan Laporan yang disusun;
5. Mendorong Satker K/L mitra kerja KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa untuk meningkatkan kepatuhan dalam rekonsiliasi dan menjaga kualitas data laporan keuangan;
6. Meningkatkan efektivitas pelatihan teknis perbendaharaan melalui updating materi sosialisasi sesuai perkembangan kebijakan standar dan sistem akuntansi pemerintahan yang berlaku;
7. Meningkatkan kepuasan pengguna layanan dengan melakukan penyusunan updating langkah-langkah peningkatan kinerja layanan 2022;
8. Meningkatkan akurasi perencanaan kas pemerintah pusat melalui komunikasi intensif dan pelatihan berkesinambungan bagi operator perencanaan kas;
9. Meningkatkan kualitas SDM yang *fit for purpose* melalui reassessment dan updating soal dan modul pembelajaran hard competency;
10. Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi melalui monitoring penyelesaian tindak lanjut DAMS, survei SFO, dan survei persepsi integritas;
11. Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran DJPb melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Kanwil dari sisi penyerapan anggaran, pencapaian output, efisiensi, serta konsistensi dengan rencana penarikan dana.

Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan Kementerian Keuangan maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dan untuk seluruh jajaran Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dapat menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode mendatang.

LAIN-LAIN

- ❖ Pandemi Covid-19 sedikit banyak berdampak pada keberlangsungan pelaksanaan beberapa IKU selama tahun 2021, namun demikian Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tetap dapat mengawal capaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- ❖ Selanjutnya, dalam rangka tetap memonitor perencanaan kinerja tiap tahunnya seluruh unit kerja di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo diminta untuk melaporkan realisasi capaian kinerja tiap triwulanan secara berjenjang.

B.

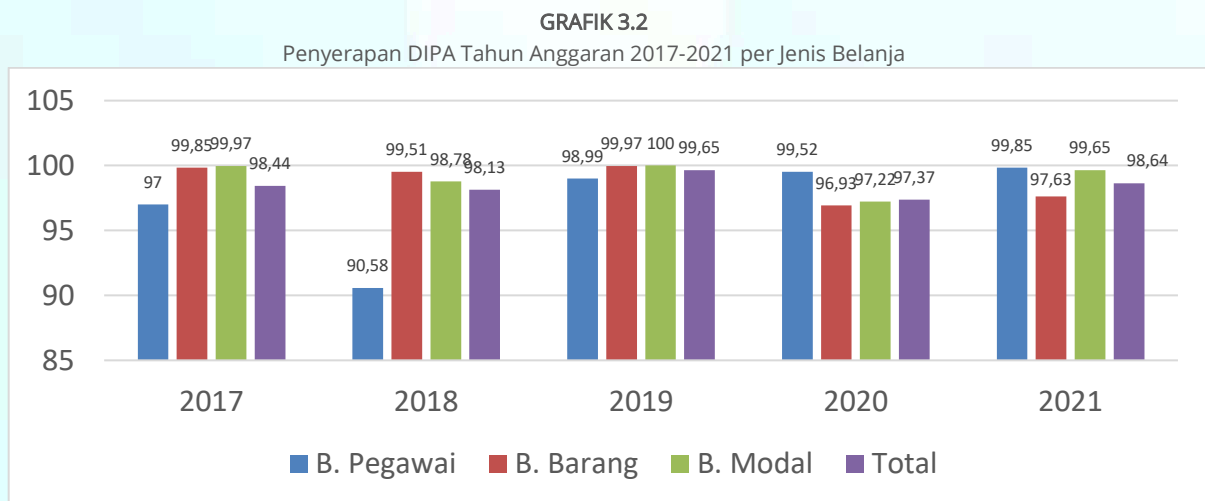
REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi DIPA Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo TA 2021

Berdasarkan data per 20 Januari 2022 dengan menggunakan *online monitoring* SPAN, realisasi penyerapan DIPA Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo TA 2021 untuk semua jenis belanja sebesar Rp 4.058.316.889 atau mencapai 98,64% dari total pagu sebesar Rp 4.114.280.000.

Seluruh kegiatan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis belanja. Untuk realisasi per jenis belanja pada tahun 2021, realisasi belanja pegawai mencapai sebesar Rp 520,295,000 (99,85% dari pagu sebesar Rp 521,088,000), belanja barang mencapai sebesar Rp 2,059,401,159 (97,63% dari pagu sebesar Rp 2,109,398,000), dan belanja modal sebesar Rp 1,478,620,730 (99,65% dari pagu sebesar Rp 1,483,794,000).

Persentase penyerapan DIPA per jenis belanja tahun 2017 s.d. 2021 ditunjukkan pada Grafik 3.2.



Sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.2, persentase penyerapan DIPA secara keseluruhan mengalami dinamika naik dan turun, namun demikian Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tetap berusaha melakukan penyerapan DIPA dari tahun ke tahun secara maksimal.

2. Perbandingan Pagu DIPA dan Realisasi DIPA TA 2021 Per-Kegiatan

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, pada tahun anggaran (TA) 2021 Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo melaksanakan 11 (sebelas) kegiatan. Adapun realisasi DIPA TA 2021 untuk kegiatan tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.74.

TABEL 3.74

Realisasi DIPA Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 per Output

Kode	Kegiatan	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi	%
4715	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	3.189.495.000	3.148.989.049	98,73%
4718	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	18.100.000	16.717.725	92,36%
4719	Pengelolaan Organisasi dan SDM	660.068.000	651.697.615	98,73%
4722	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	4.966.000	4.163.000	83,83%
4803	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	13.459.000	12.306.000	91,43%
4804	Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara	2.000	1.700	85,00%
6212	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	112.021.000	110.180.450	98,36%
6213	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	83.499.000	82.000.350	98,21%
6214	Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara	2.267.000	2.234.000	98,54%
6215	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	21.802.000	21.436.500	98,32%
6216	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	8.601.000	8.590.500	99,88%
	Total	4.114.280.000	4.058.316.889	98,64%

3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi merupakan ukuran yang menunjukkan perbandingan antara penggunaan sumber daya (anggaran) terhadap output yang dihasilkan. Anggaran dianggap efisien jika dengan sumber daya yang lebih sedikit akan menghasilkan output tertentu, atau dengan sumber daya tertentu akan menghasilkan output yang lebih besar.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, efisiensi pada tingkat satuan kerja merupakan efisiensi RO (Rincian Output) untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat satuan kerja.

Efisiensi dihitung dari beberapa komponen, yaitu:

- capaian Rincian Output (RO)
- pagu dalam DIPA terakhir
- realisasi anggaran.

Untuk menentukan berapa efisiensi satuan kerja, dapat didapatkan dengan rumus sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{j=1}^m \left(\left(AAKRO_j \times \left(\prod_{i=1}^n CRO_{ji} \right)^{\frac{1}{n}} \right) - RAKRO_j \right)}{\sum_{j=1}^m (AAKRO_j)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja
 $AAKRO_j$: alokasi anggaran KRO j
 $RAKRO_j$: realisasi anggaran KRO j
 CRO_{ji} : capaian RO i pada KRO j
 m : Jumlah KRO pada suatu satuan kerja
 n : Jumlah RO pada suatu KRO

Untuk mengetahui berapa efisiensi satuan kerja, dapat diperoleh melalui aplikasi SMART Kemenkeu. Efisiensi memiliki rentang nilai -20 s.d. 20. Dalam hal ini, efisiensi (disimbolkan e) yang diperoleh oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo adalah sebesar 9,7

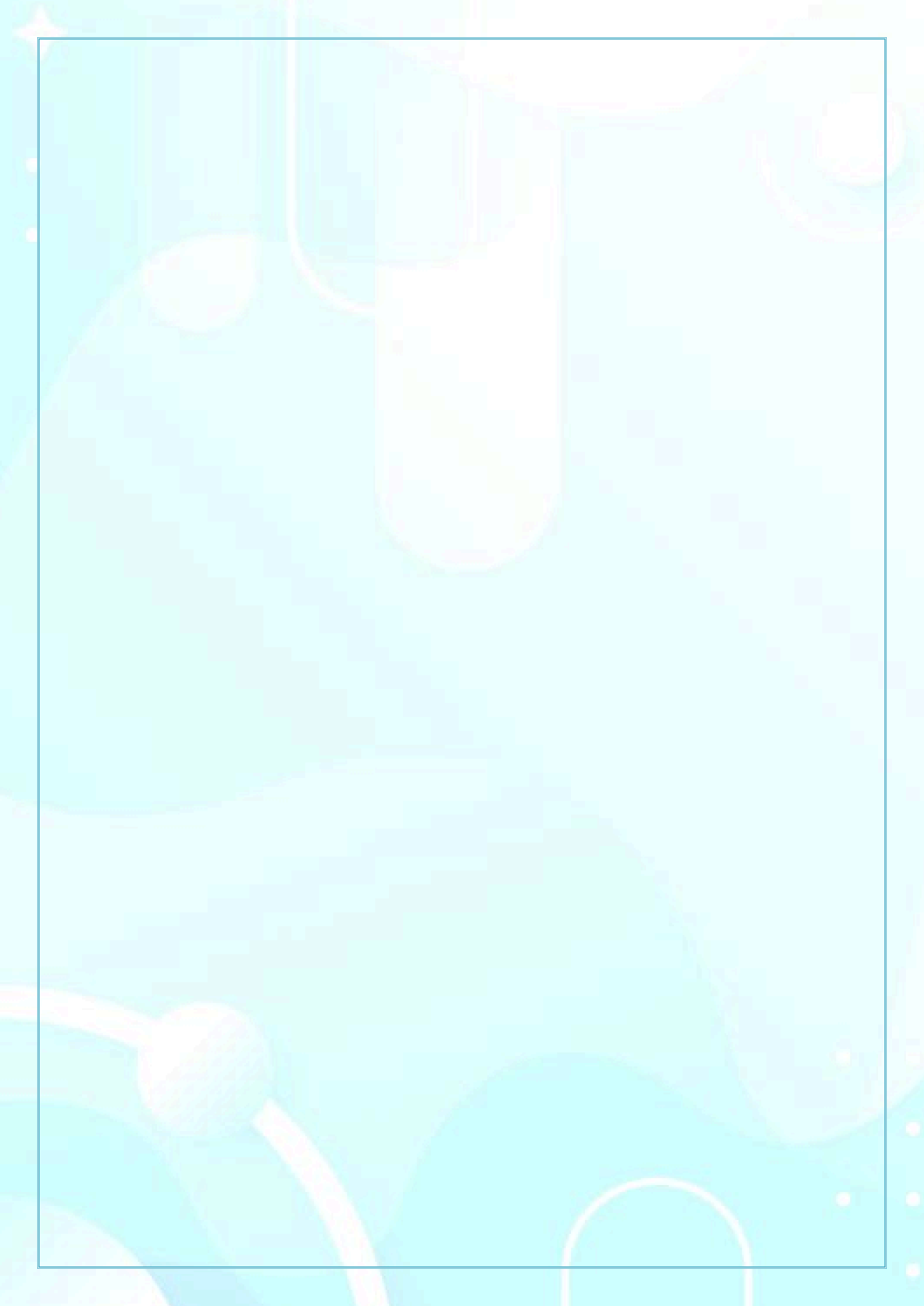
Efisiensi kemudian dihitung untuk diseratuskan, dengan menggunakan rumus Nilai efisiensi (NE). Perhitungan NE terdapat dalam PMK 22/PMK.02/2021. Namun demikian, sesuai dengan Nota Dinas Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-3418/PB.1/2021 tanggal 30 Agustus 2021, adanya refocusing anggaran pada tahun 2021 diperhitungkan pada penilaian efisiensi. Adanya refocusing menunjukkan adanya penggunaan anggaran yang lebih efisien karena jumlah anggaran / sumber daya yang digunakan untuk memperoleh output adalah lebih kecil padahal target output tetap.

Berikut ini adalah formula perhitungan Nilai Efisiensi sesuai PMK Nomor 22/PMK.02/2021 dan formula penyesuaian 2021 sesuai Nota Dinas Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-3418/PB.1/2021

Uraian	Formula PMK 22/PMK.02/2021	Formula Penyesuaian 2021
Rumus Nilai Efisiensi	$NE = 50 + (e/20*50)$	$NE = 70,25 + (e/20*29,75)$

Berdasarkan rumus di atas, Nilai Efisiensi (NE) yang diperoleh oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut (skala 100):

Uraian	Formula PMK 22/PMK.02/2021	Formula Penyesuaian 2021
Nilai Efisiensi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo	$NE=50 + (9,7/20*50)$ $NE = 74,24$	$NE=70,25 + (9,7/20*29,75)$ $NE = 84,68$



C. KINERJA LAINNYA

Selain 10 (Sepuluh) Sasaran Strategis (SS) yang diterapkan oleh Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dengan capaian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo juga menghasilkan kinerja-kinerja lain selama tahun 2021 yang tidak masuk dalam Kontrak Kinerja namun masih terkait dengan tugas dan fungsi. Kinerja lain-lain tersebut adalah sebagai berikut:

1. INOVASI MANAJEMEN/PELAYANAN

a. Menyelenggarakan kegiatan *Treasury Awards* Tahun 2021 dan penyerahan Plakat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)



Pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021, telah diselenggarakan kegiatan Penganugerahan *Treasury Awards* Tahun 2021 serta penyerahan Piagam dan Plakat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kegiatan ini menjadi rangkaian dari kegiatan Penyerahan DIPA Petikan dan DIPA TKDD Tahun 2022. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Aula

rumah dinas Gubernur Gorontalo dihadiri oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Walikota dan Bupati di wilayah Provinsi Gorontalo serta seluruh satuan kerja yang memperoleh penghargaan.

Treasury Awards merupakan penghargaan tahunan yang diberikan oleh Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo kepada pemerintah daerah, satuan kerja, dan pihak yang terlibat dalam penyaluran APBN yang memiliki prestasi sangat baik. Pada tahun anggaran 2021 ada 12 Kategori Penghargaan yang



diberikan. Selanjutnya dilanjutkan dengan Penyerahan Piagam dan Plakat Penghargaan Kepada Pemerintah Daerah yang telah memperoleh Opini WTP, yaitu

- 1) Pemerintah Daerah yang lima kali atau lebih secara berturut meraih opini WTP (Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Pemerintah Kabupaten Pohuwato, dan Pemerintah Kota Gorontalo).
- 2) Pemerintah Daerah yang memperoleh Opini WTP atas LKPD Tahun 2020 (Pemerintah Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo Utara yang telah memperoleh opini WTP selama empat kali berturut-turut).



Pada kesempatan tersebut Direktur Jenderal Perbendaharaan Bapak Hadiyanto melalui rekaman video mengucapkan selamat kepada penerima anugerah dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemerintah daerah dan satuan kerja yang telah bekerja keras dalam melaksanakan anggaran untuk menghadirkan belanja negara yang efektif, tepat sasaran, berkualitas dan akuntabel.

b. Menyelenggarakan *Talkshow* Eksklusif Peluang Ekspor Produk UMKM ke Eropa Timur.



Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo bersama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia Untuk Ukraina (Georgia dan Armenia) mengadakan kegiatan Talk Show dengan tema "Peluang Ekspor Produk UMKM Ke Eropa Timur" yang diselenggarakan secara daring melalui Virtual Zoom Meeting dan Live di Youtube kanwil DJPb Provinsi Gorontalo pada hari Rabu, tanggal

13 Oktober 2021, dalam kegiatan tersebut dengan menghadirkan antara lain:

Keynote Speaker

- 1) Dr. Hadiyanto, S.H., L.L.M., Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
- 2) Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, Duta Besar Republik Indonesia Untuk Ukraina (Georgia dan Armenia);
- 3) Dr. Ir. H. Darda Daraba, M.Si., Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
- 4) Sugiyarto, SE, Ak., M.Sc., Ph.D., Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.

Narasumber

- 1) Baskara Pradipta, M.A. Consellor Fungsi Ekonomi, Kedutaan Besar Indonesia Untuk Ukraina (Georgia dan Armenia);
- 2) Drs. H. Risjon Sunge, M.Si., Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo;
- 3) Muhalim Litty, S.E., Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Provinsi Gorontalo;
- 4) Agus Windiarto Direktur Pelaksana III Indonesia EKIM Bank;
- 5) Dr. Ir. AM Adnan, MP., Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Badan Karantina Pertanian.

Moderator

Leisyawati Ali, S.IP, M.Si., Presenter TVRI Gorontalo.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan informasi terkait peluang ekspor yang eropa timur bagi UMKM khususnya yang ada di Provinsi Gorontalo sekaligus membangun sinergi seluruh instansi terkait untuk selanjutnya dapat mendorong dan mendukung pelaku UMKM yang ada untuk dapat mengambil peluang tersebut.

c. **Focus Group Discussion (FGD) Potensi Investasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Gorontalo.**



Dalam rangka upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di Gorontalo Tahun 2021 dari sisi Fiskal, Moneter, serta Kebijakan Pemerintah Daerah khususnya untuk meningkatkan potensi investasi Gorontalo, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mengadakan kegiatan *Focus Group Discussion* dengan mengangkat tema "Potensi Investasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Gorontalo" yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 yang menghadirkan

Narasumber :

- 1) Sugiyarto, SE, Ak., M.Sc., Ph.D., Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Gorontalo;
- 2) Budi Widihartanto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo;
- 3) Mukhamad Mukhanif, S.Si, M.Si., Kepala BPS Provinsi Gorontalo;
- 4) Budiyanto Sidiki, S.Sos., M.Si. Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo;
- 5) Dr. Muhammad Amir Arham, M.E, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo;
- 6) Bambang Trihandoko, SP,M.Si, Kepala Dinas PMESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.

d. Membangun Kerja Sama dengan Politeknik Keuangan Negara STAN.

Dalam rangka meningkatkan kualitas Kajian Fiskal Regional dan kualitas pengelolaan BUMDes, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo menyelenggarakan rapat kerjasama dengan PKN STAN pada tanggal 24 September 2021. Rapat tersebut dilaksanakan secara virtual dengan mengundang para dosen dan akademisi dari PKN STAN.

Rapat kerjasama ini membahas tentang rancangan kegiatan diklat yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keterampilan tim penyusun Kajian Fiskal Regional. Selain itu, rapat ini juga membahas tentang rencana pembinaan dan pelatihan terhadap BUMDes di Provinsi Gorontalo.

Kerjasama dilanjutkan dengan penandatanganan MoU kerjasama antara PKN STAN dengan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo.

Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian regional Provinsi Gorontalo, membantu pelaksanaan tugas Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo sebagai *Regional Chief Economist*, dan membangun sinergi unit Kementerian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.



e. *Focus Group Discussion (FGD) Piloting Pemberdayaan Desa Tertinggal di Gorontalo.*

Memperkuat peran Kanwil DJPb sebagai *Regional Chief Economist* serta sebagai bentuk sinergi antara Kanwil DJPb dengan Pemerintah Daerah di Gorontalo. Kamis, 26 Agustus 2021 diselenggarakan kegiatan *Focus Group Discussion* Piloting Pemberdayaan Desa Tertinggal di Gorontalo. Acara ini menghadirkan 3 Narasumber dari lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu:



- 1) Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Gorontalo, Ibu Debby I.M. Habibie, S.E., M.Si. menyampaikan paparan terkait Identifikasi Status Desa dan Berbagai Program Pemberdayaan di Desa.
- 2) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Bpk. Misran Lasantu, S.Pi., M.Si. menyampaikan paparan terkait Capaian Kinerja dan Program yang Sudah Dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Pesisir dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP).
- 3) Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Bpk. Relianto Mamonto, S.P., M.Si. menyampaikan paparan terkait Program Strategis Pertanian dalam Mendukung Pembangunan Desa.



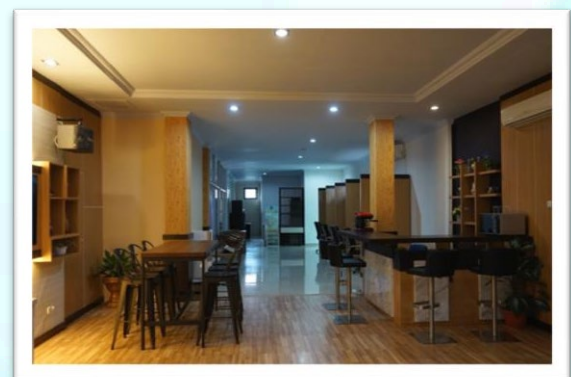
Kegiatan ini merupakan langkah awal Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo bersama Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Piloting Desa Percontohan untuk meningkatkan status Desa Tertinggal di Gorontalo.

f. Inovasi Bidang Sarana Prasarana

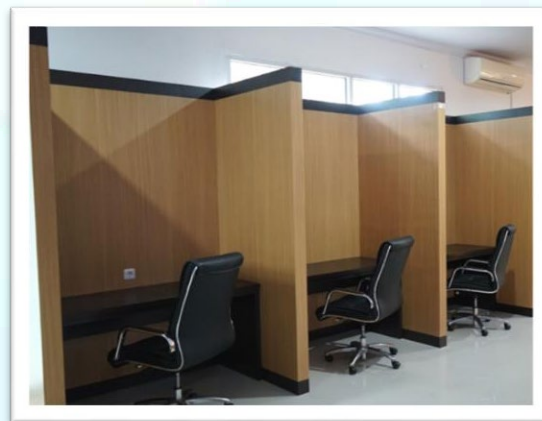
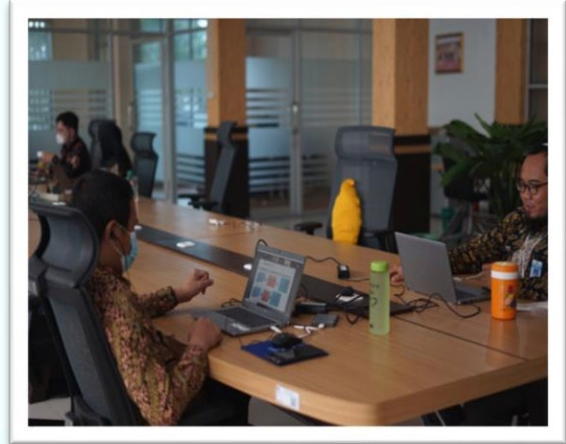


Dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang nyaman, aman, kolaboratif, dan modern untuk meningkatkan output dan kinerja pegawai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) melaksanakan penguatan budaya kerja yang sejalan

dengan konsep *New Ways of Working* (NWOW) melalui implementasi *Activity Based Workplace* (ABW) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK453/KMK.01/2020 tentang



Pedoman Pelaksanaan *Activity Based Workplace* di Lingkungan Kementerian Keuangan. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-97/PB/2021 tentang Buku Pedoman Standar Layout dan Desain Bangunan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, telah diatur konsep ruang kerja yang *Flexible, Responsive, Smart, dan Healthy*



(FRESH) *Office*, yang sejalan dengan konsep NWOOW Kementerian Keuangan. Dalam

rangka mengakselerasi implementasi FRESH Office pada DJPb, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-10/PB/2021 tentang Implementasi FRESH Office pada Unit Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang memuat penahapan implementasi FRESH Office pada kantor pusat maupun kantor vertikal

serta BLU di lingkungan DJPb. Berdasarkan Kepdirjen dimaksud, ditetapkan unit yang ditunjuk untuk melaksanakan FRESH Office di tahun 2021, meliputi 3 (tiga) unit eselon II Kantor Pusat DJPb, 6 (enam) Kanwil, dan 11 (sebelas) KPPN yang salah satunya adalah Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo.

2. INISIATIF PEMBERANTASAN KORUPSI

a. Refreshment materi mengenai Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi

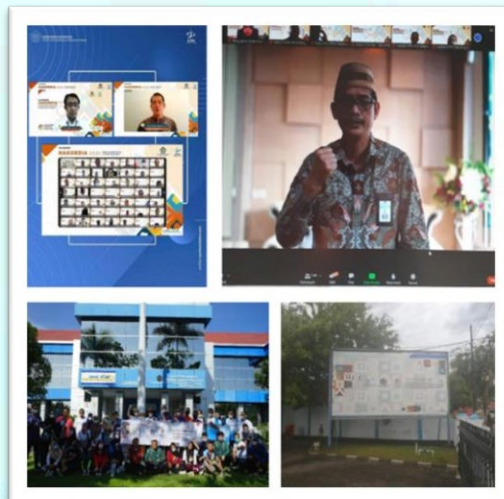


Pengendalian gratifikasi adalah bagian dari upaya pembangunan suatu sistem pencegahan korupsi untuk mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang kondusif dalam pencegahan korupsi. Dalam sambutannya pada Pelatihan Kerangka Penguatan Integritas (KPI), Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk

memahami dan membentengi diri agar tidak terlibat dalam praktek korupsi dan gratifikasi.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal menyampaikan refreshment materi mengenai Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi. Kegiatan Pelatihan KPI dilaksanakan secara daring dalam 6 kali pertemuan Focus Group Discussion pada periode tanggal 6 Agustus, 19-25 Agustus dan 1-2 September 2021. Kegiatan pelatihan tersebut diikuti oleh seluruh pegawai Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo.

b. Kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2021



Sebagai bentuk dukungan dan keikutsertaan pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2021 pada tingkat Kementerian Keuangan, seluruh unit kerja pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai bentuk internalisasi kepada seluruh pejabat dan

pegawai guna meningkatkan pemahaman dan semangat anti korupsi sesuai Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-4732/PB.1/2021 hal Penyelenggaraan Kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2021.

Pada peringatan Hakordia lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2021, tema yang diusung adalah

“DJPb Handal, DJPb BIJAK (terus Berkarya, kuatkan Integritas, jaga semangat Anti Korupsi)”.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:



- 1) Talkshow bertajuk “Strategi Menjaga Integritas dan Memelihara Semangat Anti Korupsi” yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat DJPb dan diikuti oleh seluruh pegawai Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo secara daring pada tanggal 2 Desember 2021.
- 2) Pembuatan video testimoni terkait dengan motivasi pelaporan gratifikasi, pandangan terkait dengan gratifikasi serta kinerja UPG unit kerja dalam melaksanakan program pengendalian gratifikasi, dan ditampilkan dalam acara talkshow Hakordia 2021 Kantor Pusat DJPb.
- 3) Pemasangan billboard dan spanduk bertemakan Hakordia 2021 di halaman kantor.
- 4) Pelaksanaan senam bersama yang diikuti oleh pegawai Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dan KPPN Gorontalo.
- 5) Sebagai puncak peringatan Hakordia tahun 2021, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2021 dari Kementerian PAN-RB pada acara Penganugerahan Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM Tahun 2021 pada tanggal 20 Desember 2021 secara daring.

3. PENGHARGAAN

a. Peringkat Satu Pemenuhan Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* Tahun 2021 untuk Kategori Kanwil Kecil

Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo telah melaksanakan pemenuhan langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja. Langkah-langkah tersebut merupakan upaya nyata bagi unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk melaksanakan *action plan* yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan kinerja berbasis

Strategy Focused Organization (SFO). Untuk mengukur kualitas pelaksanaan pengelolaan kinerja tersebut, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah melaksanakan penilaian terhadap pemenuhan langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-330/PB/2021 tentang Penetapan Peringkat Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2021, penilaian diberikan atas indikator pemenuhan langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dengan bobot sebesar 70% dan NKO dengan bobot sebesar 30%. Berdasarkan penilaian tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo menduduki peringkat satu untuk kategori kanwil kecil dengan nilai total sebesar 94,40.



b. Peringkat Tiga Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Terbaik (LKPK-TW dan LSKP-TW) Tahun 2021 Kategori Kanwil Kecil



Tantangan untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan Keuangan Negara di sektor publik semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi dan aktivitas ekonomi yang semakin masif. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah tidak tinggal diam dan terus melakukan inovasi. Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo sebagai institusi publik juga terus berbenah. Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo kembali menyusun Laporan Statistik Keuangan Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 275/PMK.05/2014 tentang Manual Statistik Keuangan Pemerintah.

Upaya ini berguna untuk mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan Keuangan Negara yang modern dan professional, sebagaimana juga dilakukan negara maju sesuai *best practices*. Guna meningkatkan pemanfaatan informasi keuangan tersebut, Laporan GFS disusun secara regional agar informasinya dapat dimanfaatkan oleh Pemda, Bank Indonesia, BPS dan stakeholder lainnya. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-286/PB/2021 tentang Kriteria Penilaian Dan Penetapan Hasil Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Tahun Penilaian 2021, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo berhasil meraih peringkat dua untuk Kategori Kanwil Kecil.

c. Juara 1 *Statistic Award* 2021 Kategori “Instansi Vertikal Paling Responsif Statistik” Tingkat Provinsi Tahun 2021

Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo menerima penghargaan sebagai Juara 1 *Statistic Award* 2021 Kategori “Instansi Vertikal Paling Responsif Statistik” Tingkat Provinsi Tahun 2021 dari BPS Gorontalo.

Pemberian penghargaan tersebut sebagai rangkaian kegiatan Hari Statistik Nasional yang diperingati setiap tanggal 26 September. Pada tanggal 27 September 2021, penghargaan tersebut secara simbolis diberikan langsung oleh Sekda Provinsi Gorontalo kepada perwakilan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo.



4. CAPAIAN LAINNYA

Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2021



Berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-40/PB/2021 tanggal 28 Januari 2021 Hal Penetapan Unit Kerja yang Mengikuti Penilaian Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM) di Tingkat Nasional Tahun 2021, dijelaskan bahwa tahun 2021 penilaian WBK/WBBM tingkat nasional akan menjadi IKU Kemenkeu-Wide dan menjadi IKU mandatory bagi seluruh unit eselon I. Untuk mendukung pencapaian IKU tersebut, DJPb mengirimkan 104 (seratus empat) unit kerja yang terdiri dari 49 (empat puluh sembilan) unit kerja mengikuti penilaian WBK termasuk Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo, serta 55 (lima puluh lima) unit kerja mengikuti penilaian WBBM tingkat nasional. Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo merupakan unit kerja vertikal yang diusulkan mengikuti penilaian WBK karena telah memenuhi penilaian akselerasi pembangunan ZI tahun 2020. Setelah melalui proses panjang penanaman dan pelaksanaan nilai integritas, Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo menjadi salah satu unit peraih gelar WBK pada Tahun 2021 dari Kementerian PAN-RB sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro OTL Sekretaris Jenderal Nomor ND-1940/SJ.2/2021 tanggal 16 Desember 2021 hal Penganugerahan Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM Tahun 2021. Keberhasilan dalam mencapai predikat WBK bukan merupakan akhir, melainkan langkah yang berkelanjutan demi menjaga dan turut serta mewujudkan *island of integrity* di Republik Indonesia.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo. Target Kinerja disusun berdasarkan Rencana Strategis Ditjen Perbendaharaan dan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sekaligus sebagai perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo merupakan salah satu unit eselon II di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang ditinjau dari tugas dan fungsinya memiliki variasi tugas yang beragam. Hal ini mengingat bahwa sebagai hasil reorganisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi manajemen keuangan negara, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo merupakan gabungan dari beberapa tugas dan fungsi.

Keberagaman tugas dan fungsi tersebut menjadikan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo memiliki peran yang strategis terhadap keberhasilan pencapaian tugas Kementerian Keuangan secara keseluruhan. Sebagai unit vertikal setingkat eselon II, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo berperan sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah, dan diberikan mandat oleh Menteri Keuangan yang memberikan penekanan terkait penguatan peran kantor wilayah sebagai *chief economist* di daerah. Kantor wilayah saat ini dituntut memiliki kemampuan untuk menyampaikan berbagai kebijakan Kementerian Keuangan, sekaligus memberikan *insight* mengenai kondisi perekonomian terkini dan meningkatkan peran kantor wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kantor Wilayah DJPb Provinsi Gorontalo bersama KPPN di wilayah kerjanya sebagai garis depan pelayanan juga turut memantau dan mengevaluasi kinerja APBN kita dalam praktik dan realisasinya.

Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo memiliki peran strategis di lingkungan Kementerian Keuangan, mengingat bahwa dari keseluruhan siklus APBN, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo memegang peran yang dinamis berkaitan dengan penyiapan/penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan BLU, sistem perbendaharaan maupun pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Pencapaian kinerja Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2021 telah sesuai dengan target yang ditetapkan di mana seluruh IKU telah mencapai dan melampaui target yang telah ditetapkan. Jumlah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2021 berhasil memperoleh nilai sebesar 109,76 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 107,47 Nilai ini merupakan pencapaian dari total 20 IKU yang ditetapkan.

Langkah-Langkah di masa mendatang

Meksipun realisasi seluruh IKU telah mencapai targetnya, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo selalu

berusaha untuk memperbaiki diri dalam rangka pencapaian yang optimal atas target-target kinerja, baik kinerja utama maupun kinerja-kinerja lainnya. Upaya yang akan dilakukan guna meningkatkan kinerjanya di masa mendatang antara lain:

1. Meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran K/L melalui Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA), *Spending Review*, *Performance Dialogue*, dan monitoring proyeksi dan realisasi belanja K/L;
2. Meningkatkan kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa melalui pendampingan yang intens kepada Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi dan *one on one meeting* menggali setiap permasalahan untuk dapat diselesaikan dengan tuntas;
3. Meningkatkan kualitas LKBUN dengan menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan akuntansi berkelanjutan dan monitoring penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP, LKKL, dan LKBUN;
4. Menghadirkan narasumber kunci dalam rangka meningkatkan kualitas Kajian dan Laporan yang disusun;
5. Mendorong Satker K/L mitra kerja KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa untuk meningkatkan kepatuhan dalam rekonsiliasi dan menjaga kualitas data laporan keuangan;
6. Meningkatkan efektivitas pelatihan teknis perbendaharaan melalui updating materi sosialisasi sesuai perkembangan kebijakan standar dan sistem akuntansi pemerintahan yang berlaku;
7. Meningkatkan kepuasan pengguna layanan dengan melakukan penyusunan updating langkah-langkah peningkatan kinerja layanan 2022;
8. Meningkatkan akurasi perencanaan kas pemerintah pusat melalui komunikasi intensif dan pelatihan berkesinambungan bagi operator perencanaan kas;
9. Meningkatkan kualitas SDM yang *fit for purpose* melalui reassessment dan updating soal dan modul pembelajaran hard competency;
10. Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi melalui monitoring penyelesaian tindak lanjut DAMS, survei SFO, dan survei persepsi integritas;
11. Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran DJPb melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Kanwil dari sisi penyerapan anggaran, pencapaian output, efisiensi, serta konsistensi dengan rencana penarikan dana.

Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan Kementerian Keuangan maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dan untuk seluruh jajaran Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dapat menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode mendatang.

KONTRAK KINERJA
NOMOR: 38/PB/2021



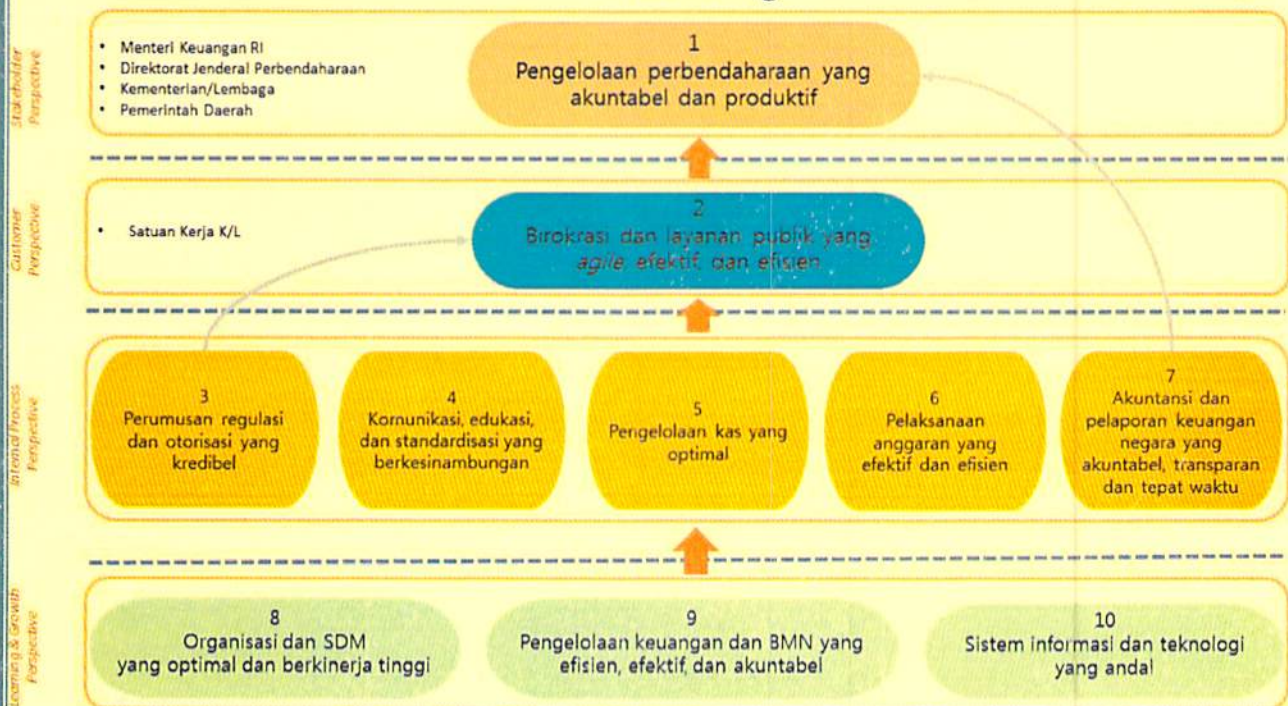
KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI GORONTALO
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



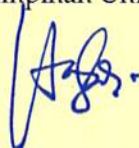
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI GORONTALO

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel dan produktif	1a-N Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil DJPb	94
		1b-N Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program	82
		1c-N Rata-rata nilai kualitas output monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	91
2.	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien	2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil DJPb	4,64 (skala 5)
3.	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	3a-N Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran satker yang diselesaikan tepat waktu	100%
4.	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan	4a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87,5
		4b-N Nilai kinerja pelaksanaan pembinaan dan supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN	8,5
		4c-CP Persentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI	100%
5.	Pengelolaan kas yang optimal	5a-N Persentase akurasi perencanaan kas	82%
6.	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	6a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89
		6b-N Rata-rata nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN	90
7.	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu	7a-N Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,1%
		7b-N Nilai kualitas Laporan <i>Government Finance Statistic</i> (GFS) tingkat wilayah	79
8.	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	8a-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	84
		8b-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83
		8c-N Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	78
9.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan	9a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil DJPb	95,5%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	akuntabel	9b-N Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W	82
		9c-N Tingkat kualitas pengelolaan BMN	100%
10.	Sistem informasi dan teknologi yang andal	10a-N Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	80%

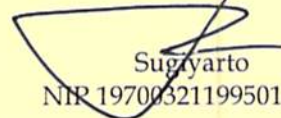
Program/Kegiatan	Anggaran
1. Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp. 416,778,000
2. Program Dukungan Manajemen	Rp 3.912.916.000

Atasan Pimpinan Unit Kerja,



Andin Hadiyanto
NIP 196506091990121001

Gorontalo, 8 Februari 2021
Pimpinan Unit Kerja,



Sugiyarto
NIP 197003211995011002

Sasaran Kerja Pegawai

No	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Andin Hadiyanto	1	Nama	Sugiyarto
2	NIP	196506091990121001	2	NIP	197003211995011002
3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama (IV/e)	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Tk. I / IV/b
4	Jabatan	Direktur Jenderal Perbendaharaan	4	Jabatan	Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo
5	Unit Kerja	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	5	Unit Kerja	Direktorat Jenderal Perbendaharaan

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Mewujudkan nilai LK Kuasa BUN tingkat Kanwil DJPb yang berkualitas	-	94	100	11 bln	-
2	Melaksanakan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program secara berkualitas	-	82	100	11 bln	-
3	Mewujudkan nilai kualitas output monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	-	91	100	11 bln	-
4	Memenuhi kepuasan satker terhadap layanan Kanwil DJPb	-	4,64 (skala 5)	100	11 bln	-
5	Menyelesaikan revisi dokumen pelaksanaan anggaran satker secara tepat waktu	-	100%	100	11 bln	-
6	Mewujudkan edukasi dan komunikasi yang efektif	-	87,5	100	11 bln	-
7	Mewujudkan nilai kinerja pelaksanaan pembinaan dan supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN	-	8,5	100	11 bln	-
8	Mewujudkan implementasi aplikasi SAKTI	-	100%	100	11 bln	-
9	Mewujudkan perencanaan kas yang akurat	-	82%	100	11 bln	-
10	Meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran K/L	-	89	100	11 bln	-
11	Mewujudkan rata-rata nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN	-	90	100	11 bln	-
12	Mewujudkan rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	-	98,1%	100	11 bln	-
13	Mewujudkan nilai Laporan <i>Government Finance Statistic</i> (GFS) tingkat wilayah yang berkualitas	-	79	100	11 bln	-
14	Memenuhi nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	-	84	100	11 bln	-
15	Memenuhi nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	-	83	100	11 bln	-
16	Mewujudkan nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai Kanwil DJPb yang baik	-	78	100	11 bln	-
17	Meningkatkan kualitas pelaksanaan	-	95,5%	100	11 bln	Rp 4.329.694.000

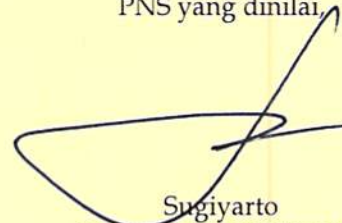
No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
	anggaran Kanwil DJPb					
18	Memenuhi nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W Kanwil DJPb	-	82	100	11 bln	-
19	Meningkatkan kualitas pengelolaan BMN	-	100%	100	11 bln	-
20	Melaksanakan implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	-	80%	100	11 bln	-

Pejabat Penilai,



Andm Hadiyanto
NIP 196506091990121001

Gorontalo, 8 Februari 2021
PNS yang dinilai,



Sugiyarto
NIP 197003211995011002

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi Eselon II : Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo
Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1.	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel dan produktif	1a-N	Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil DJPb	94
		1b-N	Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program	82
		1c-N	Rata-rata nilai kualitas output monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	91
2.	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil DJPb	4,64 (skala 5)
3.	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	3a-N	Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran satker yang diselesaikan tepat waktu	100%
4.	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87,5
		4b-N	Nilai kinerja pelaksanaan pembinaan dan supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN	8,5
		4c-CP	Persentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI	100%
5.	Pengelolaan kas yang optimal	5a-N	Persentase akurasi perencanaan kas	82%
6.	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	6a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89
		6b-N	Rata-rata nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN	90
7.	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu	7a-N	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,1%
8.	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	7b-N	Nilai kualitas Laporan <i>Government Finance Statistic</i> (GFS) tingkat wilayah	79
		8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	84
		8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83
9.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel	8c-N	Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	78
		9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil DJPb	95,5%
		9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W	82
10.	Sistem informasi dan teknologi yang andal	9c-N	Tingkat kualitas pengelolaan BMN	100%
		10a-N	Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	80%

Jumlah Anggaran Program Tahun 2021

015.08.648741 : Rp. 4.114.280.000

Kegiatan

CD.4803 Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko : Rp. 13.459.000
 CD.4804 Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara : Rp. 2.000
 CD.6212 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi : Rp. 112.021.000
 CD.6213 Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko : Rp. 83.499.000
 CD.6214 Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara : Rp. 2.267.000
 CD.6215 Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara : Rp. 21.802.000
 CD.6216 Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif : Rp. 8.601.000
 WA.4715 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum : Rp. 3.189.495.000
 WA.4718 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik : Rp. 18.100.000
 WA.4719 Pengelolaan Organisasi dan SDM : Rp. 660.068.000
 WA.4722 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal : Rp. 4.966.000

**Kepala Kantor Wilayah
 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo**


 Sugiyarto

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo
Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%
1.	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel dan produktif	1a-N	Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil DJPb	94	99,49	105,84
		1b-N	Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program	82	100	120
		1c-N	Rata-rata nilai kualitas output monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	91	94,63	103,98
2.	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil DJPb	4,64 (skala 5)	4,8	103,45
3.	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	3a-N	Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran satker yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100
4.	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan	4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87,5	93,28	106,6
		4b-N	Nilai kinerja pelaksanaan pembinaan dan supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN	8,5	9,38	110,35
		4c-CP	Persentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI	100%	100%	100
5.	Pengelolaan kas yang optimal	5a-N	Persentase akurasi perencanaan kas	82%	100%	120
6.	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	6a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89	94	105,62
		6b-N	Rata-rata nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN	90	99,53	110,59
7.	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu	7a-N	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,1%	100%	101,94
		7b-N	Nilai kualitas Laporan <i>Government Finance Statistic (GFS)</i> tingkat wilayah	79	95,1	120
8.	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	84	94,4	112,38
		8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83	87,07	104,90
		8c-N	Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	78	93,9	120
9.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel	9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil DJPb	95,5%	97,19	101,77
		9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W	82	91,7	111,83
		9c-N	Tingkat kualitas pengelolaan BMN	100%	112%	112
10.	Sistem informasi dan teknologi yang andal	10a-N	Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	80%	100%	120

Jumlah Anggaran Program Tahun 2021 : Rp. 4.114.280.000
Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2021 : Rp. 4.058.316.889

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo


 Sugiyarto

Kemenkeu-Three						
Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Case IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU	
Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	1a-CP Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kamwil	4,64	Tahunan	CP	Raw Data	Exact/ Moderate
Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	2a-CP Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	84	Tahunan	CP	Average	Proxy/ Moderate
	2b-CP Nilai rata-rata hard competency pegawai Bagian Umum	78	Tahunan	CP	Raw Data	Proxy/ Moderate
	2c-N Nilai kualitas pelaksanaan Literasi Perbendaharaan	75	Tahunan	N	-	Proxy/ Moderate
	2d-N Persentase akurasi data SDM pada HRIS	90%	Semester	N	-	Proxy/ Moderate
	2e-N Persentase efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat	90	Triwulan	N	-	Proxy/ Moderate
Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif dan akuntabel	3a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kamwil	95,50%	Triwulan	CP	Average	Proxy/ Moderate
	3b-CP Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W	82	Tahunan	CP	Average	Proxy/ Moderate
	3c-CP Tingkat kualitas pengelolaan BMN	100%	Semester	CP	Average	Proxy/ Moderate
Sistem informasi dan teknologi yang andal	4a-CP Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	80%	Semester	CP	Raw Data	Proxy/ Moderate

MATRIKS CASCADING INDEKS KINERJA UTAMA KEMENKEU-FOUR KANWIL TAHUN 2021
 UNIT : SUBBAG KEPEGAWAIAN BAGIAN UMUM

Kemenkeu Four															
Sasaran Strategis	Nama IKU	Target		Jenis Casc IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali		Sasaran Strategis	Nama IKU	Target		Jenis Casc IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali	
Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	1a-CP	Nilai rata-rata hard competency pegawai Subbag Kepegawaian	78	78	CP	Raw Data	Proxy/ Moderate	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	1a-CP	Nilai penguasaan terhadap hard competency	78	78	CP	Average	Proxy/ High
	1b-N	Nilai kualitas pelaksanaan Literasi Perbendaharaan	75	Semester	N	-	Proxy/ Moderate		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	1c-C	Persentase akurasi data SDM pada HRIS	90%	Semester	CP	Average	Proxy/ Moderate		1b-C	Persentase akurasi data SDM pada HRIS	90%	Semester	C	Raw Data	Proxy/ Moderate
	1d-N	Indeks ketaatan pejabat/pegawai dalam pelaksanaan penilaian perilaku	3	Semester	N	-	Proxy/ Moderate		1c-C	Indeks ketaatan pejabat/pegawai dalam pelaksanaan penilaian perilaku	3	Semester	C	Raw Data	Proxy/ Moderate
	1e-N	Persentase akurasi data aplikasi kepegawaian DJPb	100%	Semester	N	-	Proxy/ Moderate		1d-C	Persentase akurasi data aplikasi kepegawaian DJPb	100%	Semester	C	Raw Data	Proxy/ Moderate
	1f-N	Indeks ketepatan waktu penyelesaian permasalahan penilaian perilaku dan dialog kinerja individu	3	Semester	N	-	Proxy/ High		1e-C	Indeks ketepatan waktu penyelesaian permasalahan penilaian perilaku dan dialog kinerja individu	3	Semester	C	Raw Data	Proxy/ High
	1g-N	Indeks ketepatan waktu penyusunan penetapan jabatan dan peringkat jabatan pelaksana	3,25	Tahunan	N	-	Proxy/ Moderate		1f-N	Indeks ketepatan waktu penyusunan SK hasil penilaian kinerja pegawai	3,25	Tahunan	N	-	Proxy/ High
	1h-N	Indeks ketepatan waktu penyelesaian Usul Kenaikan Pangkat/KGB/Pensiun pegawai	3,25	Semester	N	-	Proxy/ Moderate		1g-C	Indeks ketepatan waktu penyelesaian Usul Kenaikan Pangkat/KGB/Pensiun pegawai	3,25	Semester	C	Raw Data	Proxy/ Moderate

MATRIKS CASCADING INDEKS KINERJA UTAMA KEMENKEU-FOUR/ KANWIL TAHUN 2021
UNIT : SUBBAG KEUANGAN BAGIAN UMUM

Kemenkeu Four															
Sasaran Strategis	Nama IKU		Target		Jenis Casc IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali	Sasaran Strategis	Nama IKU		Target		Jenis Casc IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali
Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	1a-CP	Nilai rata-rata hard competency pegawai Subbag Keuangan	78	Tahunan	CP	Raw Data	Proxy/ Moderate	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	1a-CP	Nilai penguasaan terhadap hard competency	78	Tahunan	CP	Average	Proxy/ High
	1b-N	Nilai kualitas pelaksanaan Literasi	75	Tahunan	N	Raw Data	Proxy/ Moderate		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif dan akuntabel	2a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,5%	Triwulan	CP	Take Last Known Value	Proxy/ Moderate	Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif dan akuntabel	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	2b-N	Persentase penerbitan SPM secara akurat	100%	Triwulan	N	-	Proxy/ High		2c-C	Persentase SPM yang diproses secara akurat	100%	Triwulan	N	Raw Data	Proxy/ High
	2c-CP	Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W	82	Tahunan	CP	Average	Proxy/ Moderate		2d-N	Indeks penyusunan Laporan Keuangan Kanwil secara tepat waktu	3,25	Semester	N	-	Proxy/ High
	2d-N	Indeks pembayaran TKPKN/ uang makan /lembur/ honorarium pegawai secara akurat dan tepat waktu	3	Triwulan	N	-	Proxy/ Moderate		2a-C	Indeks pembayaran TKPKN/uang makan/lembur /honorarium pegawai secara akurat dan tepat waktu	3	Triwulan	C	-	Proxy/ Moderate
	2e-N	Persentase input data pada Aplikasi SMART dan e-monev	100%	Triwulan	C	-	Proxy/ High		2f-C	Persentase input data pada Aplikasi SMART dan e-monev	100%	Triwulan	C	Raw Data	Proxy/ High
	2f-C	Indeks ketaatan unit kerja KPPN dalam menyampaikan LK Tingkat UAKPA	3	Semester	C	-	Proxy/ Moderate		2g-C	Indeks ketaatan unit kerja KPPN dalam menyampaikan LK Tingkat UAKPA	3	Semester	C	Raw Data	Proxy/ Moderate
	2g-N	Indeks ketepatan waktu pengiriman laporan pertanggungjawaban pembayaran tunjangan kinerja	3	Triwulan	N	-	Proxy/ Moderate		2h-C	Indeks ketepatan waktu pengiriman laporan pertanggungjawaban pembayaran tunjangan kinerja	3	Triwulan	N	Raw Data	Proxy/ Moderate

MATRIKS CASCADING INDEKS KINERJA UTAMA KEMENKEU-FOUR KANWIL TAHUN 2021
UNIT : SUBBAG TURT BAGIAN UMUM

Kemenkeu Four															
Sasaran Strategis	Nama IKU		Target		Jenis Casc IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali	Sasaran Strategis	Nama IKU		Target		Jenis Casc IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali
Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	1a-CP	Nilai rata-rata hard competency pegawai Subbag TURT	78	Tahunan	CP	Raw Data	Proxy/ Moderate	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	2a-CP	Nilai penguasaan terhadap hard competency	78	Tahunan	CP	Average	Proxy/ High
	1b-N	Nilai kualitas pelaksanaan Literasi Perbendaharaan	75	Tahunan	N	-	Proxy/ Moderate		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif dan akuntabel	2a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan BMN	100%	Semester	CP	Average	Proxy/ Moderate	Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif dan akuntabel	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	2b-N	Indeks penyusunan RKBMN secara benar dan tepat waktu	3	Tahunan	N	-	Proxy/ High		3b-C	Indeks penyusunan RKBMN secara benar dan tepat waktu	3	Tahunan	C	Raw Data	Proxy/ High
	2c-N	Indeks penyusunan konsolidasian RKBMN wilayah secara benar dan tepat waktu	3	Tahunan	N	-	Proxy/ Moderate		3c-C	Indeks penyusunan konsolidasian RKBMN wilayah secara benar dan tepat waktu	3	Tahunan	C	Raw Data	Proxy/ Moderate
	2d-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,50%	Triwulan	CP	Average	Proxy/ Moderate		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	2e-CP	Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W	82	Tahunan	CP	Average	Proxy/ Moderate		3d-N	Indeks ketepatan waktu penyusunan LK tingkat UAPPB-W secara tepat waktu	3,25	Semesteran	N	-	Proxy/ High
	2f-C	Indeks ketaatan unit kerja KPPN dalam menyampaikan LK Tingkat UAKPB	3	Semester	C	-	Proxy/ Moderate		3e-C	Indeks ketaatan unit kerja KPPN dalam menyampaikan LK Tingkat UAKPB	3	Semesteran	C	Raw Data	Proxy/ Moderate

MATRIKS CASCADING INDEKS KINERJA UTAMA KEMENKEU-FOUR KANWIL TAHUN 2021
UNIT : SUBBAG PENILAIAN KINERJA BAGIAN UMUM

Kemenkeu Four															
Sasaran Strategis	Nama IKU	Target		Jenis Casc IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali		Sasaran Strategis	Nama IKU	Target		Jenis Casc IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali	
Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	1a-CP	Nilai rata-rata hard competency pegawai Subbag Penilaian Kinerja	78	Tahunan	CP	Raw Data	Proxy/ Moderate	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	1a-CP	Nilai penguasaan terhadap hard competency	78	Tahunan	CP	Average	Proxy/ High
	1b-N	Nilai kualitas pelaksanaan literasi	75	Tahunan	N	-	Proxy/ Moderate		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	1c-CP	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	84	Tahunan	CP	Average	Proxy/ Moderate		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	1d-N	Indeks penyelesaian cascading secara tepat waktu	3	Tahunan	N	-	Proxy/ Moderate		1b-C	Indeks ketaatan unit kerja KPPN dan Bidang lingkup Kanwil dalam menyampaikan laporan capaian kinerja	3	Tahunan	C	Raw Data	Proxy/ Moderate
	1e-N	Indeks ketaatan unit kerja KPPN dan Bidang lingkup Kanwil dalam menyampaikan laporan capaian kinerja	3,25	Triwulan	N	-	Proxy/ Moderate		1c-C	Indeks penyelesaian cascading secara tepat waktu	3,25	Triwulan	C	Raw Data	Proxy/ Moderate
	1f-N	Indeks ketepatan waktu penyelesaian permasalahan pengelolaan kinerja organisasi	3	Semester	N	-	Proxy/ High		1d-C	Indeks ketepatan waktu penyelesaian permasalahan pengelolaan kinerja organisasi	3	Semester	C	Raw Data	Proxy/ High
	1g-N	Indeks ketaatan pejabat/pegawai dalam melakukan upload dokumen kinerja pada aplikasi fitur pengelolaan kinerja	3	Semester	N	-	Proxy/ Moderate		1e-C	Indeks ketaatan pejabat/pegawai dalam melakukan upload dokumen kinerja pada aplikasi fitur pengelolaan kinerja	3	Semester	C	Raw Data	Proxy/ Moderate
	1h-N	Persentase laporan capaian kinerja Kemenkeu-Two Kanwil dan Kemenkeu-Three KPPN yang disampaikan secara tepat waktu	100%	Triwulan	N	-	Proxy/ Moderate		1f-N	Indeks penyusunan laporan peningkatan kualitas pengelolaan kinerja secara tepat waktu	3	Triwulan	N	Average	Proxy/ High
	1i-N	Indeks ketepatan waktu pelaporan Analisis Beban Kerja	3	Triwulan	N	-	Proxy/ Moderate		1g-C	Indeks ketepatan waktu pelaporan analisis beban kerja	3	Triwulan	C	Raw Data	Proxy/ Moderate

MATRIS CASCAING INDEKS KINERJA UTAMA KEMENKEU-THREE KANWIL TAHUN 2021

UNIT : BIDANG PPA I

Kemenkeu-Three							Kemenkeu-Four							Kemenkeu-Five											
Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cara IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU	Unit in Charge	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cara IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali	Unit in Charge	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cara IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali						
Pengelola perbendaharaan yang akurat dan produktif	1a-CP	Nilai kualitas laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil	91	Tahunan	CP	-	Proxyl/Moderate	Seksi PPA I AB/C/D	Pengelola perbendaharaan yang akurat dan produktif	1a-N	Indeks ketepatan waktu penyusunan laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil	3,25	Semester	N	-	Proxyl/Moderate	Seksi PPA I AB/C/D	Pengelola perbendaharaan yang akurat dan produktif	1a-C	Indeks ketepatan waktu penyusunan konsep laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil	3,25	Semester	C	-	Proxyl/High
	1b-N	Indeks kualitas laporan reviu PRRP	3	Tahunan	N	-	Proxyl/Moderate	Seksi PPA I AB/C/D	1b-C	Indeks kualitas laporan reviu PRRP	3	Tahunan	C	-	Proxyl/Moderate	Seksi PPA I AB/C/D	1c-C	Indeks kualitas laporan reviu PRRP	3	Tahunan	C	-	Proxyl/High		
Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien	2a-CP	Indeks kepuasan Saliter terhadap layanan Bidang PPA I	4,64 (skala 5)	Tahunan	CP	Raw Data	Exact/Moderate	Seksi PPA I AB/C/D	2a-N	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	3a-CP	Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Saliter yang diselesaikan secara tepat waktu	100%	Triwulan	CP	-	Proxyl/High	Seksi PPA I AB/C/D	3a-CP	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	100%	Triwulan	CP	Take Last Known Value	Exact/Moderate	Seksi PPA I AB/C/D	3a-N	Persentase ADK revisi dokumen pelaksanaan anggaran Saliter yang diselesaikan secara tepat waktu	100%	Triwulan	N	-	Proxyl/High		
Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	4a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Bidang PPA I	67,5	Semester	CP	Average	Proxyl/Moderate	Seksi PPA I AB/C/D	4a-CP	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	67,5	Semester	CP	-	Proxyl/High	Seksi PPA I AB/C/D	4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Seksi PPA I AB/C/D	67,5	Semester	CP	Average	Proxyl/Moderate		
Pengalokasian yang optimal	5a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas Kanwil	82%	Triwulan	CP	Average	Exact/Moderate	Seksi PPA I AB/C/D	5a-CP	Pengalokasian kas yang optimal	82%	Triwulan	CP	Average	Proxyl/Moderate	Seksi PPA I AB/C/D	5a-N	Persentase akurasi perencanaan kas Kanwil (AB/C/D) (sesuai pembinaan)	82%	Triwulan	CP	Average	Proxyl/High		
Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	6a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89%	Triwulan	CP	Average	Proxyl/Low	Seksi PPA I AB/C/D	6a-CP	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	89%	Triwulan	CP	Average	Exact/Moderate	Seksi PPA I AB/C/D	6a-N	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L pada K/PPI AB/C/D (sesuai pembinaan)	89%	Triwulan	CP	Average	Proxyl/High		
Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	7a-CP	Nilai rata-rata hard competency pegawai Bidang PPA I	78	Tahunan	CP	Raw Data	Proxyl/Moderate	Seksi PPA I AB/C/D	7a-CP	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	78	Tahunan	CP	Average	Proxyl/Low	Seksi PPA I AB/C/D	7a-N	Nilai rata-rata hard competency pegawai Seksi PPA I	78	Tahunan	CP	Average	Proxyl/High		
	7b-N	Nilai kualitas pelaksanaan Literasi Perbendaharaan	75%	Tahunan	N	-	Proxyl/Moderate	Seksi PPA I AB/C/D	7b-N	Nilai kualitas pelaksanaan Literasi Perbendaharaan	75%	Tahunan	N	-	Proxyl/Moderate	Seksi PPA I AB/C/D	7b-C	Nilai kualitas pelaksanaan Literasi Seksi PPA I	75%	Tahunan	N	-	Proxyl/Moderate		
	7c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90%	Triwulan	N	-	Proxyl/Moderate	Seksi PPA I AB/C/D	7c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90%	Triwulan	N	-	Proxyl/Moderate	Seksi PPA I AB/C/D	7c-C	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90%	Triwulan	N	-	Proxyl/Moderate		

MATRIKS CASCADING INDEKS KINERJA UTAMA KEMENKEU-FOUR KANWIL TAHUN 2021
UNIT : SEKSI KI BIDANG SKKI

Kemenkeu-Four								Kemenkeu-Five							
Sasaran Strategis	Nama IKU		Target		Jenis Casc IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali	Sasaran Strategis	Nama IKU		Target		Jenis Casc IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali
Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	1a-CP	Nilai rata-rata hard competency pegawai Seksi Kepatuhan Internal	78	Tahunan	CP	Raw Data	Proxy/Moderate	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	1a-CP	Nilai penguasaan terhadap hard competency	78	Tahunan	CP	Average	Proxy/High
	1b-CP	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83	Tahunan	CP	Average	Proxy/Moderate		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	1c-N	Indeks penyusunan laporan monitoring kode etik pegawai	3,25	Triwulan	N	-	Proxy/High		1b-C	Indeks penyusunan laporan monitoring kode etik pegawai	3,25	Triwulan	C	Raw Data	Proxy/High
	1d-N	Nilai kualitas pelaksanaan literasi Perbendaharaan	75	Tahunan	N	-	Proxy/Moderate		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	1e-N	Persentase penyampaian laporan penerapan pemantauan pengendalian intern secara tepat waktu	100%	Triwulan	N	-	Proxy/High		1d-C	Indeks penyusunan konsep laporan penerapan pemantauan pengendalian intern secara tepat waktu	3,25	Triwulan	C	Raw Data	Proxy/High
	1f-N	Persentase tindak lanjut LHP Ijen dan BPK secara tepat waktu	100%	Tahunan	N	-	Proxy/Moderate		1e-N	Indeks penyusunan laporan pengaduan dan gratifikasi secara tepat waktu	3	Triwulan	N	-	Proxy/Moderate
	1g-N	Indeks penyusunan rekomendasi hasil pelaksanaan tugas kepatuhan internal	3	Triwulan	N	-	Proxy/High		1f-C	Persentase penyusunan konsep rekomendasi hasil pelaksanaan tugas kepatuhan internal	100%	Triwulan	C	Raw Data	Proxy/High

Nomor DIPA
Tanggal
Digital Stamp

DIPA Awal
SP DIPA- 015.08.2.648741/2021
16 November 2020
DS:0056-0758-4018-7150

Kementerian Negara/Lembaga (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi (08) Ditjen Perbendaharaan
Provinsi (31) GORONTALO
Kode/Nama Satker (648741) KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO
Pencairan pada KPPN KPPN GORONTALO
Pagu DIPA

4.114.280.000

FUNGSI	01 PELAYANAN UMUM	4.114.280.000
Sub Fungsi	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	4.114.280.000
PROGRAM	CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	241.651.000
Kegiatan	CD.4803 Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	13.459.000
Kegiatan	CD.4804 Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara	2.000
Kegiatan	CD.6212 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	112.021.000
Kegiatan	CD.6213 Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	83.499.000
Kegiatan	CD.6214 Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	2.267.000
Kegiatan	CD.6215 Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	21.802.000
Kegiatan	CD.6216 Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	8.601.000
PROGRAM	WA Program Dukungan Manajemen	3.872.629.000
Kegiatan	WA.4715 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	3.189.495.000
Kegiatan	WA.4718 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	18.100.000
Kegiatan	WA.4719 Pengelolaan Organisasi dan SDM	660.068.000
Kegiatan	WA.4722 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	4.966.000

RENCANA KERJA ANGGARAN T.A. 2021 PADA SATKER 648741

Ket PIC	Kode	Deskripsi	Volume	Anggaran	Realisasi	Ket PIC
		Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo		4.114.280.000	4.058.316.889	
Program	'015.08.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko		241.651.000	236.749.500	
Kegiatan	4803	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko		13.459.000	12.306.000	
KRO	4803.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	2 Laporan	13.459.000	12.306.000	
RO	4803.FAE.001	Rekomendasi atas Kinerja Investasi Pemerintah		13.459.000	12.306.000	PPA II
Kegiatan	4804	Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara		2.000	1.700	
KRO	4804.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	2 Laporan	2.000	1.700	
RO	4804.FAE.002	Rekomendasi Outstanding Pinjaman		2.000	1.700	PPA II
Kegiatan	6212	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi		112.021.000	110.180.450	
KRO	6212.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	2 Orang	5.085.000	5.050.000	
RO	6212.FAC.002	Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan BLU		5.085.000	5.050.000	PPA I
KRO	6212.FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	10 Laporan	33.286.000	32.911.700	
RO	6212.FAH.002	Komunikasi dan Edukasi Dalam Rangka Penyusunan Government Financial Statistic (GFS)		18.102.000	18.095.000	PAPK
RO	6212.FAH.003	Komunikasi dan Edukasi Penyusunan LKKL dan LKBUN		15.184.000	14.816.700	PAPK
KRO	6212.FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	7 Dokumen	73.650.000	72.218.750	
RO	6212.FAL.001	Pembinaan Pelaksanaan Anggaran		73.650.000	72.218.750	PPA I
Kegiatan	6213	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko		83.499.000	82.000.350	
KRO	6213.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	2 Orang	2.000	2.000	
RO	6213.FAC.001	Monev Pengembangan Kompetensi KPA, PPK, PPSPM, Bendahara dan Pengelola Perbendaharaan		2.000	2.000	SKKI
KRO	6213.FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	18 Dokumen	83.497.000	81.998.350	
RO	6213.FAL.001	Monev Penerimaan dan Pengeluaran Kas		1.941.000	1.934.000	PPA I
RO	6213.FAL.003	Reviu Belanja Pemerintah		81.556.000	80.064.350	PPA I
Kegiatan	6214	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara		2.267.000	2.234.000	
KRO	6214.FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	1 Dokumen	2.267.000	2.234.000	
RO	6214.FAL.001	Koordinasi dan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas		2.267.000	2.234.000	PPA II

Kegiatan	6215	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara		21.802.000	21.436.500	
KRO	6215.FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	10 Laporan	21.802.000	21.436.500	
RO	6215.FAH.001	Government Financial Statistic (GFS)		11.055.000	10.829.000	PAPK
RO	6215.FAH.003	Laporan Keuangan BUN		10.747.000	10.607.500	PAPK
Kegiatan	6216	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif		8.601.000	8.590.500	
KRO	6216.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1 Laporan	8.601.000	8.590.500	
RO	6216.FAE.002	Rekomendasi Tarif Standar Biaya Masukan		8.601.000	8.590.500	PPA I
Program	'015.08.WA	Program Dukungan Manajemen		3.872.629.000	3.821.567.389	
Kegiatan	4715	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		3.189.495.000	3.148.989.049	
KRO	4715.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1 Layanan	5.500.000	5.500.000	
RO	4715.EAB.002	Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I		5.500.000	5.500.000	UMUM
KRO	4715.EAC	Layanan Umum	24 Layanan	1.134.906.000	1.112.987.018	
RO	4715.EAC.001	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran		40.256.000	33.018.312	UMUM
RO	4715.EAC.004	Operasionalisasi Kantor		1.094.650.000	1.079.968.706	UMUM
KRO	4715.EAD	Layanan Sarana Internal	3 unit	573.263.000	566.042.341	
RO	4715.EAD.002	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		194.640.000	192.591.611	UMUM
RO	4715.EAD.003	Peralatan Fasilitas Perkantoran		378.623.000	373.450.730	
KRO	4715.EAE	Layanan Prasarana Internal	5636 unit	1.469.101.000	1.457.893.690	
RO	4715.EAE.001	Gedung/Bangunan		1.105.171.000	1.105.170.000	UMUM
RO	4715.EAE.002	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		363.930.000	352.723.690	UMUM
KRO	4715.EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	3 Dokumen	6.725.000	6.566.000	
RO	4715.EAN.002	Laporan Keuangan Unit Eselon I		305.000	150.000	UMUM
RO	4715.EAN.003	Laporan Kinerja (LAKIN) Unit Eselon I		6.420.000	6.416.000	UMUM
Kegiatan	4718	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik		18.100.000	16.717.725	
KRO	4718.BMB	Komunikasi Publik	4 layanan	18.100.000	16.717.725	
RO	4718.BMB.001	Pembinaan/Edukasi Publik		18.100.000	16.717.725	UMUM
Kegiatan	4719	Pengelolaan Organisasi dan SDM		660.068.000	651.697.615	
KRO	4719.EAF	Layanan SDM	90 orang	551.082.000	543.171.000	
RO	4719.EAF.001	Gaji dan Tunjangan		521.088.000	520.295.000	UMUM
RO	4719.EAF.002	Administrasi Kepegawaian		5.689.000	4.776.000	UMUM
RO	4719.EAF.004	Pengembangan SDM		24.305.000	18.100.000	UMUM

KRO	4719.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	12 Layanan	108.986.000	108.526.615	
RO	4719.EAH.001	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi		99.024.000	98.946.090	SKKI
RO	4719.EAH.003	Standar Mutu Layanan - ISO Mutu Layanan		8.461.000	8.364.000	SKKI
RO	4719.EAH.004	Unit Yang Memperoleh Predikat ZI/WBK/WBBM		1.501.000	1.216.525	SKKI
Kegiatan	4722	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		4.966.000	4.163.000	
KRO	4722.EAK	Layanan Pengawasan Internal	3 Laporan	4.966.000	4.163.000	
RO	4722.EAK.003	Penerapan Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal		4.966.000	4.163.000	SKKI